

**MODERNISASI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
ERA REVOLUSI (1945-1949) DI DAERAH BANJAR**
(Gagasan Modernisasi Pendidikan Islam Model "SMIP-1946")



Prof. Dr. Syaifuddin, M.Ag.

**MODERNISASI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
ERA REVOLUSI (1945-1949)
DI DAERAH BANJAR
(Gagasan Modernisasi Lembaga Pendidikan Islam
Model "SMIP-1946")**

Oleh

Prof. Dr. Syaifuddin, M.Ag.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022**

KATA PENGANTAR

Salah satu dari filosofi keilmuan UIN Antasari Banjarmasin dalam upaya mencapai visi “Unggul dan Berakhlak” ialah “Berbasis Lokal”, yakni: melakukan kajian keilmuan yang berdasarkan pada kebutuhan dan tuntutan lingkungan alam dan sosial di masyarakat Banjar secara regional serta berbasis pada nilai kearifan lokal (*local wisdom*) yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Dalam rangka upaya mewujudkan visi dan misi yang berlandaskan filosofi keilmuan tersebut diperlukan upaya kajian-kajian terhadap khazanah dan kearifan lokal yang ada di masyarakat Banjar, baik yang ada sekarang maupun apa yang telah diwariskan dan dilakukan oleh generasi terdahulu.

Kajian yang dilakukan untuk penulisan buku ini merupakan salah satu dari filosofi keilmuan tersebut. Selain didasari juga oleh sebuah sikap yang tumbuh dalam masyarakat umat Islam, yakni *al-muhafadhotu ‘ala qodimis sholih wal akhdzu bil jadidil aslah*, yakni ‘memelihara yang lama yang masih baik dan mengambil yang baru yang lebih baik.’ Untuk itu, kajian khazanah dan berbagai aktivitas yang baik dan bernilai di masa lalu sangat penting untuk dikaji ulang guna menemukan perbaikan ke depannya.

Berdasarkan filosofi keilmuan UIN Antasari dan paradigma keilmuan dan sikap yang dipegang oleh masyarakat Muslim tersebut kajian penelitian dalam penulisan buku ini dilakukan., yakni dengan mengkaji khazanah pemikiran modern pendidikan Islam para ulama dan guru agama pada era revolusi di Daerah Banjar atau Kalimantan Selatan. Kajian modernisasi pendidikan Islam di era Revolusi ini sangat penting mengingat kajian pendidikan Islam pada era tersebut dapat dinyatakan sangat sedikit.

Dalam kajian yang disajikan dalam buku ini meliputi: 1). Kajian terhadap latar belakang lahirnya gagasan modernisasi pendidikan Islam yang dilakukan dalam pendirian SMIP-1946; 2). Profil dan peran para ulama dan guru guru agama yang terlibat pada lahirnya gagasan modernisasi pendidikan Islam tersebut; 3) Gagasan-gagasan pokok yang ada dalam penrdirian SMIP-1946, dan 4) Refleksi konstruksi teoritik apa yang dapat diambil untuk pengembangan pendidikan Islam pada masa kini dan masa yang akan datang.

Semoga dengan adanya hasil kajian yang dituangkan dalam buku ini dapat menambah khazanah terkait dengan pemikiran dan gagasan pengembangan pendidikan Islam dan dapat pula dijadikan sebagai bahan kajian untuk pembaharuan pendidikan Islam ke depan.

Banjarmasin, 01 Juli 2022

Penulis

Prof. Dr. Syaifuddin, M.Ag.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
KATA PENGANTAR	Ii
DAFTAR ISI	Iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Pembahasan.....	11
C. Tujuan Penulisan	12
D. Metode dan sumber Penulisan	13
E. Perspektif Teoritis dan Histografis	15
BAB II PROFIL SMIP-1946 DAN ULAMA PENGAGAS MODERNISASI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM MODEL SMIP-1946	23
A. Profil SMIP-1946 Banjarmasin	23
B. Profil Ulama Penggagas Modernisasi Lembaga Pendidikan Islam Model SMIP-1946	27
BAB III SEJARAH, LATAR BELAKANG DAN MOTIVA- SI LAHIRNYA GAGASAN MODERNISASI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM MODEL “SMIP-1946”	37
A. Sejarah Singkat Beridirinya SMIP-1946	37
B. Latar Belakang Pendirian SMIP-1946	40
C. Motivasi Modernisasi Model SMIP-1946	56
BAB IV GAGASAN-GAGASAN MODERNISASI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM MODEL SMIP-1946	67
A. Modernisasi Nama Lembaga pendidikan Islam ..	68
B. Modernisasi Visi, Misi, Tujuan Pendidikan Islam Model SMIP-1946	80
C. Modernisasi dalam Muatan Kurikulum “SMIP- 1946”	84

BAB V	PENUTUP	98
	A. Simpulan	98
	B. Refleksi Konstruksi Teoritik	102
DAFTAR PUSTAKA		118
LAMPIRAN-LAMPIRAN		122
BIOGRAFI PENULIS		131

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Modernisasi pendidikan Islam di Indonesia dimulai pada awal abad ke-20, yang umumnya diprakarsai oleh para ulama yang pernah menuntut ilmu di Mekkah, Madinah, dan Mesir, yang pernah berkenalan dan melakukan dialog secara intensif dengan pemikiran modern pendidikan Islam yang terjadi di Timur Tengah dan Mesir.¹ Sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Yunus bahwa modernisasi pendidikan Islam di Indonesia pertama kali dimulai dengan berdirinya `Adabiyah School` pada tahun 1909, yang didirikan oleh seorang ulama yang bernama Haji Abdullah Ahmad (1878-1933). Beliau adalah merupakan sosok ulama modernis yang pernah mengenyam pendidikan Belanda di Padang dan juga sebagai murid Syekh Ahmad Khatib Minangkabau ketika belajar di Mekkah. *Adabiyah School* adalah lembaga pendidikan Islam yang menerapkan sistem kelas, memakai bangku, meja dan papan tulis, mengkombinasikan mata pelajaran agama dan umum, menggunakan metode dan proses pembelajaran seperti yang dilakukan di sekolah-sekolah Belanda.² Akan tetapi, setelah enam tahun berdiri berubah menjadi `HIS Adabiyah`, karena ingin menerima subsidi dari pemerintah Belanda, sehingga harus mempraktikkan model sekolah Belanda. Hal itu menyebabkan kesempatan modernisasi pendidikan

¹ Arif Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad Ke-20*, ke I (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). p. 6-7.

² Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1992). P. 63.

agama sebagaimana ide *`adabiyah School`* semula telah hilang, karena pendidikan agama hanya menjadi suplimen dari pendidikan umum.³

Modernisasi pendidikan Islam model *`Adabiyah School`* yang dilakukan oleh Haji Abdullah Ahmad tersebut berhasil memberikan motivasi dan semangat bagi para ulama lainnya untuk melakukan pembaruan pendidikan Islam di tempatnya masing-masing, khususnya di Sumatera Barat.⁴ Tercatat setelahnya berdiri beberapa lembaga pendidikan Islam modern lainnya, seperti: (1) *`Madras School`* tahun 1910 oleh Syeck M. Umar Thaib di Batusangkar; (2) *`Diniyah School`* tahun 1915 oleh Zainuddin Labai al-Yunusi di Batu Sangkar; (3) *`Al Madrasatuddiniyah`* yang merupakan madrasah khusus puteri yang disebut juga *`Diniyah Puteri`* tahun 1923 oleh Rahmah al-Yunusi di Padang Panjang; dan (4) *`Sumatera Thawalib`* pasca bergabungnya Haji Abdul Karim Amrullah pada tahun 1915 di Minangkabau.⁵

Modernisasi pendidikan Islam di Jawa, jika dilihat dari tahun berdirinya, sebenarnya dapat dinyatakan terjadi lebih awal, namun kiprah ulama dalam pembaharuan di Jawa lebih didominasi oleh para ulama yang tergabung dalam sebuah organisasi. Modernisasi pendidikan Islam yang pertama kali ada di Pulau Jawa dimulai dengan berdirinya lembaga pendidikan Islam modern yang dipelopori oleh organisasi *Jamiah al Khairiyah* pada tahun 1901 di Jakarta. Salah satu upaya yang dilakukan oleh organisasi ini ialah mengembangkan pendidikan Islam modern dalam bentuk madrasah. Lembaga pendidikan Islam ini

³ Karel A Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah (Pendidikan Islam Dan Kurun Moderen)* (Jakarta: LP3ES, 1991). P. 41.

⁴ Arif Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad Ke-20*. p. 6-7.

⁵ Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*. p. 63.

mengimplementasikan sistem pendidikan modern dalam bentuk klasikal, penggunaan buku-buku teks, mengajarkan mata pelajaran non Islam, seperti Berhitung, Sejarah, Geografi, dan Bahasa Inggris.⁶

Selanjutnya modernisasi pendidikan Islam lebih banyak dilakukan oleh para ulama yang bergabung dalam sebuah organisasi, di antaranya: Sarekat Islam (SI) yang didirikan di Solo pada tanggal 11 November 1912,⁷ mereka melakukan kiprahnya dalam membangun pendidikan Islam modern, utamanya ketika berada di periode kedua 1916-1921, yang dimulai pada periode kedua 1916 sampai 1921 yang dapat dikatakan merupakan periode puncak.⁸ KH Akhmad Dahlan dengan organisasi Muhammadiyah mendirikan lembaga pendidikan Islam modern mulai tahun 1912,⁹ yang mengembangkan model pendidikan yang menggabungkan model pendidikan ala Belanda dengan Islam yang diistilahkan dengan “*HIS met de Qur`an*”.¹⁰ Di samping itu Muhammadiyah juga mengembangkan pendidikan Islam dalam bentuk madrasah.¹¹ Di kalangan Nahdatul `Ulama (NU), yang lahir tahun 1920, di samping tetap menjalankan pendidikan Islam yang dijalankan secara tradisonal, juga melakukan modernisasi pendidikannya. Menurut Zamakhsari Dhofier, pesantren NU pertama yang melakukan

⁶ Natalie Mobini-kesheh and East Indies, “The Arab Periodicals of the Netherlands,” *Bijdragen* 152 (1996): 236–56.

⁷ D.G Stibbe, J. Stroomberg, and D.G Stibbe, “Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie” (s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1932).

⁸ Deliar Noor, *Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1942*, ed. 8 (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1996), p. 115.

⁹ Deliar Noor. Bab. 11.

¹⁰ Alfian, *Muhammadiyah : The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization under Dutch Colonialism* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, n.d.). p. 229.

¹¹ Abdurrahman Shaleh, *Penyelenggaraan Madrasah*, (Jakarta; Dharma Bhakti, 1983), h. 15).

modernisasi pendidikannya ialah Pesantren Tebuireng¹², yang berdiri sejak tahun 1899 oleh KH Hasyim Asy`ari, yang kemudian melakukan modernisasi pada tahun 1916, yakni dengan memasukkan sistem madrasah dan memasukan mata pelajaran umum, seperti: Bahasa Indonesia (Melayu), Bahasa Belanda, Sejarah, Ilmu Berhitung, Ilmu Bumi, dan penulisan huruf latin.¹³ Para ulama yang tergabung dalam Persis, yang lahir tahun 1923 di Bandung, sebagai kelompok diskusi kegamaan yang sangat konsern dengan ide-ide pembaharuan Islam yang bersumber dari jurnal-jurnal reformis seperti al-Manar (Kairo) dan al-Munir (Padang), juga telah mendirikan lembaga pendidikan Islam modern.¹⁴

Modernisasi pendidikan Islam yang dilakukan oleh para ulama yang tergabung dalam berbagai organisasi di Jawa tersebut selanjutnya menyebar pula ke berbagai wilayah di luar pulau Jawa, baik oleh oragnisasi yang telah berkembang di Pulau Jawa tersebut, seperti Al-Jamatul Khair, NU, Muhammadiyah, Persis, maupun oleh para ulama yang tergabung dalam organisasi lokal di pulau masing-masing di Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Kalimantan.

¹² Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren : Studi Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. (Jakarta: Pustaka LP3ES., 2011).

¹³ Salahuddin Wahid, *Transformasi Pesantren Teboireng, Menjaga Tradisi DiTengah Tantangan*, 1st ed. (Malang: UIN Maliki Press, 2011). p. 41. 103

¹⁴ Deliar Noer, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1978).



Di Kalimantan Selatan (waktu itu disebut Daerah Banjar)¹⁵ juga telah terjadi upaya modernisasi pendidikan Islam, yang juga berlangsung

¹⁵ Sebelum Kalimantan bergabung dengan Republik Indonesia tanggal 29 Desember 1949 (ketika Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dan menyerahkan Daerah Kalimantan yang meliputi: 1. Daerah Banjar. 2. Daerah Dayak Besar. 3. Daerah Federasi Kalimantan Tenggara. 4. Daerah Federasi Kalimantan Timur, 5. Daerah Kota Waringin,, dan 6. Daerah Federasi Kalimantan Barat. Daerah Banjar pada waktu itu terdiri dari seluruh daerah yang ada di Kalimantan selatan Selatan sekarang minus Tanah Laut, Tanah bumbu, dan Kota Baru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 sebagian besar daerah sebelah barat dan utara dipisahkan dan berdiri sendiri sebagai Propinsi Kalimantan Tengah. Sedang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 memisahkan bagian utara dari daerah Kabupaten Kotabaru dan memasukkan wilayah itu ke dalam kekuasaan Propinsi Kalimantan Timur. M. Idwar Saleh, dkk, *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*; Sutrisno Kutoyo, *Penelitian Sejarah Dan Budaya, Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Daerah*. (Banjarmasin: Kantor Wilayah, Bidang Kesenian, Bidang Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan, Departemen P dan K Propinsi Kalimantan Selatan., 1978).

sejak awal abad ke-20. Modernisasi pendidikan Islam tersebut juga dilakukan oleh para ulama, baik secara perorangan maupun organisasi. Secara historis dapat dicatat sebagai berikut:

- (1) Modernisasi pendidikan Islam oleh orang-orang Arab yang tergabung dalam organisasi *Musaadatul Ikhwan* yang bermukim di Banjarmasin dengan mendirikan *Madrasah Diniyah al-Khairiyah al-Islamiyah* yang beralamat di Jalan Sulawesi Banjarmasin pada tahun 1903. Lembaga pendidikan Islam ini dimulai dalam bentuk halakah (kaji duduk) yang kemudian dimodernisasi pada 1910 dengan menerapkan sistem sekolah dan mengajarkan sedikit pengetahuan umum yang diajarkan dengan menggunakan kitab berbahasa Arab.¹⁶
- (2) Modernisasi pendidikan Islam oleh organisasi Syarikat Islam (SI) dilakukan oleh Tuan Guru Haji Jamaluddin yang merupakan pengurus SI, yakni dengan mendirikan *Madrasah al-Imad fi Ta'lim al-Anlad* yang menerapkan sistem sekolah pada tanggal 14 Juli 1914 di Martapura, yang selanjutnya dikenal dengan Madrasah Darussalam hingga sekarang;¹⁷
- (3) Modernisasi pendidikan Islam oleh organisasi Muhammadiyah dilakukan sejak kehadiran organisasi ini di Alabio tahun 1922, yakni dengan mendirikan sejumlah lembaga pendidikan Islam yang modern dengan nama *Standart School* yang kemudian berubah nama menjadi *Vervolgschool met den Qur'an* dan kemudian dilanjutkan

¹⁶ Ramli Nawawi. dkk., *Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Selatan*, ed. Ramli Nawawi (Banjarmasin: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya, 1992). p. 86-89.

¹⁷ Tim Penulis, *Satu Abad Pondok Pesantren Darussalam*, (Martapura: ttp, 2014), h. 53.

dengan pendirian sekolah tingkat lanjutannya, yaitu *Wostha School* di tahun 1928¹⁸. Selain itu, Muhammadiyah juga mendirikan HIS Muhammadiyah di Jalan Kalimantan dan di Jalan Pasar Lama Banjarmasin) yang berdiri tahun 1935;¹⁹

- (4) Modernisasi pendidikan Islam oleh Tuan Guru Haji Abdul Rasyid di Amuntai dimulai tahun 1928 dengan nama ”*Arabisch School* (Sekolah Arab)”, yang selanjutnya diikuti pendiriannya oleh murid-murid beliau di berbagai tempat.²⁰
- (5) Modernisasi pendidikan Islam oleh Organisasi *Musyawatutthalibin* yang berdiri sejak tahun 1931 dengan mendirikan sejumlah madrasah, baik tingkat *ula* maupun *wostha*, yang tersebar bukan saja di Daerah Banjar dan di daerah luar Daerah Banjar yang terdapat cabang *Musyawatutthalibin* dengan mengambil nama madrasah dan lainnya, bukan saja di Daerah Banjar tetapi menyebar di berbagai cabang *Musyawatutthalibin*.²¹
- (6) Modernisasi pendidikan Islam oleh H. Mukhtar dan H. Muhammad As'ad yang tergabung dalam organisasi Persatuan

¹⁸ *Standart School/Vervolgschool met den Qur'an* dan *Wostha School* adalah sekolah setingkat madrasah ibtidaiyah dan tsanawiyah dengan mata pelajaran agama sebagai dasar dan ditambah dengan pengetahuan umum. Ramli Nawawi. dkk., *Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Selatan*. p. 58.

¹⁹ Wajidi, *Nasionalisme Indonesia Di Kalimantan Selatan 1901-1942* (Banjarmasin: Pustaka Banua, 2007). p. 134.

²⁰M. Ali Sibram Malisi, “Modernization of Islamic Education in South Kalimantan (Socio-Historical Perspective of Normal Islam Amuntai),” *Ijtima’iyya: Journal of Muslim Society Research* 2, no. 1 (2017): 43–66, <https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v2i1.1051>. p. 10.

²¹ M.Nur Maksum, “Musyawaratutthalibin , Organisasi Islam Lokal Terbesar Di Kalimantan Selatan,” *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 2 (2010): 203–28.

Perguruan Islam (PPI) mendirikan beberapa buah Madrasah dengan sistem sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;²²

Modernisasi dan pendirian pendidikan Islam modern tersebut terhenti ketika Jepang berkuasa, bahkan banyak lembaga pendidikan Islam yang terpaksa bubar, karena semua kegiatan pendidikan dikendalikan dan dikontrol oleh Pemerintah pendudukan Jepang, sejalan dengan pelarangan aktivitas organisasi-organisasi Islam yang merupakan penggerak modernisasi pendidikan Islam tersebut.²³ Pada sekolah-sekolah tidak diperkenankan memberikan pelajaran Agama Islam. Murid-murid sekolah hanya diizinkan untuk mendapatkan pelajaran Agama Islam yang diberikan di luar sekolah, seperti yang diberikan oleh para ulama dengan sistem pembelajaran tradisional.²⁴

Modernisasi dan pendirian lembaga pendidikan Islam di Daerah Banjar baru ada kembali ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya atau yang sering disebut dengan era revolusi (1945-1949).²⁵ Akan tetapi karena situasi revolusi maka lembaga pendidikan Islam yang melakukan modernisasi dan tumbuh pada saat itu sangat sedikit, bahkan satu-satunya yang pernah tercatat dan masih eksis sampai sekarang ialah berdirinya lembaga pendidikan Islam modern yang diberi nama “Sekolah Menengah Islam Pertama” yang kemudian

²² LP2M UIN Antasari dan MUI Propinsi Kalimantan Selatan Tim, *Ulama Banjar Dari Masa Ke Masa*, ed. Dkk. Dr. Wardani, *Antasari Press*, III (Banjarmasin: Antasari Press, 2018), p. 130-134.

²³ Idwar Saleh, dkk, *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan.*, p. 94.

²⁴ Idwar Saleh, dkk., p. 101.

²⁵ Kevin W. Fogg menyebut era tahun 1945-1949 ini dengan “revolusi Indonesia”, yaitu era perjuangan bangsa Indonesia untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamlirkan tanggal 17 Agustus 1945 yang ditolak oleh Belanda dan upaya kembalinya Belanda yang didukung oleh sekutunya menguasai Indonesia. Kevin W. Fogg, *Spirit Islam Pada Masa Revolusi Indonesia*, I (Jakarta: Noura Books PT Mizan Publika, 2020)., p. 20.

diberi nama SMIP-1946, yang berdiri pada tanggal 15 Oktober 1946 M./20 Dzul Qa`dah 1365 H di Banjarmasin.²⁶

Sehubungan dengan hal itu, maka kajian terhadap lembaga pendidikan Islam model SMIP-1946 yang lahir pada era revolusi ini sangat penting untuk dilakukan. Setidaknya ada lima alasan pokok yang menjadikan kajian ini dianggap penting:

Pertama, Kajian terhadap lembaga pendidikan Islam modern yang lahir pada masa revolusi atau pada masa perjuangan mempertahankan Kalimantan dari upaya pendudukan kembali Pemerintah Kolonial Belanda melalui *Nederlandsch Indische Civiele Administratie* (NICA)²⁷ di Kalimantan (1945-1949). Pada masa itu rakyat Daerah Banjar sedang mengerahkan segenap upaya untuk melakukan perjuangan mempertahankan kemerdekaannya, baik melalui perjuangan bersenjata maupun melalui perjuangan politik atau melalui jalur perjuangan fisik dan pemikiran yang banyak sekali melibatkan umat Islam.²⁸

Kedua, kajian secara khusus terhadap kehadiran modernisasi pendidikan Islam model SMIP-1946, sebagai sebuah bentuk modernisasi

²⁶ Sekolah ini pada awalnya diberi nama SMIP saja, kemudian ketika didirikan pula SMIP lain di Banjarmasin, namanya menjadi SMIP I Sungai Jingah. Selanjutnya pada ulang tahun SMIP ke 37 dikukuhkan namanya menjadi SMIP-1946. Tim Penyusun, *Lima Puluh Tahun "SMIP-1946* (Banjarmasin: Panitia HUT "SMIP-1946" Ke-50, 1996), p. 4 dan 18.

²⁷ Pada tanggal 17 September 1945 mendaratlah tentara Australia atas nama Sekutu, di Banjarmasin. Bersamaan dengan tentara Australia ini turutlah sejumlah orang-orang Belanda yang tergabung dalam suatu organisasi yang bernama Nica (*Netherland Indie Civil Administration*), Pemimpinnya adalah Mayor A. L. van Assendrop. NICA inilah yang mewakili Pemerintah Kolonial Belanda yang berupaya untuk menguasai Kalimantan. Idwar Saleh dkk, menyebut masa revolusi dengan masa., Idwar, dkk., *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan.*, p. 112.

²⁸ Idwar. p. 109-124.

lembaga pendidikan Islam di Daerah Banjar masih sangat minim dan bahkan di beberapa kajian sejarah juga seperti tidak menyenitkannya, seperti pada buku hasil penelitian ditulis oleh Ramli Nawawi, dkk dengan judul “Sejarah Pendidikan daerah Kalimantan Selatan”, Idwar Saleh, dkk dalam Sejarah Daerah Kalimantan Selatan. Kajian yang pernah ada hanya dalam bentuk beberapa skripsi mahasiswa yang tidak begitu dalam;

Ketiga, kajian terhadap latar belakang pemikiran dan model gagasan modernisasi lembaga pendidikan Islam yang mengambil bentuk dan nama “sekolah Islam” dengan muatan inti seimbang antara pengetahuan umum dan agama 50% pelajaran agama dan 50% pelajaran umum), yang digagas oleh para ulama di tengah masyarakat Banjar, yang saat itu masih kental dengan pentingnya pendidikan agama atau memandang pengetahuan agamalah yang lebih penting daripada pengetahuan umum, juga menjadi alasan penting untuk mengkaji gagasan pendirian lembaga pendidikan Islam model SMIP-1946 ini;

Keempat, Pendirian SMIP-1946 ini melibatkan sejumlah ulama yang beragam sebagai penggagas utamanya, utamanya yang tergabung dalam organisasi Persatuan Guru Sekolah Islam (PGSI) dan sejumlah tokoh masyarakat Banjar yang memiliki latar belakang organisasi keagamaan dan profesi yang beragam, seperti eks aktivis Musyawaratuthalibin (H. Muhammad Hanafie Gobit), SERMI (Khatib Syarbaini Yasir), H. Hasan Mugeni Marwan (Pengurus NU). Haji Muhamad Yasin Amin dan H.M. Hasan Baseri (Muhammadiyah), dan beberapa ulama dan guru agama non partisan lainnya.

Kelima, model lembaga pendidikan Islam yang digagas dengan model SMIP-1946 ini sempat menjadi percontohan bagi masyarakat lain

dalam mendirikan model pendidikan. Tercatat sesudahnya ada beberapa lembaga pendidikan Islam yang menggunakan nama yang sama yaitu SMIP, yaitu: 1) SMIP Mandingin Barabai yang beridiri tahun 1948. Akan tetapi sekolah ini tidak dapat berlangsung lama karena meningkatnya revolusi fisik, sehingga pengajian dan sekolah itu ditutup;²⁹ 2) SMIP II Kebun Bungan yang berdiri tahun yang didirikan tahun 1965 (Sekolah ini masih berdiri sampai sekarang, namun berubah nama menjadi M.T's Kebun Bunga Banjarmasin)³⁰; dan 3) SMIP II Pangeran Antasari yang berdiri tahun 1970 (sekolah ini masih berdiri sampai sekarang dengan mana yang sama).³¹ Hal ini tentu menjadi menarik untuk diteliti terkait gagasan apa yang ada pada pendirian SMIP-1946 ini sehingga menjadi salah satu model pendidikan Islam pada saat itu dan sesudahnya.

B. Fokus Pembahasan

Sebagaimana judul buku ini, yaitu “Modernisasi Pendidikan Islam pada Era Revolusi (1945-1949) di Daerah Banjar (Gagasan Modernisasi Pendidikan Islam Model SMIP-1946)”, maka yang menjadi fokus pembahasan pada buku ini adalah kajian atas berbagai hal yang terkait dengan gagasan pendirian lembaga pendidikan Islam SMIP-1946, sebagai sebuah model modernisasi pendidikan Islam yang berdiri pada era revolusi di Daerah Banjar. Kajian terhadap gagasan tersebut didasarkan pada gagasan modernisasi pendidikan Islam yang terdapat dalam pendirian lembaga pendidikan Islam SMIP-1946, khususnya

²⁹ Tim, *Ulama Banjar Dari Masa Ke Masa*, p. 167.

³⁰ Dokumen MT's Kebun Bungan Banjarmasin.

³¹ Wawancara dengan Pimpinan dan Pengelola SMIP III Pangeran Antasari, tanggal 25 Juni 1922.

gagasan yang berkembang pada saat pendiriannya dan ketika lembaga pendidikan ini didirikan hingga terjadi perubahan mengikuti regulasi pendidikan Islam oleh Pemerintah.

Kajian tersebut meliputi: 1) Latar belakang lahirnya gagasan pendirian lembaga pendidikan Islam model SMIP-1946; 2) Profil SMIP-1946 dan ulama atau guru agama Islam para penggagas pendirian lembaga pendidikan modern model SMIP-1946; 3) Sejarah, Latar belakang dan Motivasi lahirnya gagasan-gagasan yang terdapat dalam modernisasi pendidikan Islam model SMIP-1946; 4) Gagasan-gagasan modernisasi lembaga pendidikan Islam model SMIP-1946, yang meliputi pemilihan nama sekolah, visi dan misi SMIP-1946 serta tujuan pendirian SMIP-1946, dan gagasan terkait dengan kurikulum yang dikembangkan oleh SMIP-1946. Selain itu bahasan ini juga mencoba mengemukakan hasil analisis reflektif berupa konstruksi teoritik dari gagasan pendirian pendidik Islam modern model SMIP-1946 tersebut.

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan fokus pembahasan di atas, maka tujuan penulisan buku ini secara umum untuk memberikan deskripsi analisis tentang modernisasi lembaga pendidikan Islam yang terjadi pada era revolusi (1945-1949) di daerah Banjar atau Kalimantan Selatan. Secara khusus buku ditujukan untuk mendeskripsikan:

1. Sejarah latar belakang lahirnya upaya modernisasi lembaga pendidikan Islam pada era revolusi di daerah Banjar yang diwakili oleh pendirian lembaga pendidikan Islam model SMIP-1946 sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam modern yang didirikan pada era tersebut (1946).

2. Mendeskripsikan profil ulama yang menjadi penggagas pendirian sekolah menengah Islam Model “SMIP-1946 dan keterkaitannya dengan gagasan lahirnya modernisasi pendidikan Islam model SMIP-1946.
3. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan sejumlah gagasan modernisasi pendirian lembaga pendidikan Islam Model “SMIP-1946.
4. Mendeskripsikan hasil refleksi konstruksi teoritik atas gagasan modernisasi pendidikan Islam Model “SMIP-1946.

D. Metode dan Sumber Penulisan

Sesuai dengan apa yang menjadi tema dan fokus pembahasan dari buku ini, yakni membahas tentang modernisasi lembaga pendidikan Islam pada era revolusi (1945-1949) di daerah Banjar, dengan fokus kajian model lembaga pendidikan Islam SMIP-1946, maka metode kajian yang dipakai dalam menghasilkan pembahasan dalam buku ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian sejarah.

Gottschalk (1975: 32) menyebut penelitian sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.³² Sedangkan metode penelitian sejarah menurut Garraghan (1957: 33) adalah sebagai “seperangkat prinsip dan aturan yang sistematis yang dimaksudkan untuk membantu dalam pengumpulan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis, dan menyajikan suatu sintesis (umumnya dalam bentuk tertulis) hasil yang dicapai”.³³

³² Louis Gottschalk, *Understanding History: A Primer of Historical Method*, Terjemahan Nugrobo Notosusanto (*Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah*), Second edi (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1975).

³³ Gilbert Josephraghan Gar, *A Guide to Historical Method*, ed. Jean Delanglez (Michigan: he University of Michigan, 1957)., p. 33.

Terkait dengan itu, Helius Sjamsuddin (2007: 89) membagi langkah-langkah penelitian sejarah menjadi enam tahapan, yaitu : 1. Memilih suatu topik yang sesuai; 2. Mengusut semua evidensi (bukti) yang relevan dengan topik; 3. Membuat catatan tentang itu apa saja yang dianggap penting dan relevan dengan topik yang ditemukan ketika penelitian sedang berlangsung; 4. Mengevaluasi secara kritis semua evidensi yang telah dikumpulkan (kritik sumber); 5. Menyusun hasil-hasil penelitian (catatan-catatan fakta) ke dalam suatu pola yang benar dan berarti yaitu sistematika tertentu yang telah disiapkan sebelumnya; 6. Menyajikannya dalam suatu cara yang dapat menarik perhatian dan mengkomunikasinya kepada para pembaca sehingga dapat dimengerti se jelas mungkin.³⁴

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan buku ini lebih mengandalkan khazanah literatur dan dokumenter yang kemudian diperkuat dengan wawancara kepada berbagai pihak terkait, seperti yakni para alumni SMIP-1946 dan pengurus Yayasan SMIP-1946 dan Kepala Sekolah. Literatur yang banyak dipakai dalam penulisan ini adalah berupa bahan tertulis yang berkaitan dengan penelitian terdahulu, berupa dokumen, buku-buku, jurnal baik online maupun yang berbentuk hard copy serta sumber dari internet yang relevan dengan kajian untuk penulisan buku ini. Beberapa buku penting yang banyak menjadi rujukan dalam penulisan ini ialah: 1) Sejarah SMIP-1946 oleh Drs. H.M. Asy`ari; 2) Tim Penyusun *Lima Puluh Tahun "SMIP-1946"*; 3) Ramli Nawawi. dkk. *Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Selatan*; 4) Idwar, Saleh. M. *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*;

³⁴ Helius Syamsuddin, *Metodologi Sejarah*, 2nd ed. (Yogyakarta: Ombak, 2007)., p. 87.

5) Tim, LP2M UIN Antasari dan MUI Propinsi Kalimantan Selatan. *Ulama Banjar Dari Masa Ke Masa*. Di samping itu, juga tidak kalah pentingnya adalah berbagai tulisan dalam bentuk naskah jurnal dan buku-buku tentang sejarah Banjar dan pendidikan Islam di Indonesia.

E. Perspektif Teoritik dan Histografis.

1. Perspektif Teoritik

Istilah modern atau modernisasi mempunyai berbagai arti dan maksud. Istilah modern ini digunakan tidak hanya untuk orang-orang, tetapi juga untuk bangsa, sistem politik, ekonomi, lembaga seperti lembaga pendidikan dll. Pada umumnya kata modern digunakan untuk menunjukkan terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik, lebih maju dalam arti lebih menyenangkan, lebih meningkatkan kesejahteraan hidup.³⁵ Menurut Harun Nasution, istilah modern, modernisasi dan modernisme sejatinya adalah istilah yang semula dipakai dalam masyarakat Barat yang mengandung arti fikiran, aliran, gerakan dan usaha untuk merubah faham-faham, adat-adat, institusi-institusi lama, dan sebagainya, untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.³⁶ Ketika pikiran dan aliran modernisme ini memasuki wilayah agama di Barat, maka terjadilah pergumulan antara ajaran-ajaran agama Katolik dan Protestan dengan ilmu pengetahuan dan falsafat modern. Aliran ini akhirnya membawa kepada timbulnya sekularisme di masyarakat Barat.

³⁵ Ibrahim, *Inovasi Pendidikan (Pengantar Untuk Memahami Apa Dan Bagaimana Difusi Dan Implementasi Inovasi Pendidikan)* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, 1988)., p. 42.

³⁶ Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran Dan Gerakan*, cetakan 9 (Jakarta: Bulan Bintang, 1992)., p. 11.

Adapun ketika ilmu pengetahuan dan teknologi modern Barat memasuki dunia Islam, muncul pemikiran dan gerakan untuk menyesuaikan faham-faham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern tersebut, yang melahirkan pemikiran modern di dalam Islam.³⁷ Upaya modernisasi dalam Islam tersebut pertama kali terbuka ketika ekspedisi Napoleon dalam penaklukan Mesir dengan menyertakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Barat. Kemajuan Barat itulah yang menginsafkan dunia Islam akan kelemahan di dunia Islam saat itu di dibandingkan Barat. Untuk itu para penguasa dan pemuka-pemuka Islam mulai berfikir dan mencari jalan untuk mengembalikan *balance of power*, yang telah pincang dan membahayakan Islam. Dari situlah timbulnya apa yang disebut pemikiran pembaharuan atau modernisasi dalam Islam.³⁸

Upaya modernisasi dalam Islam yang pertama kali dilakukan adalah melalui dunia pendidikan, yakni dengan melakukan pembaharuan pendidikan Islam yang dianggap telah ketinggalan dari pendidikan Barat. Modernisasi ini pertama kali dimotori oleh Muhammad Ali sebagai penguasa (Pasya) di Mesir. Ia sangat tertarik dengan unsur-unsur baru dari Barat yang dibawa dalam ekspedisi Napoleon tersebut. Untuk itu yang pertama sekali dilakukannya ialah mendirikan “Kementerian Pendidikan” yang dapat membantunya mewujudkan pembaharuan di bidang pendidikan dan lainnya. Melalui kementerian pendidikan ini Ia membuat program pendirian sekolah-sekolah model Barat, mendatangkan guru dari Barat, mengirim pelajar ke Italia, Prancis,

³⁷ Nasution., p. 11-12.

³⁸ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*. (Jakarta: Indonesia Press, Jilid I, 1985)., p. 88-89.

Inggris dan Austria, dan melakukan gerakan penterjemahan buku-buku Barat.³⁹

Modernisasi pendidikan Islam di Indonesia sejatinya tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh modernisasi pendidikan Barat (baca model pendidikan Belanda) tetapi lebih banyak dipengaruhi dan diprakarsai oleh para pelajar (ulama) yang pernah menuntut ilmu di Mekkah, Madinah, dan Mesir, yang telah perkenalan dan melakukan dialog intensif dengan pemikiran modern dalam Islam yang telah terjadi di Timur Tengah dan Mesir, pada awal abad ke-20.⁴⁰ Dengan kata lain modernisasi yang dilakukan dalam pendidikan Islam di Indonesia terdapat unsur-unsur modernisasi yang diadopsi dari pemikiran modern Islam yang pernah ada sebelum kemajuan pendidikan Barat, yakni model pendidikan yang pernah dilakukan ketika masa kemajuan Islam di era klasik. Hal itulah yang disebut *tajdid*, yang oleh Yusuf Qardhawi diartikan sebagai Sedangkan menurut Yusuf Qurdhawi⁶ *tajdid* diartikan “pembaruan atau modernisasi” yakni upaya mengembalikan pemahaman agama kepada kondisi semula sebagaimana masa nabi, namun bukan berarti harus persis seperti terjadi waktu itu, melainkan melahirkan keputusan dan praktik yang sejalan dengan maksud syar’i dengan membersihkan dari unsur-unsur bid’ah, khufarat atau pikiran-pikiran asing.⁴¹ Selin itu, modernisasi yang menjadi rujukan para ulama juga apa yang pernah dikonsepsikan dan dipraktikkan pada masa kemajuan peradaban Islam, Sebagaimana ditulis oleh Mehdi Nakosten, bahwa pada masa kemajuan peradaban Islam tersebut, khususnya pada

³⁹ Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran Dan Gerakan.*, p. 34-41.

⁴⁰ Arif Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad Ke-20.*, p. 6-7.

⁴¹ Yusuf Qardhawi, *Dasar Pemikiran Hukum Islam: Taqlid Ijtihad* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), p. 96.

masa pemerintahan al-Ma`mun (813-833 M), lembaga-lembaga pendidikan Islam telah memiliki kurikulum yang memuat sejumlah ilmu pengetahuan atau mengajarkan: Matematika (Aljabar, Trigonometri dan Geometri); Sains (Kimia, Fisika dan Astronomi); Ilmu Kedokteran (Anatomi, Pembedahan, Farmasi, dan cabang-cabang ilmu kedokteran khusus); Filasafat (Logika, Etika dan Metafisika); Kesusastraan (Filologi, Tata Bahasa, Puisi dan Ilmu Persajakan) ilmu-ilmu sosial (Sejarah, Geografi, disiplin-disiplin yang berhubungan dengan politik, Hukum, Sosiologi, Psikologi dan Jurisprudensi (Fikih), Teologi (Perbandingan Agama, Sejarah Agama, Studi al-Quran, tradisi religius (Hadis) dan topik-topik religius lainnya).⁴²

Sama halnya dengan modernisasi pendidikan Islam yang terjadi di Daerah Banjar, tentu tidak sepenuhnya dipengaruhi dan mengadopsi modernisasi pendidikan yang ada pada lembaga pendidikan Barat (baca pemerintah Kolonial Belanda), tetapi juga banyak dipengaruhi langsung oleh modernisasi yang terjadi di Timur Tengah dan Mesir yang dibawa oleh para ulama yang pernah belajar di sana, juga modernisasi yang telah dilakukan oleh modernisasi pendidikan Islam yang telah dilakukan di daerah lain di Indonesia, seperti di Sumatera Barat dan Jawa yang terlebih dahulu melakukan pembaharuan pendidikannya. Pemikiran dan pendapat para ulama juga merupakan salah satu bagian yang sangat menentukan model modernisasi pendidikan Islam yang dilakukan, yang tidak selalu mengekor pada pendapat orang lain. Hal itu dikarenakan peran ulama yang sangat kuat di masyarakat. Ulama atau Kyai dalam masyarakat berperan sebagai tokoh agama yang meliputi

⁴² *Nakostin, Mehdi. History of Islam Origins of Western Education A.D. 800-1350 with an Introduction to Medieval Muslim Education.* (Boulder, Colorado: The University of Colorado Press, 1964), p. 71.

peran spiritual, pendidikan, *agent of change*, dan sosial budaya serta berperan sebagai figure yang terlibat dalam politik baik sebagai partisipan, pendukung maupun aktor.⁴³ Kepatuhan masyarakat tradisional kepada sosok Kyai pada akhirnya akan membentuk sistem sentralistik dimana Kyai sebagai pemimpinnya, sehingga perubahan yang terjadi pada masyarakat tradisional bisa dipastikan akan sejalan atau searah dengan jalan pikiran dari Kyai itu sendiri yaitu jika Kyai menghendaki masyarakatnya statis, maka pola di masyarakat tradisional juga cenderung statis dan begitu pula sebaliknya.⁴⁴

Hal lain yang perlu dilihat dalam upaya modernisasi ialah, bahwa modernisasi menghendaki adanya hal baru atau pembaharuan (inovasi). Inovasi, sebagaimana didefinisikan oleh Ibrahim (1988) adalah suatu ide, barang, kejadian, metode, yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang (masyarakat), baik itu berupa hasil invensi maupun diskoveri. Inovasi tersebut diadakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Invensi (*invention*) adalah suatu penemuan yang benar-benar baru atau sebelumnya belum ada yang kemudian diadakan dengan hasil kreasi baru. Sedangkan diskoveri (*discovery*) adalah suatu penemuan yang sebenarnya sudah ada tetapi belum diketahui orang.⁴⁵ Sehubungan dengan itu, modernisasi pendidikan Islam dapat saja berupa invensi atau deskoveri.

⁴³ Endang Turmudi, *Perselingkahan Kiai Dan Kekuasaan*, Cet. 1 (Yogyakarta: LKiS, 2004), p. 96.

⁴⁴ Robby Darwis Nasution, "Kyai as a Agent of Change and Peacemaker in the Traditional Society," *Sosiohumaniora*, 19, no. 2 (2017): 182., p.183.

⁴⁵ Ibrahim, *Inovasi Pendidikan (Pengantar Untuk Memahami Apa Dan Bagaimana Difusi Dan Implementasi Inovasi Pendidikan)*, p. 40.

Dalam konteks modernisasi pendidikan Islam, terdapat berbagai model atau pola modernisasi, yang sekurang-kurangnya dapat dikelompokkan pada enam pola, yaitu:

- 1) Model Madrasah yang mengadopsi sistem sekolah, namun isi pendidikan (kurikulum) serratus persen bersisi ilmu agama;
- 2) Model Madrasah yang disuplimen pengetahuan umum, yakni modernisasi yang mengadopsi sistem sekolah dan memberikan pelajaran umum modern di samping mata pelajaran agama, namun mata pelajaran umum hanya sebagai suplimen saja, dengan forsi sekitar 70% ilmu agama dan 30% ilmu umum;
- 3) Model Madrasah dualistik, yakni model madrasah yang mengadopsi sistem sekolah dan memberikan ilmu pengetahuan umum dan agama secara seimbang (50%:50%);
- 4) Model Madrasah yang mengadopsi sistem sekolah dan secara total memasukkan seluruh mata pelajaran umum yang diajarkan di sekolah umum, sehingga kurikulumnya berbanding 70% ilmu umum dan 30% ilmu agama, seperti madrasah pasca diterapkannya SKB 3 Menteri tahun 1975;
- 5) Model Sekolah Islam, yakni yang menerapkan secara total sistem sekolah umum dan menyajikan seluruh ilmu pengetahuan umum yang diajarkan disekolah dan ilmu pengetahuan agama yang diajarkan di madrasah (100% ilmu agama dan 100% ilmu pengetahuan umum);
- 6) Model Sekolah Islam, yakni yang menerapkan secara total sistem sekolah umum dan menyajikan seluruh ilmu pengetahuan umum

seperti yang diajarkan di sekolah yang diintegrasikan dengan ajaran dan nilai-nilai Islam ke dalamnya (integrasi saintek dan imtaq).

Model modernisasi pendidikan Islam dengan berbagai pola tersebut di atas pada umumnya dimotori oleh para ulama, sesuai dengan ideologi yang mereka anut. Jawad Ridha mengelompokkan ideologi pendidikan Islam pada era keemasan tersebut dalam tiga kelompok ideologi, yaitu Religius Konservatif, Religius Rasional, Pragmatis Instrumental. Karakteristik utama ideologi religious konservatif ialah orientasi pendidikannya yang merangarh dan didominasi oleh masalah duniyah (keagamaan). Pada aliran ideologi religious rasional terlihat pada kesungguhannya dalam upaya mempertemukan kepentingan keagamaan dan keduniwian. Adapun aliran ideologi religious pragmatis dicirikan pada upaya menjadikan pendidikan untuk menjawab berbagai tantangan dan kebutuhan kehidupan nyata.⁴⁶

2. Perspektif Histografis

Kajian tentang sejarah pendidikan Islam pada era reformasi di Daeha Banjar dapat dinyatakan masih sangat kurang, khususnya kajian tentang sejarah pendidikan Islam di Daerah Banjar di era Revolusi atau era NICA. Kajian terdahulu yang pernah ada misalnya apa yang ditulis dalam buku “Sejarah Pendidikan Kalimantan Selatan” yang ditulis Ramli Nawawi, dkk. Buku ini lebih banyak berbicara tentang catatan perkembangan pendidikan di era sebelum, masa penjajahan Belanda, era pendudukan Jepang dan sedikit pendidikan pada era revolusi (NICA). Hanya saja pembicaraan tentang perkembangan pendidikan di era

⁴⁶ Muhammad Jawwad Ridha, *Al Fikr Al Tarbawi Al-Islami Muqaddamah Fi Ushulih Al-Ijtima'iyah Wa Al-'aqlaniyah* (T.Tp: Dar al Fikr al-Arabi, n.d.).

Revolusi (1945-1999) informasinya sangat minim. Hal itu mungkin disebabkan oleh singkatnya era ini dan memang sejatinya tidak banyak perkembangan lembaga pendidikan di era ini.

Khusus untuk kajian tentang SMIP-1946 juga ada disinggung sepintas dalam buku “Sejarah Pendidikan Kalimantan Selatan” yang ditulis Ramli Nawawi, dkk tersebut. Hanya saja apa pembicaraan tentang keberadaan SMIP 1946 yang disajikan ditulis dalam buku tersebut disajikan dalam sebuah tulisan yang kurang lebih satu halaman. Oleh karena itu informasinya dirasa sangat sempit.

Selain buku tersebut, terdapat beberapa penelitian dalam bentuk skripsi. Hanya saja sayangnya kajian-kajian yang dilakukan terkesan dangkal dan hanya seputar masalah pendidikan Islam dan manajemen SMIP-1946 yang ada sekarang. Tesis yang ditulis oleh Husna sesuai dengan judulnya: “Kontribusi Keluarga Besar KH. Hanafie Gobit dalam Mengembangkan Pendidikan Islam di Kota Banjarmasin (Studi Tentang Penguatan Pendidikan Agama Islam pada SMIP 1946, Pondok Pesantren Hunafaa dan STAI Al Jami Banjarmasin),” hanya membahas kontribusi salah seorang pendirinya, yaitu KH. Hanafie Gobit dalam pengembangan pendidikan Islam di Banjarmasin, tidak membahas tentang gagasan pembaharuan pendidikan Islam dalam rangka pendirian SMIP-1946 secara khusus dan mendalam.⁴⁷

⁴⁷ Husna, “Kontribusi Keluarga Besar Kh. Hanafie Gobit Dalam Mengembangkan Pendidikan Islam Di Kota Banjarmasin (Studi Tentang Penguatan Pendidikan Agama Islam Pada Smip 1946, Pondok Pesantren Hunafaa Dan Stai Al Jami Banjarmasin)” (Universitas Islam Negeri Antasari Program Pasca Sarjana Prodi Pai Banjarmasin, 2020).

BAB II

PROFIL SMIP-1946 DAN ULAMA PENGGAGAS MODERNISASI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM MODEL SMIP-1946

A. Profil SMIP-1946 Banjarmasin.

SMIP-1946 pada awalnya Beridrinya diberi nama SMIP saja. Kemudian berubah namanya menjadi SMIP I Sungai Jindah, ketika berdiri SMIP lain di Banjarmasin, yaitu SMPI II Kebun Bungan dan SMIP III Sungai Baru. Perubahan nama SMIP menjadi SMIP-1946 terjadi ketika terjadinya perubahan nama yayasan pengelola SMIP yang sebelumnya bernama `Yayasan Kesejahteraan Madrasah Menengah Islam` menjadi `Yayasan Pendidikan Islam SMIP-1946 Banjarmasin`, berdasarkan Akte Notaris No 40 tahun 1983.⁴⁸ Berdasarkan hal itu, maka nama SMIP mengikuti nama Yayasan, sehingga menjadi SMIP-1946.



⁴⁸ Penyusun, *Lima Puluh Tahun "SMIP-1946.*, p. 16-18.

SMIP sejak berdirinya tahun 1946 hingga dipecah menjadi SMP SMIP-1946 dan Madrasah Tsanawiyah SMIP-1946 pada tahun 1987 dikelola secara mandiri oleh Yayasan yang menaunginya dengan kurikulum yang dirancang sendiri. Pada awal beridinya tahun 1946 hingga tahun 1950, SMIP merupakan sebuah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Islam tingkat menengah pertama, dengan lama belajar selama 5 tahun, yang kemudian pada tahun 1952 berubah menjadi 4 tahun.⁴⁹ Perubahan lama belajar tersebut sebagai upaya untuk mengikuti kebijakan pemerintah berdasarkan Undang-undang tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, Nomor 4 Tahun 1950 dan kebijakan Departemen Agama RI. Departemen Agama pada saat itu melahirkan beberapa kebijakan terkait dengan sekolah menengah, yang antara lain:

- A. Madrasah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan dapat diakui oleh negara secara formal, sebagaimana pada pasal 10, madrasah harus memberikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok paling sedikit 6 jam seminggu secara teratur disamping pelajaran umum.
- B. Dengan terpenuhinya persyaratan tersebut, Departemen Agama mengadakan pendaftaran madrasah yang memenuhi syarat.
- C. Jenjang pendidikan pada sistem madrasah pada masa itu terdiri dari tiga jenjang.
 - a) Madrasah Ibtidaiyah dengan lama pendidikan 6 tahun
 - b) Madrasah Tsanawiyah Pertama untuk 4 tahun
 - c) Madrasah Tsanawiyah Atas untuk 4 Tahun.
- D. Sedangkan kurikulum madrasah terdiri dari sepertiga pelajaran

⁴⁹ Penyusun., p. 15.

agama dan sisanya pelajaran umum.⁵⁰

Kebijakan pengelola SMIP menyesuaikan masa belajar tersebut didasari juga atas pertimbangan agar lulusan SMIP dapat mengikuti ujian persamaan dengan SMP atau Madrasah Tsanawiyah dan juga Pendidikan Guru Agama Islam (PGAI).⁵¹ Sebagaimana kebijakan dan yang dilakukan oleh Departemen Agama RI, pada tahun 1950 telah didirikan sejumlah Sekolah Guru Agama Islam (SGAI) dengan dua jenis/jenjang, yaitu: 1) Jenjang jangka panjang yang ditempuh selama 5 tahun, yang diperuntukkan bagi siswa tamatan SR/MI; dan 2) Jenjang jangka pendek yang ditempuh selama 2 tahun, yang diperuntukkan bagi lulusan SMP/Madrasah Tsanawiyah. Selanjutnya pada tahun 1951 Pendidikan Guru Agama (PGA) Negeri didirikan sebanyak 25 buah yang tersebar di beberapa kota seluruh Indonesia, seperti: Tanjung Pinang, Kotaraja, Padang, Banjarmasin, Jakarta, Tanjung Karang, Bandung, Pamekasan, danlainnya. Tiga tahun kemudian kemudian yaitu tahun 1954, jumlah PGA terdapat sebanyak 30 buah. Adapun Sekolah Guru Hakim Agama (SGHA) pada tahun 1951 didirikan di Aceh, Bukit Tinggi dan Bandung. Kemudian seiring dengan perubahan "Bagian Pendidikan" yang berkembang menjadi "Jawatan Pendidikan Agama" di Departemen Agama. Ketentuan-ketentuan tentang PGA dan SGHA diubah. PGA yang 5 tahun diubah menjadi 6 tahun, terdiri dari PGA Pertama 4 tahun dan PGA Atas 2 tahun. PGA jangka pendek, sedangkan SGHA dihapuskan dan sebagai pengganti SGHA didirikan PHIN (Pendidikan Hakim Islam Negeri) dengan waktu

⁵⁰ Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, "Sejarah Pendidikan Islam dan Organisasi Ditjen Pendidikan Islam," 2022, <https://pendis.kemenag.go.id/profil/sejarah>.

⁵¹ Penyusun, *Lima Puluh Tahun "SMIP-1946.*, p. 15.

belajar 3 tahun dan diperuntukkan bagi lulusan PGA Pertama.⁵²

Selanjutnya pada tahun 1978, sebagai wujud dari implementasi Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Nenegri, dan Menteri Agama, Nomor 6 tahun 1975, SMIP menyesuaikan penamaan lembaga pendidikan dan organisasi pengelolaannya. Pada waktu diambil keputusan untuk memecah SMIP menjadi dua sekolah/madrasah, yaitu:

- 1) Sekolah Menengah Pertama (SMP) SMIP Banjarmasin, dengan lama belajar 3 tahun. Sekolah ini berada di bawah naungan Departemen Pendidikan dan kebudayaan dan menggunakan kurikulum Depdikbud.
- 2) Madrasah Tsanawiyah (M.Ts) SMIP Banjarmasin, dengan lama belajar 3 tahun. Maadrasah ini berada di bawah naungan Departemen Agama dan mengikuti kurikulum madrasah 1975.⁵³

Ketika Yayasan SMIP Banjarmasin berubah penamaannya menjadi Yayasan SMIP-1946, maka semua sekolah yang berada di bawah pengelolaannya dirubah namananya menjadi SMIP-1946, sehingga SMP disebut dengan SMP SMIP-1946 Banjarmasin.

Pada tahun 1988, Yayasan SMIP-1946 mencoba mengembangkan lembaga pendidikan ini dengan mendirikan Madrasah Aliyah SMIP-1946. Akan tetapi karena input siswa Madrasah Aliyah sangat kurang, maka pada tahun 1995 lembaga ini diafiliasikan dengan MAN I Banjarmasin.⁵⁴

⁵² Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, "Sejarah Pendidikan Islam Dan Organisasi Ditjen Pendidikan Islam."

⁵³ Penyusun, *Lima Puluh Tahun "SMIP-1946.*, p. 15.

⁵⁴ Penyusun., p. 15

B. Profil Ulama Penggagas Modernisasi Lembaga Pendidikan Islam Model SMIP-1946.

Sebagaimana dikemukakan pada Bab Pendahuluan, bahwa para ulama atau guru agama penggagas pendirian “SMIP 1946” adalah para ulama dan guru agama dan pengusaha yang telah memiliki pemikiran modern dalam pendidikan Islam. antara lain: H. Khatib Syarbaini Yasir, H. Muhammad Hanafie Gobit, H. Ahmad Amin, H. Busyera Qasim, H. Hasan Mugeni Marwan, H.M. Jasin Amin, H. Muhammad Dahlan, H.M. Hasan Baseri, H. Masykur, H. Raden. Sedangkan para pengusaha, antara lain: H.A. Gazali, H. Jailani Sahari, H. Djarkasi.⁵⁵



Para ulama dan guru agama yang menjadi penggagas utamanya tersebut tergabung di dalam organisasi Persatuan Guru Sekolah Islam

⁵⁵ Wawancara dengan H. Julaikha dan Dra. Hj. Mashunah Hanafie Gobit, alumni SMIP-1946.

(PGSI) yang berdomisili di Banjarmasin.⁵⁶ PGSI ini adalah sebuah organisasi yang kelahirannya dilatarbelakangi oleh adanya kerisauan para ulama dan guru-guru Agama Islam atas kondisi obyektif yang sedang menyelimuti umat Islam di kala itu, terutama di bidang pendidikan keagamaan, yang pada umumnya tidak lagi terbina serta terawat sebagaimana mestinya, utamanya selama era pemerintahan pendudukan Jepang dan pada awal kemerdekaan. Pada era pendudukan Jepang itu banyak lembaga pendidikan Islam yang tutup atau berhenti beroperasi karena dilarang oleh Pemerintah Pendudukan Jepang. Kualitas pendidikan masyarakat tidak maksimal karena oleh Pemerintahan Pendudukan Jepang pendidikan lebih diarahkan pada upaya untuk kepentingan mendukung perang yang dilakukan oleh Jepang bukan untuk mencerdaskan bangsa Indonesia. Pendidikan agama hanya boleh diberikan secara informal dan non formal. Kerisauan para ulama dan guru agama yang tergabung dalam PGSI ini juga berlanjut ketika Indonesia memasuki awal kemerdekaan yang tertunda karena klaim dan masuknya kembali Pemerintah Kolonial Belanda, yang menyebabkan banyak para ulama dan guru agama yang sibuk ikut berjuang untuk kemerdekaan Kalimantan, sehingga banyak lembaga pendidikan Islam yang tertinggalkan dan tidak tertangani untuk bangkit kembali.

Berdasarkan adanya kerisauan dan semangat untuk dapat memberikan pendidikan Islam yang layak bagi masyarakat Islam, maka salah satu kegiatan yang menjadi perhatian khusus dan prioritas dari PGSI ialah mendirikan sekolah menengah Islam, khususnya sekolah menengah Islam tingkat pertama dan atas (SMIP dan SMIA). Pendirian SMIP dan SMIA ini dijadikan prioritas juga didasari oleh kenyataan

⁵⁶ Penyusun, *Lima Puluh Tahun "SMIP-1946.*, p. 4.

bahwa pada saat itu di Daerah Banjar belum ada sebuah lembaga pendidikan agama Islam dalam bentuk sekolah Islam yang setingkat menengah, yang dapat memberikan pembinaan penguasaan ilmu pengetahuan umum di samping penguasaan ilmu pengetahuan agama yang seimbang.⁵⁷

PGSI sebagai organisasi persatuan guru sekolah Islam dimotori oleh para ulama dan guru-guru agama yang memiliki pandangan dan sikap yang tidak eksklusif, tidak membedakan latar belakang organisasi dan latar belakang pendidikan dan pengalaman. Hal tersebut dapat dilihat dari para ulama dan guru-guru agama yang tergabung dalam PGSI yang mendirikan SMIP-1946 ini. Dilihat dari latar belakang organisasi mereka berasal dari organisasi yang cukup beragam, yakni ada yang merupakan pimpinan organisasi sosial keagamaan seperti mantan aktivis *Musyawatutthalibin*, NU, Muhammadiyah, al-Irsyad dan lainnya. Sebagai contoh: H. M. Hanafie Gobit adalah mantan pendiri dan aktivis *Musyawatutthalibin*, H. Chatib Syarbaini Yasir disamping sebagai guru agama yang bekerjasama dengan *Musyawatutthalibin* juga sebagai pendiri dan aktivis SERMI,⁵⁸ H. Ahmad Amin, H. YasinAmin serta H.M. Hasan Baseri adalah para aktivis Muhammadiyah, H. Mugeni Marwan adalah pengurus NU. Dengan demikian, jika melihat latar belakang para ulama dan guru agama yang bergabung di PGSI, maka dapat dinyatakan bahwa para ulama dan guru agama para pendiri SMIP-1946 ini adalah merupakan orang-orang berfikiran modern, terbuka dan moderat serta

⁵⁷ H. Muhammad Asy`ari, "Sejarah Singkat SMIP 1946," *Seminar Dalam Rangka Ulang Tahun SMIP-1946*. (Banjarmasin, 2014). p. 1

⁵⁸ Maksum, "Musyawaratutthalibin."

sangat mengutamakan kerjasama dan persatuan yang diikat dalam satu cita-cita dan perjuangan yang sama.

Tanpa mengecilkkan peran pendiri yang yang lain, ada dua orang ulama yang menjadi pemikir dan penggerak utama lahirnya gagasan berdirinya SMIP-1946 ini, yaitu H. Khatib Syarbaini Yasir dan H. M. Hanafie Gobit. Yang pertama sebagai Ketua PGSI dan sekaligus sebagai Kepala SMIP-1946 yang pertama (1946-1951) dan yang kedua sebagai guru dan Ketua Yayasan pertama yang menaungi SMIP-1946 ini sejak berdirinya hingga pergantian Yayasan yang menaungi SMIP-1946. Untuk itu dua sosok ulama ini dapat dipastikan lebih besar kontribusi pemikiran dan kiprahnya dalam lahirnya SMIP-1946 ini dengan segenap gagasannya.

Berikut ini akan digambarkan biografi singkat beberapa pendiri dan pengelola SMIP-1946.

1. H Khatib Syarbaini Yasir

H. Khatib Sarbaini Yasir adalah salah seorang guru agama Islam yang berasal dari Sumatera Barat. Beliau merupakan alumni “Normal Islam” Padang, sebuah lembaga pendidikan keguruan yang didirikan oleh Mahmud Yunus dan kawan-kawannya dari PGAI yang dipimpin Abdulah Ahmad. Mahmud Yunus sendiri ditunjuk sebagai direktur pertamanya. Normal Islam adalah sebuah sekolah keguruan Islam yang hanya menerima tamatan madrasah 7 tahun dan dimaksudkan untuk mendidik calon guru. Normal Islam mengajarkan ilmu-ilmu agama, bahasa Arab serta kesusasteraannya, pengetahuan umum, ilmu mendidik/mengajar, ilmu jiwa, dan ilmu kesehatan. Mahmud Yunus berpendapat, “kalau di HIK para siswa dapat belajar berbagai macam

ilmu pengetahuan dengan bahasa pengantar (*voertaal*) bahasa Belanda, maka di Normal Islam ini para siswa belajar ilmu-ilmu agama dan pengetahuan umum dengan pengantar bahasa Arab.” Untuk mendukung penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar di sekolah, Mahmud Yunus menggunakan buku *Durus al-Lughah al-Arabiyyah* 2 jilid yang dikarang ketika ia masih berada di Mesir. Di sini Mahmud Yunus membuat pembaruan metode mengajar bahasa Arab sehingga para siswa dapat menguasai bahasa Arab secara aktif. Madrasah ini juga madrasah yang pertama-tama memiliki laboratorium untuk ilmu fisika dan kimia.⁵⁹

Kedatangan H. Khatib Sarbaini Yasir ke daerah Banjar atas permintaan dari organisasi lokal Kalimantan *Musyawaratutthalibin* untuk menjadi tenaga pengajar dan mengembangkan pendidikan Islam yang dikembangkan oleh *Musyawaratutthalibin* di berbagai pelosok di Daerah Banjar dan daerah lainnya yang ada sekolah *Musyawaratutthalibin*. Setibanyanya di Daerah Banjar beliau pertama kali mengajar di “Normal Islam” Rantau Kabupaten Tapin, yang merupakan satu lembaga pendidikan di bawah naungan *Musyawaratutthalibin*.⁶⁰ Selanjutnya beliau juga aktif berkiprah dalam upaya pengembangan pendidikan Islam pada seluruh lembaga pendidikan yang dibina oleh *Musyawaratutthalibin*. Setelah pembubaran atau penonaktifan organisasi *Musyawaratutthalibin* oleh Pemerintahan Pendudukan Jepang tahun 1942,⁶¹ beliau tetap berkiprah dalam bidang pendidikan baik sebagai pengajar di beberapa

⁵⁹ Syeh Hawib Hamzah, “Pemikiran Mahmud Yunus Dalam Pembaruan Pendidikan Islam Di Indonesia,” *Dinamika Ilmu* 14, no. 1 (2014): 123–47, https://iain-samarinda.ac.id/ojs/index.php/dinamika_ilmu/article/view/18.

⁶⁰ Ramli Nawawi. dkk., *Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Selatan*, ed.. p. 54-57.

⁶¹ M.Nur Maksun, “Musyawaratutthalibin , p. 78.

lembaga pendidikan Islam dan kemudian beliau Bersama-sama para guru agama Islam lainnya dengan dukungan para ulama mendirikan Persatuan Guru Sekolah Islam (PGSI) dan beliau sekaligus ditunjuk sebagai pimpinan pertamanya. Melalui PGSI inilah beliau Bersama tokoh ulama lainnya menggagas pendirian SMIP-1946, dan sekaligus juga beliau ditunjuk sebagai pimpinan atau Kepala sekolah pertama dari tahun 1946 hingga tahun 1951).⁶²

Selain sebagai aktivis pendidikan, beliau juga aktif dalam organisasi perjuangan kemerdekaan Kalimantan, yaitu sebagai pendiri dan pengurus Syarikat Muslimin Indonesia (SERMI), sebagai Ketua II.⁶³

2. H. Muhammad Hanafie Gobit

H. Muhammad Hanafi Gobit lahir di Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 11 Januari 1915. Latar belakang pendidikan yang pernah ditempuh: *Inlandche School* (sekolah rakyat tingkat dasar) di Balikpapan, *Madrasah Diniyah Al-Asbriyyah* (Sekolah Arab) di Banjarmasin (1925-1927), pendidikan non formal dalam bentuk *kaji duduk* (halaqah) kepada Tuan Guru Haji Said Midad dari tahun 1925 sampai dengan tahun 1933 di Kampung Sungai Jingah. Pada tahun 1933 beliau pergi ke Mekkah untuk melanjutkan pendidikan pada *Madrasah Ash-Sholatiyah* di Mekkah selama enam setengah tahun (1933-1940) dengan mendapatkan ijazah setingkat *Al-Qismul 'Ali*, nomor ijazah: 2025, tertanggal 14 Rajab 1360 H. 1941 M. Selama di Mekkah, selain mengikuti pendidikan di *Madrasah*

⁶² Penyusun, *Lima Puluh Tahun "SMIP-1946.*, p. 6.

⁶³ Dkk. M. Idwar Saleh, *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*, ed.dkk.. p. 116.

Ash-Sholatiyah beliau juga aktif mempelajari ilmu-ilmu agama yang diselenggarakan pada Masjid Haram.

Pada tahun 1941 beliau pulang ke Banjarmasin dan mengabdikan pada masyarakat sebagai tuan guru dan menggagas berdirinya Departemen Agama Kalimantan Selatan serta menjadi tenaga pengajar dalam berbagai lembaga pendidikan, baik umum maupun agama. Beliau juga aktif pada organisasi Persatuan Guru Sekolah Islam (PGSI) yang didirikan tahun 1945.

H.M. Hanafie gobit juga dapat dinyatakan sebagai ulama yang berpikiran terbuka untuk modernisasi, moderat dan kolaboratif. Hal itu dapat dilihat dari berbagai kegiatan dan organisasi politik dan sosial keagamaan serta jabatan pemerintahan yang beliau geluti. Di antara kegiatan yang beliau jalani selama kurun sebelum dan sesudah kemerdekaan sampai tahun 1950, selain aktif berdakwah dan mengasuh pengajian di Masjid Jami Banjarmasin dan di berbagai pelosok, antara lain:

- (1) Sebagai salah seorang pendiri dan aktivis organisasi sosial keagamaan lokal yang bernama *Musyawatuthalibin* tahun 1931.
- (2) Sebagai pengajar pada Sekolah Qadhi (*Kaikyo Gakko Ing*) yang berdiri pada masa pendudukan Jepang.⁶⁴
- (3) Mustasyar Kerapatan Qadhi Besar Banjarmasin tahun 1942-1944
- (4) Wakil Qadhi Besar tahun 1942-1943, berdasarkan Surat Keputusan Borneo Menseibu Tjokan, tertanggal 20-11-1942.
- (5) Ketua Muda Kantor Jam'iyah Islamiyah *Borneo Kaikjo Kajokai* Banjarmasin tahun 1944-1947

⁶⁴ Ramli Nawawi. dkk., *Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Selatan*.

- (6) Anggota *Sikai Gun* (Dewan Kota) pada masa pendudukan Jepang.
- (7) Satu-satunya orang Indonesia yang diberikan kepercayaan untuk mengasuh mata pelajaran Budi Pekerti pada Pada masa Nica, pertama kali didirikan jenis sekolah sekolah guru yang didirikan oleh NICA dengan nama *Kweekschool Nieuw Stijl* bertempat di Banjarmasin pada tahun 1947.
- (8) Sebagai pendiri dan pengelola pembangunan serta aktif sebagai pengajar. Beliau adalah sebagai Ketua Yayasan, yaitu “Yayasan Kesejahteraan Madrasah Menengah” yang membangun SMIP-1946 di masa awal berdirinya hingga tahun 1983.
- (9) Bersama dengan beberapa tokoh pergerakan, antara lain: A. Sinaga, Fajar Sidik, Raden Sya’ban, dan Engku Rasyid pada tahun 1946 mendirikan sebuah sekolah tingkat atas yang disebut Sekolah Menengah Tinggi (SMT).⁶⁵

Setelah tahun 1950 beliau tetap aktif dalam dalam beberpa kegiatan sosial dan orgnaisasi sosial keagamaan dan juga politik, di antaranya:

- 1) Sebagai ulama yang diberi mandate mendirikan Departemen Agama di Kalimantan serta menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kalimantan sejak tahun 1951 sampai dengan 1963.
- 2) Salah seorang penggagas beridrinya IAIN Antasari.
- 3) Wakil Ketua Majelis Ulama Daerah Kalimantan Selatan yang dibentuk oleh Pangdam X Lambung Mangkurat pada tahun 1982. Sebagai ketuanya ditunjuk KH. Salman Taib. Ia juga sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di

⁶⁵ Tim, *Ulama Banjar Dari Masa Ke Masa*.

Jakarta pada tahun 1975. Ketika itu, Ketua MUI Pusat adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA)

- 4) Anggota Komisi III MUI yang Membidangi Ukhuwah Islamiyah, berdasarkan hasil Keputusan Munas II MUI tahun 1980 di Jakarta.
- 5) Ketua Dewan Dakwah Islamiah Indonesia (DDII) Cabang Kalimantan Selatan yang pertama.
- 6) Di bidang politik juga aktif berjuang untuk mewujudkan kemerdekaan Kalimantan pada masa revolusi dan juga aktif dalam partai politik, yakni sebagai pengurus dan anggota SERMI, Parmusi, Masyumi dan terakhir PPP. Sempat menjadi anggota MPR Berbagai aktivitas dan jabatan yang beliau lakukan dan pegang tersebut mencerminkan karakter beliau yang sangat terbuka, moderat dan selalu tanggap dengan perubahan yang mendorong adanya modernisasi dalam setiap bidang yang digeluti.⁶⁶

Selain kedua tokoh sentral dalam pendirian SMIP-1946 ini terdapat juga beberapa tokoh lain yang ikut serta memberikan pemikiran lahirnya gagasan model SMIP-1946, yaitu:

- (1) H. Hasan Mugeni Marwan.

H. Hasan Mugeni Marwan lahir di Desa Banua Anyar Banjarmasin pada tahun 1905. Latar belakang pendidikan beliau adalah Al-Azhar Mesir, dengan bidang keahlian Tafsir dan Seni Baca al-Qur'an. Beliau selain ikut memprakarsai beridinya SMIP-1946 ini juga pernah menjabat sebagai Pimpinan SMIP-1946 periode 1951-1954. Aktif sebagai pengurus NU dan pernah menjadi Qadi di Banjarmasin.

⁶⁶ Tim.

(2) H. Hasan Baseri

H. Hasan Baseri lahir di Muara Teweh Kalimantan Tengah dan dibesarkan di Banjarmasin Daerah Banjar. Latar belakang pendidikan yang dilalui, Diniyah Awwaliyah Islamiyah, sekolah menengah pertama (*Vervolk School*) dan Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah di Banjarmasin, Sekolah Guru Mu`allimin di Yogyakarta

Selain itu ada beberapa ulama dan guru agama yang merupakan pengasuh dari Madrasah al-Ashriyah Pasar Lama Banjarmasin, seperti H.M. Jasin Amin dan H. Massykur adalah Pembina dan guru pada *Diniyah School* Sungai Kedauang Banjarmasin. Sedangkan Abu Bakar Razy (aktivis Muhammadiyah Kelayan). Selain itu ada H. Busera Qasim, H. Ahmad Amin yang juga dilibatkan dalam pendirian SMIP-1946 dan sebagai guru.

Jika dilihat dari biografi para ulama yang terlibat dalam lahirnya SMIP-1946 ini, umumnya mereka adalah para ulama yang berpikiran moderat, modern, dan non sektarian. Meskipun jika dilihat dari latar belakang dan pengalaman mereka cukup beragam, ada yang berlatarbelakang pendidikan tradisional di dalam negeri dan luar negeri. Begitu juga dilihat dari aktivitas organisasi, mereka juga beragam, ada yang berkecimpung di organisasi Muhammadiyah, NU, dan SI, Permusi. Hal itu juga menunjukkan bahwa para ulama yang mendirikan sekolah ini adalah para ulama Banjar yang berpikiran dan memiliki sikap terbuka atas perbedaan pikiran dan pandangan.

BAB III

SEJARAH DAN LATAR BELAKANG GAGASAN MODERNISASI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM MODEL “SMIP-1946”

A. Sejarah Singkat Beridirinya SMIP-1946

Sekolah Menengah Islam Pertama (SMIP) ini didirikan pada tanggal 15 Oktober 1946 M. bertepatan dengan tanggal 20 Dzul Qa`dah 1365 H. di Banjarmasin. Dengan demikian sekolah ini berdiri ketika kurang lebih satu tahun dua bulan setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaanya dan ketika pasukan NICA dengan pasukannya telah memasuki kembali Daerah Banjarmasin, yang kemudian dihadapi dengan perjuangan rakyat Kalimantan untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamikan tersebut. Situasi tersebut tentu memberikan gambaran yang sangat menarik, yakni di satu sisi ada semangat untuk segera mengecap kemerdekaan dan bersiap untuk mengisinya, namun pada sisi lain ada perasaan kecewa dan berkobar untuk berjuang kembali guna mempertahankan dan mendapatkan kemerdekaan yang tertunda. Diduga situasi itulah yang menyebabkan pembaharuan dan pendirian lembaga pendidikan baru di era revolusi di daerah Banjar sangat sedikit dilakukan. Dari sedikit atau bahkan boleh jadi satu-satunya lembaga pendidikan yang lahir di era revolusi ini adalah SMIP-1946.

Diceriterakan bahwa hasrat untuk mendirikan SMIP-1946 ini diawali dengan hanya bermodalkan uang sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) yang didapat dari hasil pasar amal (bazar) yang diadakan oleh

para pendiri, ditambah dengan bantuan para pengusaha dermawan yang tergabung dalam para pendiri, seperti H Djarkasji dan H. A. Gazali.

Ketika SMIP-1946 pertama berdiri, aktivitas pendidikannya dilakukan pada sebuah bangunan bekas sekolah HIS Muhammadiyah yang berlokasi di Jalan Kalimantan Banjarmasin yang tidak beroperasi lagi sejak ditutup pada masa pendudukan Jepang. Aktivitas pendidikan SMIP-1946 pada tempat ini berlangsung hingga tahun 1952, setelah SMIP-1946 berhasil membangun Gedung belajarnya sendiri yang berlokasi di Sungai Jingah Banjarmasin atau sekarang Jl Masjid Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, yang ditempati sampai sekarang.⁶⁷

Gedung SMIP-1946 ini bertempat di sebidang tanah yang merukan hadiah dari seorang dermawan Banjarmasin yang bernama H. Syahran Husin.⁶⁸ Sedangkan pembangunannya banyak dibantu oleh para dermawan, khususnya ayah mertua K.H. Hanfie Gobit, yaitu H. Abdul Karim dan saudara ipar H. Djarkasji serta kolega H. Gazali serta sumbangan dermawan yang dikumpulkan melalui Badan Pengurus Zakat (BAZ) di samping hasil dari pembayaran SPP siswa.⁶⁹

Pengelolaan SMIP, baik ketika menempati gedung pinjaman dari Muhammadiyah dan ketika memiliki gedung sendiri, selama 15 tahun, ditangani dan dibina langsung (termasuk mengusahakan dana operaasionalnya) oleh K.H. Hanafie Gobot beserta para pendiri SMIP lainnya. Baru pada tahun 1961 dibentuk sebah yayasan dengan Akte Notaris Nomor 25 tanggal 30 Maret 1961, yang bertugas mengelola SMIP dengan nama “Yayasan Kesejahteraan Madrasah Menengah Islam

⁶⁷ Ramli Nawawi. dkk., *Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Selatan.*, 116.

⁶⁸ Wawancara dengan keluarga H.Hanafie Gobit.

⁶⁹ Penyusun, *Lima Puluh Tahun "SMIP-1946.*, p. 13.

(YKMMI)” yang diketua oleh K.H. Hanafie Gobit, dengan kepengurusan sebagaimana terlampir (1). Selanjutnya pada tahun 1983 terjadi pergantian nama yayasan pengelola SMIP, dari YKMMI kepada “Yayasan Pendidikan Islam SMIP-1946”. Pergantian yayasan berdasarkan hasil musyawarah dalam rangka Hari Uang Tahun SMIP yang 37 tahun 1983, yang kemudian dikukuhkan dengan Akte Notaris Nomor 40 tahun 1983, yang diketuai Drs. H.M. Asy`ari, MA., dengan personalia pengurus terlampir (2). Seterusnya terjadi beberapa kali pergantian nkepengurusan Yayasan hingga sekarang.

Pada masa awal berdirinya, hampir semua pengajar SMIP lebih banyak berkorban secara sukarela atau hanya menerima imbalan yang tidak menentu. Hal ini disebabkan karena uang SPP yang diperoleh pada saat itu lebih banyak dipergunakan untuk keperluan membeli alat-alat kantor dan pembelajaran. Hanya jika kebetulan ada kelebihannya baru dibayarkan untuk honor guru dan petugas administrasi.⁷⁰ Di antara para pengajar yang telah membaktikan dirinya pada tahun-tahun pertama adalah: 1) K.H. Hanafie Gobit, 2) Khatib Syarbaini Yasir, 3) Abdurrahman May, 4) Fajar Sidik, 5) A.A. Rivai, 6) Marwan Ali, 7) Kamaruddin Thaib, 8) H.Hasan Mugni Marwan, 9) H. Jailani Sahari, 10) H. Muhammad Dahlan, 11) M. Ruslan, 12) K.H. Abdurrahman Ismail, 13) Abu Bakar Razy, 14) As`ad, 15) Ardiansyah Ideham, 16) Abdullah Yazidi, 17) Bustani, dan 18) H. Tarmizi Abbas.⁷¹

Pada pertama kali dibuka tahun 1946, SMIP menerima siswa dari berbagai daerah yang merupakan tamatan dari sekolah rakyat (SR/SD) dan madrasah dari seluruh pelosok Darah Banjar dan sebagian

⁷⁰ Penyusun., p. 7.

⁷¹ Penyusun., p. 7.

dari Daerah Dayak Besar, Daerah Sampit, Kalimantan Tenggara dan Timur. Lulusan SR/SD diterima di kelas A dengan masa belajar selama lima tahun, sedangkan lulusan madrasah di kelas B dengan masa belajar tiga tahun. Penerimaan siswa dengan klasifikasi kelas B hanya selama tiga tahun yaitu 1946, 1947, dan 1948, setelahnya tidak diberlakukan lagi pembagian kelas A dan B ini.⁷²

SMIP berhasil menghasilkan lulusan pertama tahun 1949, khususnya yang menempuh kelas B. Sedangkan untuk kelas A baru lulus tahun 1951. Lulusan kelas B tidak ada lagi setelah tahun 1950. Selanjutnya sejak tahun 1978 SMIP menerima siswa untuk SMP dan madrasah tsanawiyah, yakni setelah SMIP mengikuti regulasi pemerintah untuk pengelolaan pendidikan dasar dan menengah.

B. Latar Belakang Lahirnya Gagasan Modernisasi Lembaga pendidikan Islam Model SMIP-1946.

Hal-hal yang melatarbelakangi lahirnya gagasan modernisasi lembaga pendidikan Islam, khususnya dalam pendirian SMIP-1946, sudah barang tentu tidak bisa dilepaskan dari kondisi dan situasi pendidikan Islam yang dialami oleh masyarakat Muslim di Daerah Banjar, baik pada masa Pemerintah Kolonial Belanda, masa pendudukan jepang, dan pada masa awal Indonesia merdeka.

1. Kondisi dan Situasi Pendidikan Masyarakat Daerah Banjar Pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda.

Kondisi dan situasi pendidikan pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda yang memicu semangat untuk melahirkan lembaga

⁷² Penyusun., p. 12.

pendidikan Islam model SMIP-1946 tersebut dikarenakan kesempatan masyarakat Islam pribumi untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas sangatlah terbatas dan dibatasi. Tidak semua masyarakat dapat mengecap pendidikan yang layak dan bermutu (utamanya untuk mendapatkan pengetahuan umum yang layak) sebagaimana yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Meskipun pemerintah Belanda memberikan kesempatan bagi rakyat pribumi, utamanya sejak diterapkannya ‘politik etis’ oleh pemerintah kolonial Belanda sejak awal abad ke-20, namun untuk mengakses lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kolonial Belanda tersebut sangat dibatasi dan diskriminatif.⁷³

Jika dilihat lebih khusus kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda di Daerah Banjar dalam hal akses pendidikan, maka jenis sekolah yang bisa diakses pada masa itu ditentukan berdasarkan strata masyarakat yang dibuat oleh Pemerintah Kolonial belanda, yaitu:

- 1) *Europese Lagere School* (ELS), yaitu sekolah setingkat sekolah dasar dengan lama pendidikan 7 tahun. Pembelajaran menggunakan Bahasa pengantar Bahasa Belanda dan husus untuk orang Belanda atau orang yang mendapat persamaan hak dengan Belanda;
- 2) *Holands Chinese School* (HSC), yaitu sekolah setingkat dasar dengan lama pendidikan 7 tahun. Pembelajaran menggunakan Bahasa Belanda. Sekolah untuk golongan orang Cina. Mereka dikategorikan sebagai golongan kelas dua atau golongan menengah oleh pemerintah colonial Belanda.

⁷³ Ramli Nawawi. dkk., *Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Selatan.*, p. 30-31.

- 3) *Holland Inlandse School* (HIS), yaitu pendidikan setingkat sekolah dasar dengan lama pendidikan 7 tahun. Pembelajarannya menggunakan Bahasa Belanda. Sekolah ini diperuntukan untuk rakyat Indonesia. Akan tetapi Pemerintah kolonial Belanda menerapkan seleksi yang ketat dan diskriminatif dalam memberikan kesempatan untuk sekolah ini. Hanya masyarakat pribumi yang menempati kategori A dan B saja yang dapat mengakses sekolah ini, yaitu golongan anak priyayi dan orang-orang yang telah membayar pajak yang besar yang diberikan kesempatan oleh pemerintah Kolonial Belanda.⁷⁴
- 4) *Inlandse School Door Tweedeclate* (Sekolah Kelas Dua), yaitu sekolah yang diperuntukkan bagi masyarakat pribumi (*inlanders*) golongan rakyat pribumi kelas C. Sekolah ini lama belajarnya selama 5 tahun. Pembelajarannya menggunakan Bahasa daerah (Bahasa Melayu). Di sekolah ini siswa diberikan pelajaran berhitung, menggambar, Bahasa Melayu, Ilmu Bumi dan Menulis Indah. Mata pelajaran sejarah tidak diberikan, kecuali Sejarah Hindia Belanda. Selain itu siswa juga diberikan pelajaran Huruf Arab Melayu. Tidak ada pelajaran agama. Jumlah sekolah ini di Daerah Banjar terdapat sebanyak 13 buah yang masing-masing berada di beberapa kabupaten.⁷⁵

⁷⁴ Pemerintah Kolonial Belanda menyebut masyarakat pribumi sebagai sebut dengan *inlander*” (mereka dipandang tidak memiliki kemampuan alamiah untuk dapat memasuki dunia ilmu dan ketrampilan yang demikian peliknya). Ada tiga strata, yaitu: kategori A adalah kaum bangsawan, pejabat tinggi serta pengusaha kaya yang berpenghasilan bersih 75 golden sebulan. Kategori B adalah orang tua yang memperoleh pendidikan MULO dan Kweekshool ke atas. Kategori C adalah pegawai kecil, pengusaha kecil, moliter atau orang tua yang memperoleh pendidikan HIS Ramli Nawawi. dkk., p. 31-33.

⁷⁵ Idwar, *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*. p. 34-35.

- 5) *Volksschool* (Sekolah Rakyat), yaitu sekolah setingkat sekolah dasar yang benar-benar untuk rakyat kecil yang ada di hampir seluruh desa, sehingga sekolah ini juga disebut Sekolah Desa. Lama belajar pada sekolah ini hanya 3 tahun. Mata pelajaran yang diberikan meliputi: Membaca, Berhitung, Dekti, dan Menulis Indah, jadi sekedar untuk tidak buta huruf. Siswa yang lulus sampai kelas tiga dapat melanjutkan ke *Inlandse School* kelas 4.⁷⁶
- 6) *Vervolgschool* (Sekolah Rakyat Lanjutan dari *Volksschool*), yaitu sekolah ini juga untuk rakyat pribumi kelas C yang dibangun oleh Pemerintah Kolonial Belanda untuk mengganti Sekolah Kelas Dua yang terpaksa dibubarkan karena menghemat biaya Pemerintah Kolonial Belanda. Sekolah ini juga lama belajarnya selama 5 tahun, yang dapat dimulai dari kelas 1 atau kelas 4 bagi yang lulusan *Volksschool*.⁷⁷
- 7) *Schakel School* (Sekolah Rantai Penyambung), yakni sekolah yang dibangun oleh Pemerintah Kolonial Belanda untuk menghubungkan sekolah “bumi putera” dengan “sekolah Belanda”. Pemerintah Kolonial Belanda memberikan kesempatan bagi lulusan *Vervolgschool* untuk meneruskan ke sekolah Belanda yang lebih tinggi, yaitu MULO, tentu dengan persyaratan yang sangat ketat, utamanya terkait dengan status.
- 8) MULO (*Meer Uitgebreid Lager Ondernwijs*), yaitu Sekolah setingkat Menengah Pertama (SMP) sekarang dengan lama pendidikan 3 tahun. Sekolah ini tidak bisa diakses oleh bumi putera. MULO yang bisa diakses oleh bumi putera tamatan *vervolgschool* didirikan khusus

⁷⁶ Ramli Nawawi. dkk., *Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Selatan*., p. 38-39.

⁷⁷ Ramli Nawawi. dkk., p. 39-40.

oleh Pemerintah Kolonial Belanda dengan nama *Inbeense MULO* (*MULO* Bumiputera) dengan lama belajar selama 4 tahun.

Selain lembaga pendidikan dalam bentuk sekolah umum, Pemerintah Kolonial Belanda juga mendirikan sekolah kejuruan, dan pendidikan dalam bentuk kursus-kursus, yang menerima siswa tamatan *volkschool*, seperti: (1) *Ambachtschool* (Sekolah Pertukangan) di Kebun Sari Amuntai, dengan lama belajar 3 tahun; (2) *Klein Handelschool* (Sekolah Dagang) di Banjarmasin dengan lama belajar 3 tahun. Selain itu terdapat juga sekolah dagang dalam bentuk 1 satu tahun tambahan belajar bagi siswa *Vervolgschool*; (3) *Lanbouw Cursus* (Kursus Pertanian) yang terdapat di beberapa daerah. Cursus ini menerima juga siswa lulusan *Vervolgschool* 5 tahun, untuk menjadi calon pegawai mantri pertanian; (4) *Meisjesvolkschool* (Sekolah Kejuruan Wanita) di Barabai, Kandangan, Amuntai dan Rantau. Sekolah ini terdiri dua bentuk, yaitu *Meisjesvolkschool* 3 tahun dan *Meisjesvolkschool* 5 tahun.⁷⁸

Selain sekolah umum dan kejuruan di atas, Pemerintah Kolonial Belanda juga mendirikan sekolah guru (*Kweekschool*). Sekolah ini diperuntukkan untuk mendidik calon guru bantu pada sekolah kelas dua dan *volkschool*. Sekolah ini hanya menerima siswa atau peserta dari orang tua yang memegang peranan, karena itu disebut “sekolah Raja”. Selain itu untuk memenuhi kebutuhan guru bagi *volkschool* atau sekolah Desa yang banyak, maka siswa lulusan *Gobernamen Kelas Dua* atau *Vervolgschool* yang cerdas direkrut menjadi peserta magang di *volkschool* di bawah bimbingan Kepala Sekolah (Mantra Guru) selama 1 tahun. Pelajaran lebih bersipat praktis, yakni tentang bagaimana cara mengajar berhitung,

⁷⁸ Ramli Nawawi. dkk., p. 43-45.

membaca, imla, dsb. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan guru, juga dibuka kursus yang diberi nama *Cursus Volk Ondrwijszer* (CVO) dengan lama belajar selama 2 tahun setelah *Vervolgschool*. Sekolah ini terdapat sebanyak 8 buah di Daerah Banjar. Bentuk lain sekolah guru ialah *Normalcursus* dan *Normal Leergang*, dengan lama belajar selama 2 tahun. Kurikulum dilaksanakan di sore hari sedangkan paginya mereka mengajar di *Volkschool*. Peserta dari kursus ini adalah lulusan CVO yang telah bertugas sebagai pengajar di *Volkschool*.⁷⁹

Meskipun Pemerintah Kolonial Belanda mendirikan sekolah khusus untuk pribumi dan memberikan akses kepada masyarakat pribumi (Islam) untuk mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Kolonial Belanda tersebut, namun kesan diskriminatif dan kesan melecehkan bangsa pribumi. Upaya diskriminatif tersebut nampak nyata bukan saja dibandingkan dengan bangsa Belanda (Erofa) tetapi juga dengan bangsa lain seperti Cina dan Arab. Bahkan sebagaimana ditulis dalam buku “Sejarah Pendidikan Daerah Daerah Banjar” disebutkan:

Sekolah yang didirikan pemerintah kolonial bukan untuk bangsa “*Inlander*” (bangsa pribumi), mereka dianggap tidak mempunyai kemampuan alamiah untuk bisa memasuki dunia ilmu dan keterampilan yang demikian peliknya. Begitulah pendapat golongan orang Belanda *konservatif* terhadap sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial.

Seorang “*inlander*” baru dapat menikmati pendidikan setelah melewati seleksi yang ketat, bukan seleksi kecerdasan, tetapi seleksi ras dan status. Seleksi ras menempati ketentuan pertama. Ras yang diutamakan adalah ras Belanda yaitu ras Erppah, yang kedua adalah ras Cina dan yang terbawah adalah ras “*inlander*”.⁸⁰

⁷⁹ Ramli Nawawi. dkk., p. 34-48.

⁸⁰ Ramli Nawawi. dkk., p. 30.

Di pembatasan akses dalam mengenyam pendidikan bagi pribumi oleh Pemerintah Kolonial Belanda sebagaimana digambarkan di atas, kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda terhadap pendidikan Islam secara umum juga tidak baik dan senantiasa dicurigai dan dihambat perkembangannya, utamanya pasca munculnya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang didirikan oleh berbagai organisasi pergerakan rakyat Indonesia di Daerah Banjar, seperti: lembaga pendidikan yang didirikan oleh SI, *Musyawaruttalibin*, Perguruan Rakyat Parindra, Persatuan Perguruan Islam (PPI), Sekolah taman Siswa, dll.⁸¹

Kondisi seperti tergambar di atas itulah yang memotivasi umat Islam, khususnya di daerah Banjar untuk mendirikan lembaga pendidikan Islam, bukan saja pada saat pemerintahan kolonial Belanda tetapi juga dalam tahapan selanjutnya, termasuk di masa revolusi dan pasca kemerdekaan. Kalau dilihat perkembangan selama pemerintahan Belanda, pembangunan lembaga pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat Banjar 80% merupakan sekolah-sekolah agama (Islam).⁸² Salah satu faktor utama yang mendorong pendirian lembaga pendidikan Islam oleh umat Islam di Daerah Banjar itu ialah untuk menandingi sekolah-sekolah umum yang dibangun oleh Pemerintah Kolonial. Tandingan ini diamsudkan untuk menyediakan tempat belajar bagi anak-anak mereka agar tidak memasuki sekolah-sekolah Belanda yang oleh masyarakat dianggap sebagai ingin mengkritikan anakpanak mereka.⁸³

⁸¹ Ramli Nawawi. dkk., p. 49-98.

⁸² Ramli Nawawi. dkk., p. 50.

⁸³ Ramli Nawawi. dkk., p. 50.

Upaya pendirian sekolah baru ada yang dilakukan oleh perorangan dan ada pula yang dilakukan oleh organisasi pergerakan Islam. Upaya itu umumnya dimotori oleh para ulama dan tokoh masyarakat yakni dengan memodernisasi sistem pendidikan tradisional yang sudah ada dan berangsur sebelumnya dan mendirikan lembaga pendidikan Islam baru yang modern, yakni lembaga pendidikan Islam yang menerapkan sistem sekolah dan memberikan sejumlah mata pelajaran umum, hanya saja kualitas pelajaran umumnya masih terbatas dan kualitasnya masih belum memadai. Pembaharuan pendidikan dalam bentuk sekolah pertama dimulai oleh Muhammad bin Thalib dan Umar Binsef, yang kemudian dilanjutkan oleh Saleh Balala dari perkumpulan orang-orang Arab yang mendirikan sekolah tingkat dasar yang bernama *Islamsche School* yang terletak di Jalan Sulawesi Banjarmasin pada tahun 1914. Sekolah ini menerapkan sistem pendidikan seperti yang dilakukan pada sekolah Belanda, yakni menggunakan kelas yang dilengkapi meja, kursi dan papan tulis. Begitu juga waktu belajar dan kurikulum yang mengajarkan mata pelajaran umum selain agama. Perkembangan pembaharuan pendidikan dalam bentuk sekolah di tingkat dasar ini dilanjutkan oleh para tokoh ini yang kemudian bergabung dengan organisasi Muhammadiyah pasca hadir di Alabio dan menyebar ke seluruh daerah di Daerah Banjar.⁸⁴

Eksistensi dan keberlangsungan lembaga pendidikan Islam yang didirikan oleh umat Islam itu, bukan tanpa tantangan. Jika dilihat dari perkembangan pendidikan Islam di masa Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia, maka sebagaimana dikemukakan oleh Deliar noor (19820

⁸⁴ Syaharuddin, *Orang Banjar (Menjadi Indonesia) Dinamika Organisasi Islam Di Borneo Selatan 1912-1942*, ed. M. Nazir S, ketiga (Yogyakarta: Eja Publisher, 2017). p. 47.

pendidikan Islam dikembangkan di bawah kebijakan politik yang dijalankan oleh Pemerintah Kolonial Belanda yang didasari oleh rasa kekhawatiran munculnya pergerakan kemerdekaan Indonesia dari umat Islam, dan rasa panggilan agamanya yaitu Kristen serta upaya untuk mempertahankan kolonialismenya.⁸⁵ Dengan begitu menurut simpulan Samsul Nizar (2008) mereka menerapkan peraturan dan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 1882 M Pemerintah Kolonial Belanda membentuk suatu badan khusus yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang disebut “*Priesterraden*.” Atas nasihat dari badan inilah maka pada tahun 1905 M pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan yang isinya bahwa orang yang memberikan pengajaran (baca: pengajian) harus minta izin terlebih dahulu.
- 2) Pada tahun 1925 M Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan peraturan yang lebih ketat lagi terhadap pendidikan Islam, yaitu bahwa tidak semua orang (Kyai) boleh memberikan pengajaran. Peraturan ini diberlakukan karena adanya gerakan organisasi pendidikan yang sudah tampak tumbuh, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Partai Syarikat Islam (PSI), Al-Irsyad, dan lain-lain.
- 3) Pada tahun 1932 M keluar pula peraturan yang memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak diberikan izin untuk memberikan pengajaran atau memberikan pelajaran yang tidak

⁸⁵ Deliar Noor, *Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1942.*, p. 180-234.

disukai oleh Pemerintah Kolonial Belanda yang disebut Ordonansi Sekolah Liar (*Wilde School Ordonantie*).⁸⁶

Kondisi sosio historis dan pengalaman pendidikan yang telah dialami selama masa Pemerintahan Kolonial Belanda tersebut diatas, tentu bukan saja memberikan pengalaman traumatik bagi masyarakat yang tidak boleh terulang, tetapi juga pada sisi lain harus diakui telah memberikan pelajaran berharga bagi para tokoh masyarakat dan ulama dalam membangun lembaga pendidikan Islam pasca kemerdekaan. Tentu ada hal-hal positif yang dapat diambil sebaliknya tentu ada hal-hal yang negatif atau tidak cocok untuk diterapkan dalam pendidikan Islam. Hal ini tentu sejalan dengan apa yang dipahami dan diyakini oleh para ulama pembaharu (seperti para ulama penggagas berdirinya SMIP-1946 ini). sebagaimana yang sering disebut dalam ungkapan atau paradigma “*al-muhafadhotu ‘ala qodimis sholih wal akhdzu bil jadidil ashlah*”, yakni ‘Memelihara yang lama yang masih baik dan mengambil yang baru yang lebih baik’. atau bahkan, sebagaimana sering diungkapkan oleh Amin Abdullah, “bukan saja *akhdzu bil jadidil ashlah*, tetapi juga *al-ajdu bil jadidil ashlah*”. Hal itulah yang kemudian dilakukan oleh para pendiri SMIP-1946 ketika melahirkan gagasan pendirian lembaga pendidikan Islam ini.

2. Kondisi Pendidikan Masyarakat Daerah Banjar Pada Masa Pemerintahan Pendudukan Jepang.

Pada masa Pemerintahan Pendudukan Jepang di Daerah Banjar, sebagaimana di daerah lain di Indonesia, secara umum kondisi

⁸⁶ Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam : Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*, Ed. 1, Cet (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)., p. 307-308.

pendidikan Islam mendapatkan kelonggaran untuk berkembang dibandingkan dengan masa Kolonial Belanda, utamanya secara kuantitatif. Sebagaimana dikemukakan oleh Harry J Benda, kedatangan Jepang langsung dirasakan oleh umat Islam melalui pembentukan *Shumubu* (Kantor Urusan Agama) yang ketua oleh kolonel Horie pada bulan sejak Maret 1942 di ibu kota dan pada tahun 1944 dibuka cabang-cabangnya yang bernama *Shumuka* di seluruh Indonesia.⁸⁷ Dalam perkembangannya Shumubu menangani urusan-urusan yang berkaitan dengan fungsi Departemen Dalam Negeri, Kejaksaan, Pendidikan, dan Keagamaan Umum.⁸⁸ Sebagaimana dikemukakan oleh Ramayulis secara umum kondisi pendidikan di Indonesia, bahwa pendidikan Islam mendapatkan kelonggaran untuk berkembang dibandingkan dengan masa Kolonial Belanda. Pertama, pada masa awal pendudukan Jepang, madrasah diberikan kelonggaran untuk berkembang terutama dari segi kuantitas. Hal ini dapat dilihat terutama di Daerah Sumatra yang terkenal dengan madrasahnyanya, yang diilhami oleh majlis ulama tinggi; Kedua, pendidikan agama di sekolah Sekolah negeri diisi dengan pelajaran budi pekerti. Hal ini memberi kesempatan pada guru agama Islam untuk mengisinya dengan ajaran agama, dan di dalam pendidikan agama tersebut juga di masukan ajaran tentang jihad melawan penjajah; Ketiga, Pemerintah Jepang mengizinkan berdirinya Perguruan tinggi Islam dalam bentuk Sekolah tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh KH. Wahid Hasyim, KH. Muzakkar, dan Bung Hatta.⁸⁹ Walaupun

⁸⁷ Harry J. Benda, *Bulan Sabit Dan Matahari Terbit : Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980).p. 142, 147.

⁸⁸ Ahmad Syafii Maarif, *Islam Dan Politik*, ed. Imron Nasri (Yogyakarta: Volume Yogyakarta, 2018). p. 20.

⁸⁹ Haji Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam : Napaktilas Perubahan Konsep, Filsafat Dan Metodologi Dari Era Nabi SAW Samapi Ulama Nusantara* (Jakarta: Kalam Mulia, 2011).

Jepang berusaha mendekati umat Islam dengan memberikan kebebasan dalam beragama dan dalam mengembangkan pendidikan, namun maksud dari pemerintah Jepang tidak lain hanyalah upaya Jepang menyusun kekuatan dari umat Islam dan nasionalis Indonesia agar dapat dibina demi kepentingan perang Asia Timur Raya yang dipimpin oleh Jepang. Dunia pendidikan yang seharusnya dikembangkan tetapi secara umum terbengkalai. Para siswa di sekolah tiap harinya hanya disuruh gerak badan, baris-berbaris, bekerja bakti (romusha), bernyanyi dan lain sebagainya, sehingga praktis mereka tidak mendapatkan pengajaran yang layak sebagaimana mestinya.⁹⁰ Dengan demikian, secara umum kuantitas pendidikan Islam dapat berkembang dengan baik, namun secara kualitatif pendidikan Islam mengalami penurunan.⁹¹

Ketika Jepang menduduki Daerah Banjar, mereka menemukan sistem pendidikan kolonial Belanda yang mendidik rakyat sesuai dengan status sistem yang berlaku dalam masyarakat kolonial serta disesuaikan untuk kebutuhan masyarakat jajahan. Sistem pendidikan kolonial yang ada dipandang tidak menguntungkan oleh pemerintah pendudukan Jepang, khususnya bagi kepentingan perangnya, karena hasil pendidikan dari sistem yang ada tidak dapat diharapkan untuk dapat menunjang perang mereka dan untuk membentuk lingkungan kemakmuran Bersama Asia Timur Raya sesuai dengan cita-cita *Hakko I Ciu*. Untuk itu, dalam waktu yang singkat Jepang berhasil mengkonsolidasikan kekuatan, sistem pendidikan model Belanda segera diubah dan disesuaikan dengan keperluan tersebut di atas. Penekanan dari cara

⁹⁰ Zuhairini. et.all, *Sejarah Pendidikan Islam*, 1st ed., vol. 11 (Jakarta: Bumi Aksara, 2018). p. 150-152.

⁹¹ Fogg, *Spirit Islam Pada Masa Revolusi Indonesia.*, p. 20.

pendidikan yang diberikan adalah disiplin dan rasa patriotisme (kedaerahan) dan Japanisasi kebudayaan. Di sekolah-sekolah bahasa Indonesia dipergunakan sebagai bahasa pengantar sedang bahasa Jepang diajarkan sebagai bahasa utama. Rakyat diberikan kesempatan untuk sekolah dan diskriminasi pendidikan yang dilakukan di masa pemerintah Hindia Belanda dahulu dihapuskan. Penyelenggaraan sekolah ditangani langsung oleh Jepang kurikulumnya lebih ditekankan pada hal-hal yang berhubungan dengan usaha Japanisasi generasi muda seperti disiplin militer, lagu-lagu Jepang, gerak badan dan upacara bendera Hinomaru., penghormatan pada *Tenno Heika* serta penggunaan bahasa Jepang. Jumlah sekolah bertambah secara signifikan dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu tiga tahun telah bertambah sekolah dari tahun 1942 hingga 1945 jumlah sekolah dari 196 buah menjadi 525 buah dengan berbagai jenis sekolah.⁹²

Meskipun tampaknya ada keberpihakan kepada umat Islam, namun semua itu hanya sebuah taktik yang dilakukan untuk mendapatkan simpati dan bantuan rakyat Indonesia untuk kepentingan memenangkan peperangan yang dilakukan oleh Jepang. Jika dilihat pada kondisi pendidikan, justru keadaan berbalik dengan adanya penambahan kesempatan belajar tersebut. Pada masa pendudukan Jepang itu kondisi pendidikan Islam dapat dikatakan agak memperititinkan. Dengan adanya pelarangan oleh pemerintahan Jepang terhadap semua kegiatan partai dan organisasi politik sosial lainnya, dalam bentuk apa pun kecuali organisasi bentukan pemerintah pendudukan Jepang, maka demikian praktis aktivitas organisasi keagamaan, seperti Sarikat Islam Musyawaratutthalibin, Muhammadiyah, dan NU yang banyak mengelola

⁹² Idwar, *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*. p. 94.

pendidikan juga dapat dikatakan tidak bisa berkembang bahkan ada yang mati suri,⁹³ bahkan sejak tahun 1942 Musyawaratutthalibin sudah dinyatakan berakhir.⁹⁴

Pada sekolah-sekolah yang dikelola oleh pemerintah Jepang tidak diberikan pelajaran Agama (baik Agama Islam maupun Agama Kristen), murid-murid sekolah hanya diizinkan untuk mengikuti pelajaran Agama yang diberikan di luar sekolah, seperti yang diberikan oleh para ulama dengan sistem tradisional.⁹⁵ Meskipun para ulama diberikan kebebasan untuk memberikan pelajaran agama kepada masyarakat di langgar-langgar dan di mesjid-mesjid, namun dengan catatan harus memberikan pelajaran sambil mempropagandakan kepentingan Jepang. Beberapa madrasah/pesantren ditutup, seperti Pesantren Nurul Islam di Amuntai dan Darussalam di Martapura ditutup oleh pemerintah Jepang. Dengan demikian para ulama atau guru-guru agama Islam pada berbagai lembaga pendidikan Islam hanya bisa mencari jalan sendiri untuk mengajarkan agama, yakni dengan mengusahakan pelajaran di rumah-rumah.⁹⁶

Kondisi pendidikan masyarakat di Daerah Banjar yang terjadi dan dialami pada masa pendudukan Jepang ini juga memperkuat umat Islam melalui para ulama dan tokoh masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan Islam yang lebih baik dan lebih maju, lebih-lebih kemudian ketika Indonesia memproklamkan kemerdekaannya.

⁹³ Idwar, p. 94.

⁹⁴ Maksun, "Musyawaratutthalibin , Organisasi Islam Lokal Terbesar Di Kalimantan Selatan."

⁹⁵ Idwar, *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*. p.101.

⁹⁶ Idwar, p. 104.

3. Situasi dan Kondisi Pendidikan Islam Pasca Proklamasi Kemerdekaan RI (Sebelum Berdirinya SMIP-1946).

Sepeeninggal pemerintah pendudukan Jepang dan diproklamasikannya Kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 pemerintah Kolonial Belanda berupaya untuk menguasai Borneo (Kalimantan) sebagai bagian dari daerah jajahan Belanda. Hal itu memaksa rakyat Kalimantan, khususnya di Daerah Banjar untuk kembali berjuang melalui berbagai cara menghadapi NICA hingga tercapainya kemerdekaan Kalimantan pada bulan April 1950, yakni dengan kembali sepeiruhnya daerah Kalimantan sebagai bagian dari Republik Indonesia yang memproklamasikan diri pada tanggal 17 Agustus 1945 itu.⁹⁷

Kondisi ingin kembalinya pemerintahan kolonial Belanda itu tentu tidak menguntungkan bagi rakyat Borneo, khususnya di Borneo Selatan atau Daerah Banjar, yang telah bertekad untuk segera memecahkan problema keterbelakangan pendidikan, baik yang disebabkan oleh pemerintah colonial Belanda maupun Jepang setelah tercapainya kemerdekaan. Oleh karena itulah, maka rakyat Daerah Banjar di samping harus berjuang melawan pendudukan kembali pemerintah Belanda, juga harus tetap berupaya untuk mewujudkan cita-cita yang termaktub dalam isi proklamasi kemerdekaan, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan.

Tekad untuk mendirikan pendidikan Islam yang lebih berkualitas untuk mengisi kemerdekaan tersebut, disebabkan kondisi pendidikan rakyat daerah Banjar utamanya umat Islam yang masih sangat

⁹⁷ Idwar., p. 123.

memperhatikan. Beberapa kondisi yang tergambar, khususnya yang dilihat oleh para pendiri SMIP-1946 ialah:

- 1) Pemerintah Kolonial Belanda melalui NICA beberapa sekolah yang sebelumnya dirumah namanya oleh Pemerintah Pendudukan Jepang dikembalikan namanya seperti ketika pemerintahan Kolonial Belanda, seperti: (1) Sekolah tingkat dasar kembali *Hustsu Tjo Gakko* dikembalikan menjadi *MOLU*, tetapi dengan bahasa pengantar Bahasa Indonesia. Bahas Belanda diajarkan Kembali; (2) Sekolah Guru tingkat *Kyoi Yoseijo* 2 tahun Kembali menjadi *Cursus Volke Onderwijer (CVO)*, sedangkan sekolah guru 4 tahun *Siban Gakko* menjadi *Normalschool*; (3) Selain itu ada sekolah guru yang bernama *Voor Volk Onderwijzer*.⁹⁸
- 2) Keberadaan lembaga pendidikan Islam tidak banyak yang bertahan dan bisa Kembali setelah dibekukan oleh pemerintah Pendudukan Jepang. Beberapa lembaga pendidikan Islam yang kembali bisa eksis seperti lembaga pendidikan Rasyidiyah di Amuntai, Darusslam di Martapura, PPI di Barabai, Ashriyah di Banjarmasin, dan sejumlah lembaga pendidikan Muhammadiyah. Sedangkan lembaga pendidikan yang dikelola oleh *Musyawatuthalibin*, banyak sekali yang tutup dan tidak bisa eksis kembali atau berubah dikelola oleh perorangan dan masuk menjadi bagian dari lembaga pendidikan yang dibawah naungan NU.
- 3) Jumlah lulusan sekolah Islam tingkat dasar/ibtidaiyah jumlahnya cukup banyak yang disebabkan pada masa pemerintahan kolonial

⁹⁸ Ramli Nawawi. dkk., *Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Selatan.*, p. 99.

Belanda dan Jepang tidak dapat melanjutkan karena diskriminasi dan keterbatasan lembaga pendidikan lanjutan yang ada seperti madrasah tsnawiyah dan *wosthaschool* dan sejenisnya.

- 4) Kelemahan penguasaan ilmu pengetahuan umum sangat dirasakan oleh kalangan umat Islam, sebagai akibat tidak diberikannya pengetahuan umum yang cukup di lembaga-lembaga pendidikan Islam dan sangat terbatasnya umat Islam yang dapat mengikuti pendidikan yang dikelola oleh pemerintah Kolonial Belanda yang nota bene telah memberikan ilmu pengetahuan umum yang lebih baik.
- 5) Dikotomi ilmu pengetahuan baik dalam tataran pemikiran dan praktik masih terdapat di kalangan umat Islam. Masih ada yang berpandangan bahwa ilmu pengetahuan umum itu haram karena berasal dari orang kafir atau paling tidak itu hanya untuk kepentingan dunia dan urusan dunia.
- 6) Selain itu, sebagaimana dikemukakan dalam latar belakang berdirinya SMIP-1946, bahwa pada saat itu atau sebelum SMIP-1946 didirikan, belum ada sekolah Islam yang bertingkat menengah pertama yang didirikan oleh umat Islam di Daerah Banjar.⁹⁹

C. Motivasi Modernisasi dalam Pendirian SMIP-1946

Dalam buku sejarah “Lima Puluh Tahun SMIP-1946 dituliskan” bahwa:

Kesadaran untuk berbangsa dan bernegara yang merdeka serta hasrat ingin lepas dari belenggu penjajahan adalah salah satu latar belakang utama yang mendukung bangkitnya semangat pengabdian yang tinggi dari para pendirinya, yang ingin mendarmabaktikan diri mereka

⁹⁹ Penyusun, *Lima Puluh Tahun "SMIP-1946.*, p. 4.

dalam usaha perjuangan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang mereka kaitkan dengan ibadah kepada Allah SWT.¹⁰⁰

Dari ungkapan tersebut setidaknya ada tiga motivasi utama yang menjadi latar belakang lahirnya gagasan pendirian SMIP-1946 ini, yaitu: 1. Motivasi ibadah kepada Allah dan pengabdian kepada masyarakat yang tulus dan ikhlas; 2. Semangat perjuangan untuk kemerdekaan; 3. Semangat untuk mengisi kemerdekaan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa.

1. Motivasi Ibadah Kepada Allah dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Tulus dan Ikhlas.

Bagi para ulama dan guru agama setiap pemikiran dan tindakan atau aktivitas senantiasa tidak lepas dari upaya untuk mengabdikan kepada Allah SWT. Hal itu sesuai dengan keyakinan dan pandangan hidup sebagai seorang muslim yang shaleh, yakni mengabdikan kepada Allah sebagai “abdullah” dan memberikan manfaat kepada masyarakat sebagai “khalifatullah”.

Selain dilatarbelakangi oleh semangat pengabdian atau ibadah kepada ALLAH SWT, SMIP-1946 juga didirikan sebagai pengabdian kepada masyarakat atau sebagai wahana untuk memberikan pembinaan masyarakat, sebagaimana ditulis oleh H.M. As`ari dalam “Sejarah Singkat SMIP-1946”, “tujuan didirikannya SMIP ini oleh para pendirinya dirumuskan sebagai usaha untuk menciptakan manusia

¹⁰⁰ Penyusun., p. 5

muslim yang-benar-benar dapat menjadikan dirinya sebagai hamba Allah sekaligus juga hamba masyarakat.¹⁰¹

Motivasi ibadah kepada Allah dan Pengabdian kepada masyarakat ini tentu juga dapat dilihat dari apa yang dilakukan oleh para pendirinya dalam mengelola SMIP 1946 ini di awal berdirinya. Sebagaimana dinyatakan: hasrat untuk mendirikan SMIP-1946 terwujud berkat niat yang ikhlas serta kerja keras para pendiri. Dengan bermodalkan uang yang berasal dari hasil pasar amal (bazar) yang mereka adakan pada waktu itu, yang berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp. 3.000 (Tiga Ribu Rupiah) dari para dermawan dan penyumbang.¹⁰² Selain itu, semangat pengabdian ini ditunjukkan bahwa para pendiri dan sekaligus pengelola serta sebagai guru tidak digaji, sebagaimana dinyatakan dalam buku “Lima Puluh Tahun SMIP-1946:

Pada waktu awal berdirinya, hampir semua pengajar SMIP lebih banyak berkorban secara sukarela atau menerima imbalan yang tidak menentu. Hal itu disebabkan karena uang SPP yang diperoleh pada saat itu lebih banyak dipergunakan untuk keperluan membeli alat-alat kantor dan juga;at tulis. Jika kebetulan ada kelebihannya barulah dibayarkan untuk honor guru.¹⁰³

Di antara para pengajar yang telah membaktikan dirinya pada tahun-tahun pertama itu antara lain: 1) H.M. Hanafie Gobit, 2) H. Khatib Syarbaini Yasir, 3) Abdurrahman May, 4) Fajar Sidik, 5) A.A. Rivai, 6) Marwan Ali, 7) Kamaruddin Thalib, 8) H. Hasan Mugni Marwan, 9) H. Jailani Sahari, 10) H. Muhammad Dahlan, 11) M. Ruslan, 12) H. Abdurrahman Islamil, 13) Abu Bakar Razy, 14) As`ad, 15)

¹⁰¹ Asy`ari, “Sejarah Singkat SMIP 1946.”, p. 2

¹⁰² Penyusun, *Lima Puluh Tahun "SMIP-1946.*, p. 4.

¹⁰³ Penyusun., p. 7.

Ardiansyah Ideham, 16) Abdullah Yazidi, 17) Bustami, dan 18) H. Tarmizi Abbas.¹⁰⁴

2. Semangat Perjuangan untuk Merdeka

Secara resmi SMIP-1946 Banjarmasin berdiri pada tanggal 15 Oktober 1946 M. bertepatan dengan tanggal 20 Dzul Qa`dah 1365 H di Banjarmasin. Dengan demikian, jika dilihat dari tahapan perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan ia berada pada masa revolusi (1945-1949), yakni perjuangan bangsa Indonesia untuk mengusir kolonial Belanda untuk berkuasa kembali di Indonesia pasca kekalahan Jepang. Tanggal 15 Agustus Jepang menyerah kalah kepada Sekutu. Tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamkan kemerdekaanya, yang ditindaklanjuti dengan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara, menunjuk Presiden dan Wakil Presiden serta menetapkan pembagian wilayah negara atas beberapa propinsi. Salah satu propinsi itu adalah Kalimantan dengan Gubernurnya Ir. Pangeran Muhammad Noor.¹⁰⁵ Akan tetapi setelah perundingan Linggarjati tanggal 15 Nopember 1946 yang kemudian kesepakatannya ditandatangani 25 Maret 1947, salah satu diktum dari perjanjiannya tersebut menyatakan bahwa: "Pengakuan Belanda secara de facto atas eksistensi Negara Republik Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura,"¹⁰⁶ Isi perjanjian ini telah menapikan Kalimantan sebagai bagian dari Indonesia yang diakui kemerdekaanya.

¹⁰⁴ Penyusun., p. 7.

¹⁰⁵ Idwar, *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan.*, p. 107-108

¹⁰⁶ Tim CNN Indonesia, "Sejarah Perjanjian Linggarjati: Isi Dan Hasil," 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210608135009-31-651711/sejarah-perjanjian-linggarjati-isi-dan-hasil-perundingan.%0A>.

Dampak dari tidak dimasukkannya Kalimantan sebagai bagian dari wilayah kemerdekaan Indonesia dan gencarnya upaya Pemerintah Kolonial Belanda untuk Kembali menguasai Kalimantan tentu merupakan pukulan dan sekaligus telah memicu semangat perjuangan masyarakat Kalimantan untuk berjuang lebih keras lagi guna mendapatkan Kemerdekaannya. Suasana kebatinan masyarakat Kalimantan ini tentu tidak terkecuali yang dirasakan oleh para pendiri SMIP-1946 yang baru kurang lebih 1 bulan meresmikan pendiriannya.

Kesadaran dan semangat pengabdian yang diperlihatkan oleh para tokoh pendiri SMIP-1946 dalam memperjuangkan kemerdekaan yang dilakukan melalui pendirian SMIP-1946 ini dibuktikan dengan menjadikan SMIP-1946 sebagai wahana untuk perjuangan kemerdekaan. Hal itu bukan saja oleh para pendirinya tetapi juga oleh para siswanya. Dalam sebuah ceritera yang pernah dituturkan oleh keluarga H.ahmad di Alalak, bahwa pernah suatu ketika K.H. M. Hanafie Gobit ingin dibunuh oleh Belanda dengan cara menenggalamkan jukung (sampan) yang ditumpangi beliau ketika hendak menyampaikan dakwah di pelosok Banjar, namun beliau ternyata bisa selamat. Hal itu karena beliau dipandang sebagai sosok ulama dan pendiri SMIP-1946 yang senantiasa mengobarkan semangat perjuangan untuk melawan penjajahan Kembali colonial Belanda. Selain itu, Khatib Syarbaini Yasir sebagai Kepala SMIP-1946 pada tanggal 08 Desember 1946 menjadi salah seorang pendiri dan pengurus (Ketu II) Serikat Muslimin Indonesia (SERMI) sebagai salah satu organisasi politik yang aktif dalam melakukan perjuangan diplomatik dalam memperjuangkan kemerdekaan Kalimantan.

Dalam rangka membangun semangat perjuangan bagi para siswa-siswa SMIP-1946 Khatib Syarbaini Yasir selaku Kepala sekolah selalu menggelorakan semangat perjuangan ini, utamanya ketika kegiatan muhadharah. Beliau selalu menekankan bahwa didirikannya SMIP-1946 adalah sebagai usaha untuk menciptakan manusia muslim yang benar-benar dapat menjadikan dirinya sebagai hamba Allah sekaligus juga hamba masyarakat, yang dengan istilah beliau “menjadi budak Allah dan budak masyarakat”,¹⁰⁷ atau yang dalam rumusan tujuan pendidikan SMIP menjadi lulusan yang “berdedikasi tinggi terhadap nusa, bangsa dan agama”.¹⁰⁸ Dorongan semangat perjuangan pengabdian tersebut telah berhasil membakar semangat para siswa SMIP-1946 untuk ikut berjuang merebut kemerdekaan Kalimantan. Hal itu sebagaimana ditulis oleh H. M. Asy`ari sebagai siswa Angkatan ke 2 (tahun 1947):

Putra-putri asuhan SMIP di kala itu banyak yang melibatkan diri dalam gerakan perjuangan bersenjata merebut kemerdekaan di daerah. Banyak wajah-wajah tua yang sebagiannya kini sudah keriput itu, dulunya adalah wajah-wajah remaja pemberani yang ikhlas menerima tantangan al-maut. Mereka tercatat sebagai anggota kesatuan gerilia yang mereka namakan sendiri dengan sebutan AKSI (Angkat Kesatuan Siswa Indonesia) yang tergabung dalam ALRI Divisi IV. Organisasi ini adalah satu-satunya kesatuan gerilia pelajar di daerah ini yang paling aktif beroperasi dan juga satu-satunya yang terbesar serta terorganisir dengan rapi. Seluruh pimpinan dan anggota teras yang dikerahkan dalam kegiatan operasi di lapangan adalah seluruhnya terdiri dari pelajar SMIP di kala itu.¹⁰⁹

Hal tersebut di atas membuktikan bahwa SMIP tidak hanya sekedar tempat belajar mencari ilmu untuk menyiapkan generasi yang cerdas dan berakhlak, , tetapi juga sebagai tempat membina kader

¹⁰⁷ Penyusun, *Lima Puluh Tahun "SMIP-1946.*, p. 5.

¹⁰⁸ Penyusun., p. 5.

¹⁰⁹ Asy`ari, “Sejarah Singkat SMIP 1946.”, p. 2-3

pejuang militan yang siap dengan ikhlas berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan bangsa.¹¹⁰

Gagasan menjadikan sekolah sebagai wahana untuk menumbuhkan semangat perjuangan membela negara, sebagaimana dikembangkan oleh SMIP-1946 ini mirip dengan pemikiran Rif'ah Badawi Rafi Al-Tahtawi (1801-1873) seorang pembaharu pendidikan pertama di Mesir, yang diduga juga mempengaruhi pemikiran para pembaharu SMIP-1946 ini. Sebagaimana dikutip oleh Harun Nasution dari salah satu buku yang ditulis oleh al-Tahtawi yang berjudul "*Al-Mursyidul Amin Lil Banat wal Banin*", bahwa tujuan pendidikan bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi terutama untuk membentuk rasa kepribadian dan untuk menanamkan rasa patriotisme (*hubbul wathan*). Patriotisme adalah dasar yang penting dan kuat untuk mendorong orang mendirikan suatu masyarakat yang mempunyai peradaban. Dalam kewajiban seorang terhadap tanah airnya termasuk mengadakan persatuan, tunduk kepada undang-undang dan sedia mengorbankan harta dan diri. Di antara hak-hak-hak yang terpenting bagi seorang warga negara ialah kemerdekaan, karena kemerdekaanlah yang dapat mewujudkan masyarakat yang sejati dan patriotism yang kokoh.¹¹¹

Apa yang dilakukan oleh SMIP-1946 menjadikan salah satu misi sekolah sebagai wahana perjuangan revolusi tersebut memperkuat tesis Kevin W. Forgg, bahwa revolusi perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak lain adalah merupakan "revolusi Islam Indonesia". yaitu perjuangan melawan kembalinya kekuasaan Belanda

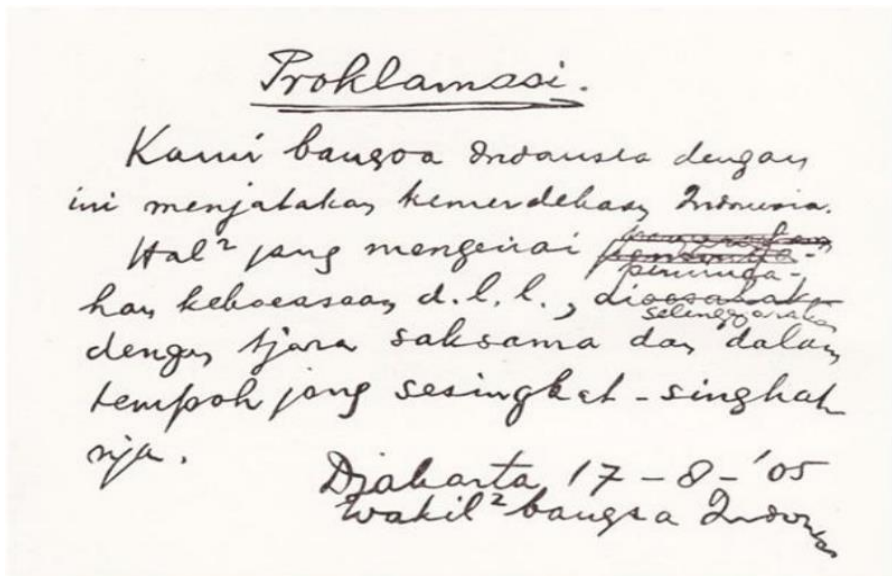
¹¹⁰ Asy'ari., p. 2-3.

¹¹¹ Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran Dan Gerakan.*, p. 42-49.

yang dipandang sebagai perang kemerdekaan kaum santri untuk tujuan-tujuan Islam dan diorganisir dengan cara-cara Islam.¹¹²

3. Semangat untuk Mengisi Kemerdekaan Melalui Upaya Mencerdaskan kehidupan Bangsa

Ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka salah satu yang terpikirkan oleh bangsa Indonesia, termasuk di Daerah Banjar adalah apa saja upaya yang harus dilakukan untuk mengisi kemerdekaan tersebut dengan sebaik-baiknya yang dilakukan secara mandarin oleh bangsa Indonesia sendiri dalam waktu yang secepatnya. Hal itu secara jelas tertuang dalam Teks Proklamasi, sebagai berikut:



Untuk mengambil alih pemerintahan dan mengisi kemerdekaan tersebut tentu bukanlah suatu hal yang mudah, lebih-lebih dalam kondisi

¹¹² Fogg, *Spirit Islam Pada Masa Revolusi Indonesia.*, p. 21.

masyarakat Indonesia yang telah lama dijajah dan tidak mendapatkan kebebasan dan kesempatan yang baik dalam pembinaan sumber daya manusianya. Keterbatasan sumber daya itulah salah satu yang menjadi perhatian utama dari para pemuka masyarakat untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang dapat mencetak tenaga terdidik yang pada gilirannya dapat mengisi kemerdekaan tersebut dengan sebaik-baiknya. Sehubungan dengan itu, dapat dinyatakan bahwa pendirian SMIP di tahun 1946 ini adalah merupakan bagian dari cita-cita tersebut, yakni mengisi kemerdekaan (pemindahan kekuasaan dll) melalui upaya mencerdaskan umat Islam untuk dapat mengambil peran dalam mengisi kemerdekaan yang telah diproklamirkan. Motivasi inilah yang kemudian menjadi landasan untuk melahirkan gagasan model SMIP dengan segala atribut gagasannya.

Motivasi dari para penggagas, yang notabene para ulama dan pejuang kemerdekaan, tentu sangat beralasan jika mengutip pendapatnya Kevin W. Fogg (2020) yang menyebut “revolusi Islam Indonesia” yang mengisyaratkan bahwa umat Islam (kaum santri) harus dapat mengambil haknya dari perjuangan kemerdekaan yang diraih dengan perjuangan dan pengorbanan yang sangat besar dari kaum muslimin. Sebagaimana Ia mengartikan bahwa revolusi Islam Indonesia memiliki dua pengertian:

Pertama, dalam memandang perang kemerdekaan, kaum santri yang berjuang melawan Belanda sebagai perjuangan untuk tujuan-tujuan Islam dan mengorganisasi diri dengan cara-cara Islam. Jadi, perubahan negara yang terjadi melalui perjuangan militer memiliki cita rasa islami bagi Sebagian partisipan yang lumayan besar (antara seperempat sampai setengah rakyat Indonesia jika merujuk data tentang kaum santri tahun 1950-an). Kedua, dalam memandang revolusi politik dengan berdirinya

sebuah negara baru, ada transformasi-transformasi fundamental dalam ahal Islam memengaruhi politik dan dalam hal politik memengaruhi kehidupan Islam. Transformasi-transformasi ini menyebabkan sebuah revolusi dalam praktik dan pemahaman Islam di Indonesia, mengonsolidasi struktur-struktur untuk menerapkan ortodoksi yang didefinisikan negara, mendahulukan non-ulama sebagai pemimpin politik untuk masyarakat Muslim, dan memecah kesatuan politik kaum santri.¹¹³

Para penggagas SMIP-1946 yang notabene para pendidik (yang tergabung dalam PGSI dan sebagai tokoh masyarakat yang ikut berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, khususnya kemerdekaan Kalimantan, tentu upaya yang paling terpikirkan adalah upaya mengisinya melalui jalur pendidikan. Sehubungan dengan itulah SMIP-1946 ini didirikan. Secara jelas hal ini sebagaimana tertulis dalam buku Lima Puluh Tahun “SMIP-1946”, bahwa salah satu latar belakang didirikannya sekolah ini adalah dalam rangka “usaha perjuangan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa” atau “menghasilkan para alumnus SMIP yang tidak hanya menjadi putra-putri yang cerdas dan terampil, tetapi juga bertaqwa, berbudi pekerti luhur serta berdedikasi tinggi terhadap nusa dan bangsa.”¹¹⁴

Motivasi mengisi kemerdekaan melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendirian lembaga pendidikan SMIP-1946 ini tentu juga tidak lepas dari kesadaran akan pentingnya merubah nasib rakyat Indonesia yang telah mendapatkan diskriminasi dan pembatasan

¹¹³ Fogg, p. 21-22.

¹¹⁴ Penyusun, *Lima Puluh Tahun "SMIP-1946*., p. 5.

untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda dan Pendudukan Jepang yang berdampak pada kondisi kualitas pendidikan rakyat Indonesia yang memprihatinkan pada awal kemerdekaan.

BAB IV

GAGASAN MODERNISASI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM MODEL SMIP-1946 BANJARMASIN

Sebagaimana dikemukakan pada bab pendahuluan bahwa modernisasi pendidikan Islam di Indonesia telah dimulai sejak awal abad ke-20, yang dimotori oleh para ulama dan guru agama Islam. Demikian juga apa yang terjadi di Daerah Banjar, sebagaimana yang dilakukan pertama kali oleh para ulama dan guru agama Islam, baik secara perorangan maupun yang tergabung dalam sebuah organisasi. Gagasan modernisasi pendidikan Islam tersebut lebih banyak dilakukan di era pemerintahan kolonial Belanda dan kemudian terhenti ketika era pendudukan pemerintah Jepang, selanjutnya baru mulai bangkit ketika Indonesia memproklamkan kemerdekaannya tahun 1945. Namun karena situasi yang belum stabil karena upaya pemerintah kolonial Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia (yang disebut era revolusi 1945-1949), maka modernisasi yang muncul di era ini masih sangat sedikit. Salah satu dari upaya modernisasi pendidikan Islam yang muncul pada era ini di daerah Banjar ialah lahirnya gagasan pendirian SMIP-1946 dengan model dan beberapa gagasan yang berbeda dengan model gagasan modernisasi pendidikan Islam yang dilakukan pada era sebelumnya.

Ada beberapa gagasan model modernisasi pendidikan Islam yang dilakukan pada pendirian SMIP-1946 ini, yaitu:

A. Gagasan Mendirikan Lembaga Pendidikan Islam Tingkat Menengah

Gagasan awal pendirian lembaga pendidikan Islam ini sesungguhnya tidak diniatkan atau dimaksudkan hanya untuk mendirikan sekolah Islam tingkat pertama saja, tetapi meliputi juga sekolah menengah tingkat atas (SMIA) dan Sekolah Guru Pendidikan Islam (SGPI), sebagaimana terlihat pada gambar di bawah.



Pembangunan gedung SMIP 1946 Jl. Masjid Surgi Mufti Banjarmasin.

CS Dipindai dengan CamScanner

Akan tetapi, karena realitas kebutuhan dan tuntutan pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang paling mendesak dan diperlukan pada saat itu, maka pada tahun 1946 tersebut baru dapat diwujudkan mendirikan sekolah menengah tingkat pertama (SMIP). Untuk tidak menghilangkan semangat mendirikan SMIA dan SGPI, maka misi tersebut tetap menjadi perhatian dalam pendirian SMIP, sebagaimana yang dapat digambarkan pada berbagai gagasan kurikulum yang dipakai dalam SMIP-1946 di periode awal berdirinya, yang akan dijelaskan dalam uraian berbagai gagasan berikut.

1. Gagasan Memilih Nama “Sekolah Menengah Islam Pertama”.

Para penggagas pendirian SMIP-1946 telah sepakat memberi nama lembaga pendidikan yang mereka dirikan dengan nama “Sekolah Menengah Islam Pertama disingkat “SMIP”. Pengambilan nama atau sebutan “sekolah menengah Islam pertama” ini dapat dinyatakan sebagai sebuah bentuk nama atau sebutan baru bagi nama sebuah lembaga pendidikan Islam. Dikatakan baru karena pemakaian nama “sekolah” untuk lembaga pendidikan Islam belum pernah dipakai sebelumnya di daerah Banjar. Istilah yang dipakai untuk nama lembaga pendidikan Islam sebelumnya umumnya menggunakan bahasa Inggris, Belanda atau Arab, tidak menggunakan bahasa Indonesia, seperti: “Arabiche School”, “Wostha School” dan “Madrasah Tsanawiyah”.

Berkaitan dengan pengambilan nama “sekolah menengah Islam Pertama” ini, secara spesifik gagasan yang perlu ditelusuri atas pengambilan nama: Pertama, penggunaan nama dengan istilah “sekolah Islam”, bukan mengambil nama Madrasah atau “Arabische School”, dan lainnya sebagaimana banyak dipakai modernisasi pendidikan Islam dari awal abad ke-20 hingga pertengahan atau mengambil nama seperti nama lembaga pendidikan sederajat yang dipakai oleh Pemerintah Kolonial Belanda, seperti, MULO (*Meer Uitgebreid Lager Ondervijis*), *Kweekschool* yang merupakan sekolah umum tingkat pertama yang dipakai oleh Pemerintah Jepang; Kedua, kebijakan mendirikan “sekolah menengah tingkat pertama”

a. Penggunaan Nama “Sekolah Islam”.

Penggunaan istilah atau nama “sekolah Islam” oleh SMIP-1946 pada saat itu (tahun 1946), dapat dinyatakan sebagai istilah yang baru

untuk lembaga pendidikan Islam bahkan sekolah umum di Daerah Banjar. Belum ada organisasi Islam, seperti SI, Muhammadiyah, *Musyawatutthalibin*, PPI, dan organisasi atau pengelola lembaga pendidikan Islam di Daerah Banjar sebelumnya yang menggunakan nama untuk sekolahnya dengan nama “sekolah Islam”. Sebagaimana dikemukakan oleh Ramli Nawawi, dkk dalam bukunya ‘Sejarah Pendidikan Dearah Kalimantan Selatan’, penggunaan nama SMP untuk sekolah menengah tingkat pertama baru ada sejak tahun 1950, setelah Indonesia memiliki pengakuan penuh oleh Pemerintah Belanda atas kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada 17 agustus 1945. Nama SMP tersebut merupakan kelanjutan dari MULO pada jaman Pemerintahan Kolonial Belanda dan ‘*Hutsu Tjo Gakko*’ jaman pendudukan Jepang di Banjarmasin yang kemudian menjadi SMP Negeri I sampai sekarang.¹¹⁵ Hanya saja tentu kapasitasnya sedikit berbeda karena tamatan MULO disamping dapat melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi juga dapat diangkat menjadi guru Sekolah Rakyat.

Istilah atau nama “sekolah Islam” yang dipakai oleh para pendiri SMIP-1946 ini tentu dapat dikaitkan dengan istilah yang diambil padanannya dari istilah “*school*” (Bahasa Inggris), yang pernah dipakai oleh pembaharu pendidikan di masa awal abad ke-20 di Sumatera Barat dan Jawa, seperti “*Adabiyah School*” tahun 1909 oleh Haji Abdullah Ahmad, ‘*Madras School*’ tahun 2010 oleh Syeck M. Umar Thaib di Batusangkar; ‘*Diniyah School*’ tahun 1915 oleh Zainuddin Labai al-

¹¹⁵ Ramli Nawawi. dkk., *Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Selatan.*, p. 102 dan 103.

Yunusi di Batu Sangkar,¹¹⁶ dan *Arabische School* oleh K.H. Abdurrasyid di Amuntai.¹¹⁷

Pemakaian istilah `sekolah Islam` untuk SMIP-1946 ini diduga atas saran dan pemikiran dari beberapa pendiri yang merupakan alumni *Islamische School* di Kampung Bugis Pasar lama, seperti K.H. Hanafie Gobit, H.M. Jasin Amin dan H. Masykur. *Islamische School* adalah lembaga pendidikan Islam yang pertama kali di bangun di Borneo Selatan (Kalimantan selatan) pada tahun 1914 yang semula bernama *arabische School*,¹¹⁸ yang menyelenggarakan pendidikan setingkat sekolah dasar.

Di samping itu, pemakaian istilah “sekolah Islam” sejalan dengan apa yang menjadi tujuan atau harapan serta muatan dari didirikannya SMIP-1946 sama sekali berbeda dengan yang dimiliki atau dilakukan oleh model-model sekolah Islam tersebut. Sebagaimana dikemukakan dalam catatan sejarah SMIP-1946 bahwa sekolah ini didirikan benar-benar digagas untuk mengintegrasikan secara penuh antara tujuan dan muatan sekolah umum (seperti MULO) dan sekolah Islam (Madrasah dan Arabic School), yang diistilahkan (50% umum dan 50% agama).¹¹⁹ Dengan kata lain, sebagai sekolah Islam yang tidak hanya menjadikan muatan mata pelajaran umum sekedar sebagai sebuah suplimen dari pelajaran agama atau sebaliknya, sebagaimana banyak dilakukan banyak dilakukan oleh lembaga pendidikan Islam sebelumnya.

¹¹⁶ Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia.*, p. 63.

¹¹⁷ Malisi, “Modernization of Islamic Education in South Kalimantan (Socio-Historical Perspective of Normal Islam Amuntai).”

¹¹⁸ Syaharuddin, *Orang Banjar (Menjadi Indonesia) Dinamika Organisasi Islam Di Borneo Selatan 1912-1942.*, p. 120-122.

¹¹⁹ Penyusun, *Lima Puluh Tahun "SMIP-1946.*

Istilah “sekolah Islam” yang dipakai oleh SMIP-1946 juga dimaksudkan untuk menyatakan atau menegaskan bahwa sekolah ini tidak sama dengan sekolah yang pernah dikembangkan oleh pemerintah Kolonial Belanda (baik pada masa ating maupun pada masa pemerintahan NICA dan pemerintahan Jepang, yaitu MULO dan *Hutsu Tjo Gakko*). Oleh karena itu kedua nama itu juga tidak dipakai. Walaupun pada saat berdirinya SMIP-1946 ini pemerintah Pemerintahan Belanda (NICA) Kembali melaksanakan pendidikan tingkat menengah pertama dengan nama MULO atas lembaga pendidikan yang sebelumnya dirubah ating oleh Pemerintah Pendudukan Jepang dengan nama *Hutsu Tjo Gakko*. Hal yang juga menjadi alasan atas tidak dipakainya kedua nama sekolah tersebut (MULO dan *Hutsu Tjo Gakko*) karena lembaga tersebut milik penjajah, yang apabila dipakai dianggap kontra dengan salah satu alasan dan misi utama atas didirikannya SMIP-1946, yakni dalam rangka upaya perjuangan untuk melepaskan bangsa Indonesia, khususnya rakyat Daerah Banjar, dari belenggu penjajahan melalui pencerdasan anak bangsa melalui jalur pendidikan Islam. Hal itu sebagaimana dikemukakan dalam buku “Lima Puluh Tahun “SMIP-1956”, bahwa berdirinya SMIP-1946 ini adalah karena adanya kesadaran dari para pendiri akan betapa pentingnya kehadiran lembaga pendidikan ini, baik ditinjau dari segi tanggung jawab seorang muslim maupun dari segi perjuangan bangsa yang ingin membebaskan diri dari belenggu penjajahan di kala itu.”¹²⁰ Selain itu, adanya kesadaran bahwa ada satu sikap yang dipegang tegus oleh masyarakat Daerah Banjar yang mayoritas beragama Islam adanya keengganan memasuki sekolah

¹²⁰ Penyusun.

Belanda atau yang bernuansa Belanda, karena dianggap salah satu misi sekolah Belanda adalah untuk mengkristenkan anak-anak mereka.¹²¹

Selain itu, hal yang juga sangat penting bahwa pengambilan pengambilan nama “Sekolah Islam” ini juga adanya upaya untuk menegaskan identitas ke-Indonesia-annya dan sebagai wujud semangat perjuangan dan pengakuan akan kemerdekaan Indonesia yakni dengan menggunakan bahasa persatuan “Bahasa Indonesia” sebagaimana salah satu isi sumpah pemuda. Alasan terakhir ini tentu sangat penting, sebab ditakutkan jika mengambil nama sekolah Belanda atau Jepang, akan terjadi penolakan dari masyarakat Daerah di Banjar.

b. Gagasan Mendirikan Sekolah “Tingkat Menengah Pertama”

Sebagaimana dinyatakan di atas, bahwa gagasan mendirikan sekolah menengah Islam tingkat “pertama” ini didasari oleh kenyataan bahwa di daerah Banjar belum ada sekolah menengah Islam tingkat pertama. Sekolah yang banyak adalah sekolah dasar (sekolah rakyat), Madrasah Ibtidaiyah. Adapun lembaga pendidikan Islam setingkat menengah pertama maupun atas yang ada sebelumnya diberi nama madrasah tsanawiyah atau madrasah *wostho*. Lembaga pendidikan Islam menengah tingkat pertama tersebut umumnya dikembangkan dalam rangka pendidikan ilmu-ilmu keislaman saja, dengan sedikit suplemen pengetahuan umum dasar.

Ada beberapa gagasan yang dapat dikatakan sebagai modernisasi pendidikan Islam pada model SMIP-1946 ini. **Pertama**, meskipun sekolah ini merupakan sekolah menengah tingkat pertama, namun realitasnya model SMIP-1946, ketika masa awal berdirinya, memiliki

¹²¹ Ramli Nawawi. dkk., *Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Selatan.*, p. 50.

keunikan tersendiri yang membedakan dengan madrasah tsanawiyah atau *wostho school* yang dipakai oleh organisasi Islam sebelumnya. SMIP-1946 ini juga berbeda dengan *MULO* (sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda atau *Hutsu Tjo Gakko'* sekolah menengah tingkat pertama yang dikelola oleh Pemerintah Pendudukan Jepang. Baik *MOLU* ataupun *Hutsu Tjo Gakko'* memberlakukan waktu belajar selama 3 tahun dan diperuntukkan untuk dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya yaitu tingkat sekolah menengah atas. Berbeda dengan kedua lembaga itu, SMIP-1946 memberlakukan masa belajar 3 tahun untuk siswa yang berasal dari latar belakang pendidikan madrasah ibtidaiyah dan yang sederajat (kelas B) dan waktu belajar selama 5 tahun untuk siswa yang berlatar belakang Sekolah Rakyat (SR sekarang setingkat SD).¹²² Selain itu siswanya juga dipersiapkan untuk dapat mengikuti ujian persamaan untuk menjadi guru Agama Islam (PGA 4 tahun) atau untuk melanjutkan ke jenjang PGA 6 tahun. Lulusan SMIP-1946 dapat juga mengikuti ujian persamaan untuk memasuki sekolah menengah tingkat atas. Selain itu, lulusan SMIP-1946 juga dapat mengikuti Sekolah Persiapan Institut Agama Islam Negeri (SP IAIN) selama 2 tahun untuk kemudian dapat melanjutkan ke IAIN, melanjutkan ke Sekolah Guru dan Hakim Agama (SGHA). Sebagai contoh Dr. H. Alfani Daud, setelah menamatkan SMIP-1946 tahun 1952 beliau melanjutkan ke SGHA Jurusan Hakim Agama, kemudian melanjutkan ke IAIN Sunan Kalijagapada dan tamat tahun 1956.¹²³

¹²² Penyusun, *Lima Puluh Tahun "SMIP-1946.*, p.5.

¹²³ Tim, *Ulama Banjar Dari Masa Ke Masa.*, p. 361.

Kedua, gagasan model sekolah menengah tingkat pertama dengan model SMIP-1946 ini didasari oleh pemikiran yang bukan saja pragmatis tetapi juga konseptual. Secara pragmatis pilihan tersebut disadari oleh kenyataan bahwa banyak sekali masyarakat yang lulusan sekolah setingkat madrasah Ibtidaiyah dan sejenisnya atau *Verfolkschool* dan *Inlandse School Door Tweedeclate* (sekolah-sekolah untuk pribumi dari Pemerintah Kolonial Belanda), atau *Djokyo Kogakko* (sekolah tingkat dasar 6 tahun masa Pendudukan Jepang) yang tidak dapat meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi berikutnya, baik karena tertutupnya kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya atau minimnya sekolah tingkat lanjutan pertama yang dimiliki Islam. Apalagi di era pendudukan Jepang, semua sekolah Islam harus dijalankan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pendudukan Jepang. Akibat dari kondisi tersebut menyebabkan sedikit sekali rakyat bumiputera yang berpendidikan setingkat sekolah menengah pertama dan di sisi lain banyak sekali lulusan madrasah ibtidayah atau sekolah Islam lainnya serta lulusan *volkschool* dan *Vervogschool* yang tidak mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya. Menurut catatan Ramli Nawawi, dkk., berdasarkan data yang terdapat dalam daftar induk sekolah (*stamboek*) peninggalan MULO Banjarmasin, yang masih tersimpan di sekolah lanjutan yang menggantikan (SMPN 1 Banjarmasin), bahwa orang Indonesia yang berkesempatan untuk sekolah di MULO hanya kurang lebih 5% dari jumlah penduduk Kalimantan Selatan, Tengah, dan Timur pada saat itu.¹²⁴ Sementara itu jumlah dan daya tampung lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah tsanawiyah dan madrasah wostho, muallimin sangat terbatas jumlahnya.

¹²⁴ Ramli Nawawi, dkk., *Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Selatan*, p. 43.

Selain alasan di atas, gagasan untuk mendirikan sekolah setingkat menengah pertama model SMIP-1946, sebagaimana dalam buku “Lima Puluh Tahun SMIP-1946, bahwa pada waktu itu belum ada sekolah Islam tingkat menengah pertama yang dikembangkan atau didirikan oleh kalangan Islam, utamanya sekolah menengah Islam tingkat pertama yang memberikan pengetahuan keagamaan dan pengetahuan umum yang seimbang (50%:50%).

Sebagaimana dipaparkan di atas, bahwa baik pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda maupun pada masa pendudukan Jepang, umumnya sekolah untuk pribumi yang diselenggarakan pada tingkat sekolah dasar atau ibtidaiyah. Selain itu lembaga pendidikan Islam yang diberi nama sekolah menengah Islam tingkat menengah pertama yang memadukan mata pelajaran umum yang seimbang seperti yang dikembangkan oleh SMIP-1946 belum ada.¹²⁵ Selain itu pula, meskipun ada beberapa organisasi Islam yang menyelenggarakan pendidikan tingkat menengah pertama, namun pada umumnya berorientasi pada pendidikan agama dengan sedikit memasukkan ilmu pengetahuan umum sebagai suplemen. Sebagai gambaran, beberapan lembaga pendidikan yang tercatat pernah ada sebelumnya:

- 1) Muhammadiyah di Daerah Banjar, selain membangun sekolah menengah tangka pertama umum ala Belanda juga sempat mendirikan sekolah Islam tingkat pertama yang diberi nama *Wostho School* dengan lama belajar 3 tahun yang diperuntukan untuk mencetak guru di lingkungan sekolah Muhammadiyah. Selain itu

¹²⁵ Penyusun, *Lima Puluh Tahun "SMIP-1946.*, p. 4.

Muhammadiyah mendirikan sekolah guru yang diberi nama Muallimin, yang belakng setara dengan PGA 6 tahun.

- 2) Musyawaratuttalibin juga sempat mendirikan madrasah tsanawiyah yang berorientasi pada pembinaan pengetahuan keagamaan dengan sedikit memasukkan ilmu pengetahuan umum. Sebelum bubar tahun 1942 yang jumlah muridnya lebih dari 500 orang.
- 3) Persatuan Perguruan Islam (PPI) sejak tahun 1935 mendirikan madrasah Tsanawiyah sebanyak 6 buah, juga lebih berorientasi pada pengetahuan keagamaan, dengan memberikan sedikit suplimen ilmu pengetahuan umum.
- 4) Taman siswa mendirikan lembaga pendidikan setingkat menengah dengan nama Taman deawasa (setingkat SMP) yang bersifat umum.
- 5) Madrasah Darussalam Martapura juga mendirikan madrasah tsanawiyah yang sudah tentu lebih berorientasi pada pengetahuan keagamaan.¹²⁶

Sebagai akibat dari banyaknya tamatan sekolah tingkat dasar yang tidak mendapatkan kesempatan mendapatkan lembaga dalam bentuk sekolah menengah tingkat pertama, khususnya yang memadukan pelajaran agama dan umum, maka SMIP-1946 ini didirikan. Secara khusus, sebenarnya yang menjadi pertimbangan pertama didirikannya SMIP-1946 ini adalah untuk menampung lulusan *Islamische School* (madrasah Ibtidaiyah) al Ashriyah Kampung Bugis dan *Islamische School* (Madrasah Ibtidaiyah) Sungai Kedaung Banjarmasin, yang mana keduanya merupakan sekolah tingkat dasar yang dikelola dan abituren

¹²⁶ Ramli Nawawi. dkk., *Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Selatan.*, p. 49-89.

dari beberapa pendiri SMIP, seperti K.H. Hanafie Gobit, H.M. Yasin Amin, dan H. Masykur. Selain itu tentu juga berdasarkan hasil peninjauan awal terhadap animo masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi setingkat menengah pertama yang ternyata sangat besar. Hal itu kemudian dibuktikan dengan sambutan masyarakat yang luar biasa untuk memasukkan anak-anaknya ke SMIP-1946 ini. Para siswa datang dari berbagai pelosok, tidak saja berasal dari Banjarmasin, tetapi berasal dari seluruh kabupaten di Kalimantan Selatan (Martapura, Rantau, Kandangan, Barabai, Tanjung, Kota baru) dan juga ada yang berasal dari Kalimantan Tengah dan Timur. Pada pendaftara pertama tahun 1946-1949, dapat dilihat sebagai berikut:

JUMLAH SISWA PENDAFTAR SMIP-1946 DARI TAHUN 1946-1949

NO	TAHUN	JUMLAH PENDAFTAR
1.	1946	168 orang Siswa Baru
2.	1947	76 orang siswa
3.	1948	159 orang siswa
4.	1949	115 orang siswa

Dikutif dari: Lima Puluh Tahun SMIP-1946.¹²⁷

Selain itu pula, siswa yang mendaftar menjadi siswa SMIP 1946, bukan saja berasal dari lulusan madrasah ibtdaiyah dan sekolah Islam lainnya serta pesantren, tetapi juga dari lulusan sekolah umum, seperti *Volkschool* dan *Vervolgschool*. Selain itu, yang mendaftar juga bukan saja lulusan baru (*presb graduate*) tetapi banyak juga lulusan yang sudah lama (berusia tua). Untuk itulah, kemudian pengelola SMIP-1946 untuk siswa

¹²⁷ Penyusun, *Lima Puluh Tahun "SMIP-1946.*, p. Lampiran X.

tahun pertama melakukan kebijakan pembagian lama belajar yang berbeda yang digolongkan menjadi kelas A dan kelas B. Kelas B adalah siswa yang berasal dari sekolah Islam dengan masa belajar selama 3 tahun, sedangkan kelas A adalah siswa yang berasal dari sekolah umum, dengan lama belajar 5 tahun.¹²⁸



Siswa-siswi SMIP-1946 Angkatan Pertama

¹²⁸ Penyusun., p. 3.

Dengan dipakainya nama “sekolah” pada SMIP-1946 ini makas sistem pendidikannya juga mengikuti model sistem sekolah, sebagaimana layaknya sebuah sekolah modern, yakni menggunakan sistem penjenjangan/kelas. Namun jenjang yang ddiapakai oleh SMIP-1946 menyesuaikan dengan pertimbangan tujuan lulusan yang dihasilkan. Dala hal ini, karena lulusan SMIP-1946 tidak saja dipersiapkan untuk sekedar lulusan setingkat menengah pertama yang kemudian dapat melanjutkna ke jenjang sekolahm menengah atas, tetai juga disipkan untuk dapat menjadi tenaga guru (pendidik) sekolah dasar atau madrasah Ibtidaiyah, maka jenjang yang dipakai pada saat itu yaitu selama empat tahun dan lima tahun. Masa belajar empat tahun diperuntukkan bagi lulusan yang berasal dari madrasah ibtidaiyah (sekolah Islam) sedangkan lima tahun untuk lulusan yang berasal dari sekolah dasar (sekolah umum). Dengan lama belajar empat dan lima tahun ini, para lulusan SMIP-1946 diharapkan siap untuk menjadi tenaga pengajar.

Sistem pendidikan modern lain yang diterapkan juga dalam bentuk menggunakan meja kursi, sistem kenaikan kelas bukan berdasarkan kitab, pemakaian guru mata pelajaran yang mampu untuk mata pelejaraan yang dikuasai, memakai buku teks mata pelajaran, pembelajaran tidak menekankan hapalan dan lain-lain.

B. Modernisasi Visi, Misi, Tujuan Pendidikan Islam Model SMIP-1946

Gagasan pendirian SMIP-1946 memiliki visi, misi dan tujuan SMIP-1946 ini juga dapat dinyatakan sebagai sebuah gagasan baru yang berbeda dengan visi, misi, tujuan lembaga pendidikan Islam sebelumnya.

Gambaran visi, misi, dan tujuan pendirian SMIP-1946 tersebut dapat dinyatakan baru dengan berbagai alasan, sebagai berikut:

1. Modernisasi Visi dan Misi Lembaga pendidikan Islam Model SMIP-1946
 - a. Gagasan tentang Visi SMIP-1946

SMIP-1946 didirikan oleh para penggagasnya bukan sekedar untuk menjawab kebutuhan pragmatis yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat muslim di daerah Banjar untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah pertama, atau karena sekedar belum adanya lembaga pendidikan Islam dalam bentuk sekolah Islam tingkat pertama di daerah ini. Akan tetapi pendirian SMIP-1946 memiliki visi dan misi yang lebih mendasar dalam konteks pembangunan umat dan bangsa yang unggul. Visi, misi, dan tujuan yang ialah untuk mengisi kemerdekaan Indonesia yang baru diproklamasikan 17 Agustus 1945 melalui upaya pendidikan bagi generasi muslim yang memiliki keunggulan yang kelak dapat mengisi dan mengambil peran utama dalam mengisi kemerdekaan tersebut. Untuk itu model yang dibangun adalah SMIP yang memadukan ilmu pengetahuan agama dan sekaligus pengetahuan umum secara seimbang dan berkualitas. Selain itu, SMIP-1946 juga dibangun untuk melayani kebutuhan pendidikan masyarakat yang inklusif, terbuka untuk semua orang dan semua golongan tanpa memandang perbedaan kelompok, pandangan dan organisasi.¹²⁹ Hal itu, sebagaimana dikemukakan dalam buku sejarah SMIP-1946, yang disebut dengan keistimewaan pendirian SMIP-1946 ini, yaitu:

¹²⁹ Penyusun., p. 1.

- a) SMIP didirikan dalam rangka merealisasikan misi pendidikan Islam untuk mencapai kesejahteraan hidup di dunia menuju kehidupan akhirat yang langgeng;
- b) SMIP didirikan juga dimaksudkan untuk mengisi kemerdekaan berbangsa dan bernegara, dalam hal ini antara lain untuk meningkatkan partisipasi masyarakat;
- c) SMIP tidak berpandangan sektarian dalam kerukunan hidup beragama. Dalam mengembangkan sumber daya manusia SMIP tidak membedakan aliran atau golongan yang ada dalam masyarakat Islam.
- d) SMIP sejak awal berdirinya tidak menyajikan kurikulum yang sempit. Kurikulum yang disajikan dalam kurikulum yang memadukan antara aspek-aspek pendidikan keagamaan dan aspek-aspek pendidikan umum yang sangat diperlukan untuk menjawab tantangan kemajuan zaman dalam kehidupan yang selalu bergerak dan berkembang.¹³⁰

b. Misi SMIP-1946

Sejalan dengan visi SMIP-1946 yang sangat visioner dan realistis tersebut dan berdasarkan apa yang menjadi latar belakang dan motivasi beririnya, dirumuskan beberapa misi SMIP-1946, sebagai berikut:

- a) Sebagai wadah pencerdasan umat untuk mengejar ketertinggalan dalam bidang pendidikan, utamanya dalam bidang pendidikan umum dan tetap memiliki basis pengetahuan agama yang kuat.
- b) Sebagai lembaga pendidikan Islam tingkat pertama yang dapat memebrikan pelayan kepada semua umat, tanpa dibatasi oleh sekat paham, organisasi, dan kelompok. Sebagaimana dinyatakan bahwa SMIP-1946 dibangun untuk semua golongan dengan tidak membeda-bedakan aliran dan paham keagamaan ada dalam masyarakat Islam.

¹³⁰ Penyusun., p. 2.

- c) Sebagai lembaga pendidikan yang juga dapat menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang amat dibutuhkan oleh masyarakat Islam pasca kemerdekaan Indonesia.
- d) Sebagai lembaga pendidikan yang mengemban tugas untuk membina para perjuangan kemerdekaan Kalimantan dari Pendudukan NICA. Hal itu sebagaimana yang diperlihatkan oleh putera-puteri asuhan SMIP di kala itu dalam melibatkan diri dalam gerakan perjuangan bersenjata merebut kemerdekaan di daerah. Mereka tercatat sebagai anggota kesatuan gerilia yang mereka namakan sendiri dengan sebutan AKSI (Angkatar Kesatuan Siswa Indonesia) yang tergabung dalam ALRI Divisi IV. Organisasi ini adalah satu-satunya kesatuan gerilia pelajar di daerah ini yang paling aktif beroperasi dan juga satu-satunya yang terbesar serta terorganisir dengan rapi. Seluruh pimpinan dan anggota teras yang dikerahkan dalam kegiatan operasi dilapangan adalah seluruhnya terdiri dari pelajar SMIP di kala itu.¹³¹

c. Tujuan Pendirian SMIP-1946

Tujuan umum berdirinya SMIP-1946 adalah “untuk menciptakan manusia muslim yang benar-benar dapat menjadikan dirinya sebagai hamba Allah sekaligus juga hamba masyarakat” SMIP-1946 diarahkan untuk dapat menciptakan lulusan yang tidak hanya menjadi putera-puteri yang cerdas dan terampil, tetapi juga bertaqwa, berbudi pekerti luhur serta berdedikasi tinggi terhadap nusa, bangsa dan agama.

Secara khusus tujuan SMIP-1946 adalah menjadikan lulusannya:

¹³¹ Asy`ari, “Sejarah Singkat SMIP 1946.”

- a. Menguasai pengetahuan agama dan juga pengetahuan umum secara seimbang
- b. Memiliki jiwa perjuangan dan nasionalisme
- c. Memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat yang kuat dan tulus.
- d. Memiliki ketrampilan berdakwah dan mendidik.¹³²

Jika dilihat tujuan di atas, tentu menarik untuk dicermati, sebab tujuan SMIP-1946 tersebut jika dibandingkan dengan tujuan sekolah menengah tingkat pertama sekarang sangat berbeda. Tentu hal semacam itu bisa dipahami, karena secara pragmatis hal semacam itu untuk saat itu sangat diperlukan. Ada kebutuhan penguasaan pengetahuan umum dengan tetap mempertahankan kualitas pengetahuan agama, ada kebutuhan membangun patriotisme untuk mempertahankan kemerdekaan, dan ada kebutuhan tenaga pendakwah dan pendidikan yang sangat dibutuhkan masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidikan yang sangat kurang bagi lembaga pendidikan Islam pada saat itu.

C. Gagasan Modernisasi dalam Muatan Kurikulum “SMIP-1946”

Jika dicermati kurikulum yang disajikan oleh SMIP-1946 pada masa awal perdirinya ada beberapa gagasan baru yang menarik untuk dicermati, yakni:

¹³² Penyusun, *Lima Puluh Tahun "SMIP-1946"*, p. 5.

1. Gagasan Muatan Mata Pelajaran Agama dan Umum yang Seimbang

Sekolah ini dapat dinyatakan sebagai lembaga pendidikan Islam modern pertama untuk sekolah menengah tingkat pertama (SMP) yang dikembangkan di Daerah Banjar, yang menggabungkan mata pelajaran umum dan mata pelajaran agama secara seimbang (50% : 50%). Diistilahkan 50% mata pelajaran umum dan 50% agama, Akan tetapi istilah itu hanya sebagai sebuah gambaran saja bahwa SMIP-1946 pendiriannya didasarkan atas upaya untuk memadukan model pendidikan umum (sekolah ala Belanda) dan model pendidikan Islam (madrasah).

Ada dua jenis kurikulum yang pernah diterapkan oleh SMIP sebelum berubah mengikuti kurikulum Nasional tahun 1975, yaitu 1. kurikulum SMIP dengan masa belajar lima tahun dan 2. Kurikulum SMIP dengan masa belajar empat tahun. Sajian keseimbangan mata pelajaran umum dan agama pada kedua kurikulum tersebut dapat dilihat sebagaimana table berikut:

KURIKULUUM SMIP DENGAN MASA BELAJAR LIMA TAHUN

No	MATA PELAJARAN KEISLAMAN	No.	MATA PELSJARAN UMUM
1.	Al Qur`an/Tajwid	1.	Bahasa Indonesia
2.	Tafsir/Tarjamah	2.	Bahasa Inggris
3.	Hadist	3.	Berhitung
4.	Musthalah	4.	Berhitung Dagang
5.	Fiqh	5.	Aljabar
6.	Ushul Fiqh	6.	Ilmu alam
7.	Tauhid	7.	Ilmu Bumi
8.	Tarikh	8.	Ilmu Hewan/Tumbuhan
9.	Imla	9.	Ilmu Kesehatan

10.	Insyah	10.	Sejarah Indonesia
11.	Qawaid	11.	Sejarah Umum
12.	Balaghah	12.	Tata Negara
13.	Muthala`ah	13.	Menggambar
14.	Mahfuzhat	14.	Ilmu Nafs/Ilmu Jiwa
15.	Adabul Lughah		
16.	Adyan		
17.	Tarbiyah		
18.	Faraidh		
19.	Akhlak		

Diolah dari sumber buku Lima Puluh Tahun”SMIP-1946”¹³³

KURIKULUUM SMIP DENGAN MASA BELAJAR 4 TAHUN

No	MATA PELAJARAN KEISLAMAN	No.	MATA PELSJARAN UMUM
I. KELOMPOK DASAR			
1.	Al-Qur`an/Tajwid	1.	Tata Negara
2.	Tauhid		
3.	Tafsir/Tarjamah		
4.	Hadits		
5.	Fiqh		
II. KELOMPOK POKOK			
6.	Ilmu Akhlak	2.	Bahasa Indonesia
6.	Ushul Fiqh	3.	Ilmu Mendidik
8.	Musthalah	4.	Sejarah Indonesia dan sejarah Umum
9.	Tarikh Islam	5.	Ilmu Hayat
10.	Bahasa Arab	6.	Pendidikan Jasmani
III. KELOMPOK PENTING			
11.	Kebudayaan Islam	7.	Ilmu Bumi (Geografi/Sosial/Ekonomi) dan Ilmu Bumi (Alam/Falak
12.	Perbandingan Agama	9.	Ilmu Pasti (Aljabar dan Ilmu Ukur)
		10.	Ilmu Alam
IV. KELOMPOK PELENGKAP			

¹³³ Penyusun., p. 21.

		11.	Berhitung
		12.	Menggambar
		13.	Seni Suara
		14.	Kesejahteraan Keluarga
		15.	Administrasi
		16.	Prakarya
V. LAIN-LAIN			
		1.	Kelakuan
		2.	Kerajinan
		3.	Kebersihan

Diolah dari sumber buku Lima Puluh Tahun”SMIP-1946”¹³⁴

Jika dilihat dari struktur mata pelajaran yang ada pada kurikulum pada masa awal pendiriannya, terdapat gagasan kurikulum yang sangat menarik untuk kedua jenis kurikulum ini. Kurikulum dengan masa belajar lima menyajikan mata pelajaran hanya sebanyak 33 mata pelajaran dan lebih besar untuk mata pelajaran keagamaan (keislaman), yaitu sebanyak 19 mata pelajaran (57,57%) dan sebanyak 14 mata pelajaran umum (42,43%). Pada kurikulum dengan masa belajar empat tahun justru menyajikan mata pelajaran yang lebih banyak, yaitu sebanyak 28 mata pelajaran. Di samping jenis mata pelajaran umum yang lebih lengkap juga ditambah dengan tiga penilaian yang bersifat metacurikuler, yaitu Kelakuan, Kerajinan, dan Kebersihan. Yang menarik dari gagasan kurikulum dengan masa belajar empat tahun ini justru porsi mata pelajaran umumnya terbalik menjadi lebih banyak, yaitu sebanyak 16 mata pelajaran (57,14%) dan 12 mata pelajaran (42,86%).

Selanjutnya jika dicermati gagasan tentang modernisasi muatan dua jenis kurikulum pada SMIP di atas, ada beberapa gagasan yang bisa dibutiri:

¹³⁴ Penyusun., p. 22.

- 1) Gagasan integrasi mata pelajaran umum kedalam lembaga pendidikan Islam yang dilakukan oleh SMIP ini dapat dinyatakan mendahului gagasan integrasi mata pelajaran umum ke madrasah yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, yakni ketika dikeluarkannya SKB 3 Menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri) pada tahun 1975, tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah, yang kemudian dikuatkan dengan SKB 2 Menteri (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama) tentang Penerapan Kurikulum mata pelajaran umum pada madrasah. Inti dari dua kebijakan tersebut adalah sebagai upaya peningkatan kualitas atau mutu pendidikan umum pada madrasah dengan memasukkan atau mengajarkan seluruh mata pelajaran yang diajarkan pada sekolah umum. Kebaruan gagasan tersebut juga dapat ditelusuri pada gagasan modernisasi muatan kurikulum yang ada pada lembaga-lembaga pendidikan Islam yang berkembang di Daerah Banjar sebelumnya, sejak masa pemerintah kolonial Belanda dan pemerintahan pendudukan Jepang, sebagaimana diuraikan pada bab tentang latar belakang lahirnya gagasan SMIP-946.
- 2) Jenis mata pelajaran agama diambil dari muatan yang lazim dianggap diperlukan untuk membina pengetahuan, keterampilan dan sikap sebagaimana yang lazim terdapat dalam kurikulum madrasah atau lembaga pendidikan Islam lainnya yang berkembang pada saat itu, yang memuat ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu alat (kebahasaan). Jika dilihat dari jenis mata pelajaran keagamaan ini, dapat dikatakan luar biasa, karena setingkat sekolah menengah pertama (madrasah tsnawiyah) mata pelajarannya bukan saja Qur-an-Hadist, Fikih,

Aqidah-Akhlak, dan SKI, tetapi jauh lebih dalam, seperti Ushul Fiqh, Faraidh, Tafsir, Adabul Lughah dan Balaghah, yang merupakan pembahasan untuk tingkat sekolah menengah atas atau sekolah tinggi.

- 3) Muatan mata pelajaran umum dimodifikasi dari muatan kurikulum seperti yang diajarkan pada MULO. Kurikulum MULO pada saat itu terdiri dari: 1. Membaca; 2. Bahasa Belanda; 3. Menulis (Okasional); 4. Berhitung dan Matematika; 5. Sejarah (Belanda dan Jajahan); 6. Sejarah (Dunia); 7. Geografi; 8. Ilmu Alam; 7. Bahasa Perancis; 8. Bahasa Inggris; 9. Bahasa Jerman; dan 10. Menggambar.¹³⁵

Ada yang menarik jika dicermati sajian kurikulum SMIP-1946 di atas jika dibandingkan dengan MULO, yakni meniadakan mata pelajaran Bahasa Belanda, Sejarah Belanda dan Jajahan, Bahasa Perancis dan Jerman. Hal ini dapat dipahami, sebagai wujud dari misi sebagai sekolah perjuangan untuk merebut kemerdekaan dari penjajahan.

- 4) Hal lain yang cukup penting untuk dicatat dari modernisasi struktur kurikulum SMIP-1946 di atas adalah adanya upaya untuk memandang dan menempatkan mata pelajaran agama dan umum secara setara atau tanpa dikotomik. Hal itu dapat dilihat dari penamaan kelompok mata pelajaran pada SMIP-1946 dengan program belajar empat tahun, yakni pada setiap kelompok di dalamnya terdapat mata pelajaran agama maupun umum, seperti pada kelompok dasar di samping ada mata pelajaran Tat Negara/Civil ddi samping sejumlah mata pelajaran agama. Begitu

¹³⁵ S. Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), p. 124.

juga di kelompok mata pelajaran pokok, kelompok penting terdapat keduanya.

2. Model Integrasi Kurikulum

Pembaharu pendidikan Islam yang dilakukan di dunia Islam di samping mendatangkan kemajuan masyarakat muslim, ternyata tidak sepenuhnya mampu menyelesaikan persoalan untuk mengejar ketertinggalan umat Islam di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan memunculkan persoalan baru di berbagai negara Islam, yakni di satu sisi munculnya golongan yang berpaham sekular dan pada sisi lain muncul pula golongan yang makin berpegang kuat pada paham ortodok. Munculnya dua golongan paham inilah yang pada gilirannya memperluas dan mempertajam persoalan dikotomi dalam ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam. Munculnya dua golongan yang berseberangan itu, sebagaimana dinyatakan oleh Rahman (1982) adalah sebagai akibat paham sekularisasi yang diperkenalkan sejak abad renaissance yang tumbuh subur di Barat. Paham yang memisahkan antara urusan dunia dengan agama itu selanjutnya diadopsi, baik secara sadar ataupun tidak sadar oleh tokoh pembaharu Islam, utamanya oleh mereka yang pernah mengenyam pendidikan di Barat. Dampak yang dialami oleh dunia pendidikan Islam ialah munculnya pandangan yang disebut dualisme pendidikan dan pengetahuan, yaitu pendidikan keagamaan dan pendidikan umum.¹³⁶ Upaya penyelesaian persoalan kurikulum dikotomik tersebut sesungguhnya telah dilakukan. Sebagaimana dikemukakan oleh Rahman (1982) atas dasar pengamatannya terhadap

¹³⁶ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 2017), p. 130-131.

konsep dan praktek pendidikan di berbagai negara Islam, secara garis besar ada dua cara yang dilakukan: *Pertama*, dengan menerima ilmu pengetahuan (sains) modern yang sekuler sebagaimana telah berkembang secara umum di Barat dan dicoba untuk “mengislamkannya” dengan cara mengisinya dengan konsep-konsep tertentu dari Islam. *Kedua*, dengan cara menggabungkan atau memadukan ilmu pengetahuan modern dengan ilmu pengetahuan keislaman yang diberikan secara bersama-sama di suatu lembaga pendidikan Islam.¹³⁷

Upaya integrasi bentuk kedua inilah yang dilakukan oleh SMIP-1946, yakni dengan memasukkan sejumlah mata pelajaran umum sebagaimana yang diberikan pada sekolah model Belanda, dengan minus hal-hal yang berbau kolonialisme, seperti Sejarah Belanda dan bahasa belanda. Model integrasi ini oleh Robin Fogarty (1991) disebutnya model *‘webbed’* yaitu sebuah model integrasi atau pepaduan ilmu pengetahuan dengan sasaran yang bersifat *metacurricular*, dalam bentuk berbagai skil, seperti *thinking skills, social skills, multiple intelligences, technology, dan study skills* yang mungkin didapat dari penyajian materi-materi pelajaran yang terdapat pada berbagai mata pelajaran yang terkait, baik mata pelajaran umum maupun agama.¹³⁸

Selain itu, dipilihnya model ini, pertama tentu karena model integrasi tersebut lebih mudah dilakukan, walaupun di kalangan masyarakat dan ulama tradisional yang radikal masih sering dipersoalkan bahkan ditolak. Penolakan tersebut tentu disebabkan berbagai alasan,

¹³⁷ Rahman., p. 130-131.

¹³⁸ Robin Fogarty, *How to Integrate The Curricula* (New York: IRI/Skylight Publishing, Inc., 1991), p. 64-65

seperti dianggap sebagai upaya mengikuti orang Belanda yang notabene dianggap kapir.

Selain itu, gagasan integrasi sains dan agama juga telah dimunculkan pada SMIP-1946. Hal itu dapat dilihat antara lain dimasukkannya mata pelajaran Ilmu Alam dengan ilmu Falak dengan nama mata pelajaran “Ilmu alam dan Falak.

Terlepas dari kontroversi tersebut, yang jelas gagasan dan upaya yang dilakukan dalam bentuk integrasi mata pelajaran umum yang utuh ke dalam kurikulum pendidikan Islam ini adalah merupakan terobosan yang bisa dianggap baru di daerah Banjar pada saat itu. Bahkan pihak pemerintah pun belum pernah melakukannya. Sebab sebagaimana tercatat dalam sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia baru pertama kali memberlakukan kurikulum sendiri pada tahun 1947 yang disebut “*Rentjana Peladjaran 1947*”. Hal itu pun bentuknya hanya mengalihkan model pendidikan yang dilakukan dalam lembaga pendidikan Belanda dan Jepang.

3. Gagasan Integrasi Persiapan Kompetensi Pendidik dalam Kurikulum SMIP-1946

Gagasan memasukan komponen mata pelajaran yang dapat memberikan kompetensi pendidik bagi siswa setingkat sekolah menengah tingkat pertama, tentu bukan saja baru tetapi merupakan sebuah gagasan yang sangat visioner dan tepat pada masanya. Hal itu didasari adanya kesadaran akan kebutuhan tenaga pendidik yang sangat dibutuhkan oleh lembaga pendidikan Islam di bawahnya, yang pada era sebelumnya belum bisa diwujudkan dengan baik.

Dalam rangka itu pada kurikulum SMIP-1946 dimasukkan mata pelajaran ilmu pendidikan, yaitu “Tarbiyah (ilmu pendidikan)” dan “ilmu nafs/ilmu jiwa.” Hal ini dapat dipahami bahwa pendirian SMIP-1946 ini oleh para pengagasnya dimaksudkan bukan sekedar sebagai sebuah sekolah lanjutan tingkat pertama yang setara dengan MULO atau tingkat madrasah tsanawiyah, tetapi dimaksudkan juga sebagai sebuah upaya untuk menjadikan lulusannya memiliki kemampuan untuk mengajar atau sebagai pendidik. Hal ini tentu berdasarkan kesadaran penuh bahwa dalam di kalangan pendidikan Islam memiliki kekurangan tenaga pendidikan, lebih-lebih dalam rangka menyambut kemerdekaan Indonesia, yang sudah barang tentu memerlukan tenaga pendidikan yang banyak. Hal ini dikuatkan dengan perubahan kurikulum kemudian setelah tahun 1952 lama pendidikan SMIP-1946 menjadi 4 tahun, sehingga lulusannya dapat mengikuti ujian persamaan PGA 4 Tahun di samping mendapatkan ijazah tingkat madrasah tsanawiyah dan SMP.¹³⁹

Gagasan yang dilakukan oleh SMIP di tahun 1946 ini sebenarnya jauh mendahului apa yang dilakukan oleh Departemen Agama RI, karena Departemen Agama yang baru mendirikan PGAI pada tahun 1950.¹⁴⁰

4. Integrasi Pengetahuan dan Nilai Kebangsaan dalam Kurikulum SMIP-1946

Dimasukkannya mata pelajaran “Tata Negara/Civic”, “Sejarah Indonesia” dan “Bahasa Indonesia” sebagai ganti dari mata pelajaran Sejarah (Belanda dan Jajahan) dan Bahasa Belanda (yang menggantikan

¹³⁹ Penyusun, *Lima Puluh Tahun "SMIP-1946*.

¹⁴⁰ Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, “Sejarah Pendidikan Islam Dan Organisasi Ditjen Pendidikan Islam.”

sejarah Belanda sebagaimana dalam kurikulum MULO, menunjukkan bahwa ada semangat perjuangan dan nasionalisme yang ingin ditanamkan dalam kurikulum ini. Hal ini sejalan dengan motivasi yang menjadi latar belakang berdirinya SMIP-1946 ini, sebagaimana ditulis dalam buku sejarah SMIP-1946, sebagai berikut:

SMIP lahir di tengah-tengah perjuangan bangsa, khususnya di Daerah Banjar, yang sedang bergelora untuk menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Kesadaran untuk berbangsa dan bernegara yang merdeka serta Hasrat ingin lepas dari belenggu penjajahan adalah salah satu latar belakang utama yang mendukung bangkitnya semangat pengabdian yang tinggi dari para pendirinya, yang ingin mendarmabaktikan diri mereka dalam usaha perjuangan untuk mncerdaskan kehidupan bangsa yang mereka kaitkan dengan ibadah kepada Allah SWT.¹⁴¹

Jika dilihat dari materi pelajaran yang ada pada kurikulum SMIP-1946 di atas dapat disebutkan ada mata pelajaran Tata Negara, Sejarah Indonesia dan Bahasa Indonesia. Mata-mata pelajaran ini berisikan apa yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 dan dasar negara Pancasila.

Ide integrasi nilai dan semangat kebangsaan ke dalam kurikulum ini dilihat dari semangat diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan semangat untuk kemerdekaan Kalimantan menjadi sangat penting. Meskipun secara politis kurikulum pendidikan di Indonesia baru dikeluarkan secara resmi pada tahun 1947 sebagai ganti dari kurikulum model sekolah Belanda dan Jepang, yang disebut dengan “rencana pelajaran”.¹⁴² Bahkan secara resmi yang diatur

¹⁴¹Penyusun, *Lima Puluh Tahun "SMIP-1946*., p. 15.

¹⁴² Maimuna Ritonga, “Politik Dan Dinamika Kebijakan Perubahan Kurikulum Pendidikan Di Indonesia Hingga Masa Reformasi,” *Bina Gogik* 5, no. 2 (2018): 1–15.

dalam Undang-undang pendidikan tahun 1950 dan tahun 1954, yang menegaskan bahwa pendidikan harus diarahkan pada `nasionalisme'. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa gagasan memasukkan materi pelajaran yang bersifat nasionalisme atau kewarganegaraan ini telah mendahului apa yang dirumuskan dalam kurikulum nasional.

5. Pengembangan Wawasan Global

Gagasan global dalam pendirian SMIP-1946 ini juga mendapat perhatian yang cukup baik, yakni dengan memasukkan mata pelajaran “Bahasa Inggris” di samping Bahasa Arab yang merupakan Bahasa global. Hal ini tentu bukan sekedar sebagai upaya adopsi atas model kurikulum sekolah Belanda dan Jepang, tetapi juga didasari atas sebuah kesadaran dari para penggagasnya agar lulusannya dapat berkiprah bukan saja di kancah lokal tetapi di kancah nasional dan global. Namun yang menarik dari upaya memasukkan bahasa sebagai unsur pemikiran pendidikan global ini adalah tidak dimasukkannya bahasa Belanda, Prancis, Spanyol yang pernah ada pada kurikulum sekolah Belanda. Hal ini tentu terkait juga dengan semangat perjuangan revolusi mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan Belanda di Kalimantan.

Selain itu dimasukkannya mata pelajaran “Sejarah Umum” dan sejarah Islam (*Tarikh*). Hal ini tentu disadari bahwa siswa perlu belajar sejarah umum dan sejarah Islam. Hal ini tentu dalam rangka memuka wawasan para siswa agar tahu tentang sejarah dunia, baik terkait dengan perjuangan bangsa-bangsa lain maupun perjuangan bangsa Indonesia sendiri.

6. Penguatan *Muhadharah* Sebagai Kegiatan ekstra Kurikuler

Selain muatan kurikulum dalam bentuk intra kurikuler sbagaimana digambarkan di atas, SMIP-1946 sejak beririnya memiliki kurikulum yang berbentuk ko atau ekstra kurikuler berupa kegiatan praktik '*muhadharah*', yakni pelajaran yang dilaksanakan di luar jam mengajar untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan untuk berceramah atau berdakwah di depan umum. Kegiatan ini dilaksanakan setiap Hari Kamis (seminggu sekali). Bentuk kegiatan ko atau ekstra kurikuler dalam bentuk *muhadharah* ini sekaligus juga dijadikan sebagai sarana untuk membangun sikap dan semangat bagi para siswa untuk menjadi manusia muslim yang benar-benar dapat menjadikan dirinya sebagai hamba Allah sekaligus juga hamba masyarakat. Hal itu sebagaimana yang sering ditekankan oleh Khatib Syarbaini Yasir selalaku Direktur Pertama SMIP-1946, dalam acara *muhadharah*, dengan istilah: "jadilah budak Allah dan budak masyarakat".¹⁴³

Meskipun kegiatan penguatan *muhadharah* yang dilakukan oleh SMIP-1946, mungkin sudah pernah juga dilakukan oleh lembaga pendidikan Islam sebelumnya. Namun yang menarik dari apa yang dilakukan oleh SMIP-1946, program ini dijadikan sebagai program unggulan yang dibina langsung oleh pimpinan sekolah. Tujuannya bukan saja untuk membina kemampuan praktis berpidato tetapi jauh dari itu, yakni untuk menanamkan semangat pengabdian untuk menegakkan kalimah Allah dan kemajuan masyarakat muslim. Selain itu, tentu dalam kontek revolusi, program ini juga menjadi bagian penting

¹⁴³ Penyusun, *Lima Puluh Tahun "SMIP-1946*., p. 5.

untuk membangun semangat perjuangan untuk merebut kemerdekaan,
menamkan semangat nasionalisme dan keislaman.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari paparan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Latar belakang lahirnya gagasan modernisasi lembaga pendidikan Islam model SMIP-1946 ini adalah:
 - b. Semangat pengabdian kepada Allah SWT dan kepada masyarakat daerah Banjar yang setelah penjajahan Belanda dan Jepang mengalami keterbatasan dalam akses pendidikan, khususnya untuk tingkat pendidikan menengah yang memadukan pengetahuan agama dan umum secara seimbang;
 - c. Semangat yang menggebu dari para pendiri untuk mendapatkan kemerdekaan, khususnya kemerdekaan Kalimantan dari penjajahan kembali pemerintahan kolonial Belanda.
 - d. Semangat untuk dapat mengisi kemerdekaan melalui pemberian kesempatan yang luas bagi rakyat Daerah Banjar untuk mengakses pendidikan yang berkualitas dan mudah serta tanpa diskriminatif, tidak seperti pada jaman penjajahan Belanda dan Jepang.

2. Gagasan modernisasi lembaga pendidikan Islam model SMIP-1946 dimotori oleh para ulama dan guru agama yang tergabung dalam organisasi PGSI. Mereka adalah para ulama dan guru agama yang berpikiran modern, moderat dan lebih mengutamakan kerja kolektif lintas organisasi dan paham keagamaan dalam membangun ummat melalui sebuah lembaga pendidikan yang *non sectarian* atau dapat diterima oleh semua kalangan.
3. Gagasan modernisasi lembaga pendidikan Islam model SMIP-1946, meliputi:
 - a. Memilih nama lembaga pendidikan Islam dengan nama “sekolah Islam” bukan nama madrasah atau nama lainnya dapat dinyatakan sebagai sebuah gagasan baru pada era revolusi (1946-149) ini. Nama “sekolah Islam” belum pernah dipakai pada gagasan era sebelumnya, yakni sebuah nama lembaga pendidikan Islam yang mencerminkan ke-Indonesiaannya. Hal ini juga dimaksudkan untuk untuk memberi nuansa yang berbeda dari pendidikan Islam sebelumnya dan pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Kolonial Belanda dan Jepang atau lembaga pendidikan Islam yang masih menggunakan istilah asing seperti madras dan school.
 - b. Memilih “sekolah Islam tingkat pertama” bukan sekolah tingkat dasar, sebagai sebuah pilihan yang didasari oleh pandangan realistik akan kebutuhan masyarakat daerah Banjar, yang sebelumnya tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan setingkat menengah

pertama yang disebabkan oleh diskriminasi dari pemerintah colonial Belanda dan Jepang bagi masyarakat Islam pribumi untuk melanjutkan pendidikan. Di samping itu adanya antusiasme masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas pada jenjang yang lebih tinggi. Selain itu pula pada kenyataannya di daerah Banjar pada waktu itu belum ada sekolah Islam yang memberikan ilmu pengetahuan agama dan umum yang seimbang.

- c. Visi dan misi dan tujuan sekolah yang bukan sekedar untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi setingkat sekolah menengah, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu visi dan misi mencerdaskan kehidupan bangsa yang dipersiapkan untuk dapat merebut dan mengisi kemerdekaan dengan intelektual muslim yang unggul.
- d. Integrasi kurikulum yang seimbang (50%-50%) antara penguasaan ilmu pengetahuan keagamaan yang menjadi ciri dan kekuatan lembaga pendidikan Islam dengan penguasaan ilmu pengetahuan umum yang sangat diperlukan dalam merebut dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Gagasannya ini tentu dapat dinyatakan baru karena belum dilakukan oleh lembaga pendidikan Islam sebelumnya, yang hanya menjadikan ilmu pengetahuan umum sebagai suplemen saja.
- e. Integrasi ilmu pengetahuan keagamaan dan nilai-nilai kebangsaan yang dimuat secara eksplisit dalam kurikulum dan pembelajaran, yakni dengan memasukkan mata

- pelajaran, tata negara, sejarah umum (Indonesia) dan Bahasa Indonesia.
- f. Menyiapkan siswa dengan ilmu kependidikan/keguruan dalam kurikulum dan pembelajaran, dengan masud para lulusannya dapat menjadi pendidik/guru pada sekolah-sekolah Islam di bawahnya. Hal ini dilakukan dengan memasukkan mata pelajaran psikologi Tarbiyah dan Ilmu Nafs.
 - g. Memprogramkan ekstra kurikuler dalam bentuk “muhadharah” yang digunakan untuk mempersiapkan lulusannya mampu menjadi pendakwah atau kemampuan publik speaking, sekaligus juga sebagai wahana untuk pembentukan semangat perjuangan merebut kemerdekaan bagi siswanya.
4. Gagasan modernisaasi pendidikan Islam model SMIP-1946 ini dapat dinyatakan berhasil, utamanya jika dilihat dari perkembangan para lulusannya. Setidaknya ada alumninya yang kelak menjadi Rektor IAIN Antasari, yakni Drs. H.M. Asy`ari, MA dan Dr. H. Alfani Daud, menjadi dosen pada berbagai perguruan tinggi, seperti: Prof. Dr. Badjuri Ali (dosen UNLAM), Drs. KH Adnani Iskandar , Drs. Harun Arrasyid, Drs. Syahrani Suhaily, Drs. H.M. Said Agil Assegaf, Drs. Malikul Adil, Drs. Ajidan Noor, Drs. Athailah Baderi, dan lain-lain. Tidak sedikit yang menjadi guru agama dan tokoh masyarakat dan pegawai di berbagai kementerian.

B. Refleksi Konstruksi Teoritik

1. Karakteristik Modernisasi Pendidikan Islam Era Revolusi

Deliar Noer dalam bukunya yang berjudul “*Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*”, dalam bab kesimpulan mengemukakan tentang karakteristik golongan `tradisi` dan `modern`. Menurutnya karakteristik golongan tradisi di antaranya:

1. Lebih menghiraukan soal-soal agama, *din* atau ibadah belaka. Bagi mereka Islam seakan sama dengan fiqh, mereka mengakui taqlid dan menolak ijihad. Banyak pula yang memberikan perhatian pada tasawuf.
2. Dalam konteks pendidikan guru/kiyai, syaikh dianggap *ma`sum*, terhindar dari kesalahan. Dalam situasi seperti itu Islam dan tafsiran tentangnya merupakan monopoli kiyai atau syaikh dan bukan turut dipikirkan oleh para pengikutnya atau santri. Fatwa kiyai bersifat final dan tidak dapat dipertanyakan lagi. Posisi kiyai yang demikian tinggi menciptakan suatu sistem pendidikan (di pesantren, surau) yang lebih mengutamakan hafalan daripada pemahaman. Para murid (santri) tidak berani mempunyai pikiran yang berlainan dari kiyai, syekh atau guru. Pengajaran di pesantren atau surau, termasuk pada pendidikan tingginya, merupakan pengalihan atau pewarisan pengetahuan yang bersifat searah dan bukan merupakan diskusi di mana murid diasah pemikirannya dan kesempatan untuk memberi sumbangan pemikiran. Selain itu, buku pelajaran yang digunakan adalah buku-buku yang berasal dari generasi sebelumnya yang terbatas pada pelajaran agama. Pengelolaan lembaga pendidikan tidak mempunyai organisasi atau

sedikit organisasinya. Tidak ada sistem kelas, tidak ada kurikulum yang teratur, tidak ada batas-batas pelajaran untuk masa tertentu.

3. Disebabkan perhatian yang semata-mata pada masalah agama, golongan tradisi pada umumnya tidak turut dalam masalah politik. Bidang ini mereka serahkan pada kalangan adat dan priyayi. Namun tidak berarti mereka senang dengan penjajahan. Banyak pula golongan tradisi yang menjadi pegawai agama, suatu posisi yang mungkin juga memberikan kepuasan batin karena dirasakan sebagai bagian dari ibadah.¹⁴⁴

Simpulan yang dikemukakan oleh Deliar Noer tentang golongan tradisi di atas, tentu merupakan potret pendidikan tradisi ketika pendidikan belum mengenal modernisasi, yang umumnya terjadi sebelum abad ke 20 atau beberapa lembaga pendidikan tradisional yang tidak menerima dan melakukan pembaharuan yang telah dimulai sejak awal abad ke 20, sebagaimana telah digambarkan di atas, khususnya yang terjadi di Daerah Banjar di era kolonialisme Belanda dan pendudukan jepang., di mana telah banyak lembaga pendidikan yang semula dikelola secara tradisional telah memasukan modernisasi ke dalamnya, seperti *arabishe School*, *Islamische School*, dan madrasah.

Pada simpulannya Deliar Noer juga mengemukakan karakteristik golongan pembaharu (modernis). Menurutny golongan pembaharu lebih memperhatikan pada sifat Islam pada umumnya. Bagi mereka Islam sesuai dengan tuntutan dan keadaan zamannya. Islam tidak akan menghambat usaha mencari ilmu pengetahuan, perkembangan sains. Bagi kalangan modernis diperlukan kebebasan berfikir bagi semua orang, oleh karenanya *ijtihad* selalu terbuka. Dalam melihat pendapat

¹⁴⁴ Deliar Noor, *Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1942.*, p. 320-321.

lebih diutamakan melihat pendapatnya bukan pada siapa yang berpendapat. Oleh sebab itu, guru, kiyai atau syaikh, tidak *ma'shum* dari kesalahan atau kehilafan. Guru dalam kalangan modern tidak memonopoli ajaran atau pengetahuan Islam atau pun pengetahuan lain. Oleh karena itu pula, pembicaraan tentang Islam tidak lagi dibatasi di pesantren, surau, langar dan masjid, melainkan dibawa ke tengah-tengah masyarakat secara terbuka melalui berbagai saluran. Dalam bidang pendidikan, kalangan modern mengakui manfaat pendidikan sains di sekolah-sekolah Belanda di Indonesia, dan oleh karena itu sains juga dimasukkan di sekolah mereka. Bahasa Arab bukan satu-satunya bahasa asing untuk pengembangan ilmu pengetahuan seseorang. Di samping bahasa Arab diajarkan juga bahasa Belanda, Inggeris, Prancis dan Jerman di sekolah-sekolah tersebut. Tampak pula berkurangnya penggunaan buku-buku bertuliskan bahasa Arab yang dipergunakan di sekolah Islam, tulisan Jawi dan Pego diganti tulisan Latin. Pemakaian sistem pendidikan Barat yang memberikan patokan bagi pelajar tentang tahap-tahap pelajaran, penekanan pada pemahaman bukan pada hapalan juga diterapkan.¹⁴⁵

Berbagai karakteristik model modernisasi pendidikan Islam di atas, di samping mendatangkan kemajuan pendidikan Islam, setidaknya dapat memberikan wawasan dan kompetensi penguasaan pengetahuan umum bagi siswa-siswa pendidikan Islam dan terbangunnya kemampuan berpikir kritis serta perluasan wasan pemahaman keislaman. Namun menurut Deliar Noer golongan modern tidak berhasil membangun satu macam sistem pendidikan. Sistem pendidikan Indonesia yang dualistis, seperti dicerminkan dengan adanya sistem

¹⁴⁵ Deliar Noor., p. 322-327.

Barat dan sistem Pesantren, tampaknya masih dipraktikkan di sebagian kalangan modern. Dijumpai ada sekolah agama, dan juga sekolah yang sejenis dengan sekolah yang didirikan Belanda, kecuali pembelajaran agamanya. Dalam madrasah pelajaran agama diutamakan, di sekolah mata pelajaran umum. Di samping itu, terdapat juga dualisme pada penyediaan buku-buku pelajaran yang dipakai. Golongan modern tidak berhasil menyediakan buku khusus untuk keperluan mereka. Sehingga untuk pembelajaran agama mereka memakai buku-buku yang berasal dari timur tengah, sedangkan untuk pembelajaran umum memakai buku-buku yang dipergunakan sekolah Belanda. Kegagalan lain juga terlihat pada ketersediaan tenaga pengajar atau guru, sehingga mereka juga memanfaatkan guru yang telah ada, untuk pelajaran agama dari lulusan Timur Tengah dan untuk pelajaran umum diambil dari lulusan sekolah Belanda.¹⁴⁶

Apa yang digambarkan dari simpulan Deliar Noer terkait modernisasi pendidikan Islam di era kolonialisme Belanda atau era pergerakan tahun 1900-1942 tersebut tentu sebagian masih ditemukan pada modernisasi pendidikan Islam yang dilakukan di era Revolusi (1945-1949) di daerah Banjar, khususnya ketika memotret gagasan pembaharuan pendidikan Islam model SMIP-1946. Akan tetapi, sudah tentu pula terdapat berbagai perbedaan atau hal-hal baru yang telah dilakukan sesuai dengan kondisi, situasi, dan tuntutan pada era revolusi yang berbeda dengan era sebelumnya.

Jika dilihat dari pembaharuan sistem kelembagaan yang dipakai oleh SMIP-1946, yaitu dalam bentuk “Sekolah Islam” terdapat persamaan dan perbedaan dengan bentuk-bentuk sistem sekolah Islam

¹⁴⁶ Deliar Noor., p. 327-329.

yang diambil oleh para pembaharu pendidikan Islam sebelumnya, khususnya yang ada di Daerah Banjar.

Pembaharuan atau modernisasi pendidikan Islam yang dilakukan pada masa kolonial Belanda meskipun beberapa lembaga telah memakai nama dan sistem sekolah (*School*) seperti *Arabsche School*, *Islamische School*, dan *Wostha School*, begitu juga beberapa sekolah telah memasukkan mata pelajaran umum ke dalam kurikulumnya. Akan tetapi pada umumnya nama dan sistem sekolah (*school*) tidak sepenuhnya dilakukan, seperti masih terdapat beberapa sekolah yang melaksanakan pembelajaran dalam bentuk halakah di dalamnya (belum menggunakan meja dan kursi untuk belajar), mata pelajaran agama diajarkan dengan kitab berbahasa arab dan melayu, hanya beberapa mata pelajaran umum yang dimasukkan, seperti pelajaran membaca dan menulis huruf latin, berhitung. Dengan kata lain, mata pelajaran umum hanya sebagai suplimen yang porsi waktunya sangat sedikit. Sistem hapalan untuk penguasaan materi pelajaran masih banyak dilakukan. Selain itu, tingkat sekolah yang dilaksanakan lebih banyak pada tingkat sekolah rakyat (SR) atau sekolah dasar. Hal ini tentu sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat pada saat itu.

Berbeda dengan pembaharuan atau modernisasi pendidikan Islam di era revolusi, khususnya yang dikembangkan oleh SMIP-1946, modernisasinya dapat dinyatakan lebih totalitas, namun pada sisi lain tidak ingin meninggalkan kekuatan pendidikan agamanya. Sistem sekolah sebagaimana yang dilakukan oleh sistem sekolah Belanda diterapkan secara penuh, seperti: belajar dengan memakai kursi dan meja untuk belajar, buku-buku sebagian memakai bahasa Indonesia, mata pelajaran umum yang diajarkan di sekolah seperti sekolah Belanda

diajarkan semuanya, kecuali untuk mata pelajaran yang berbau kolonial, seperti sejarah Belanda (colonial), bahasa Belanda, dan bahasa erofa lainnya, kecuali Inggeris. Sistem hapalan untuk penguasaan materi pelajaran sudah ditinggalkan, kecuali untuk materi tertentu yang menuntut diperlukannya hapalan.

Hal yang paling menarik dari modernisasi era revolusi ini, khususnya di Daerah Banjar ialah semangat atau sprit kemerdekaan dan nasionalisme pada sekolah. Hal itu diwujudkan baik yang berwujud dimasukkannya mata pelajaran civik/kewarganeraan, bahasa Indonesia dan sejarah Indonesia. integrasi kebangsaan/nasionalisme, maupun dalam bentuk suasana iklim pendidikan yang tumbuh dan hidup dalam keseharian sekolah.

Sebagai lembaga pendidikan Islam yang beridri pada era Revolusi, yakni tahun 1946, sudah barang tentu modernisasi pendidikan Islam di era revolusi, khususnya dalam pendirian SMIP-1946 ini, tidak bisa dinapikan dari semangat atau siprit revolusi itu sendiri. Kevin W. Forg dalam sebuah prolog pembahasan tentang “Serua-seruan Islam untuk Aksi” menceritakan seorang informan yang bernama Saifulkan Angai, seorang pemuda yang tinggal di Marabahan, berusia 16 tahun, ketika Belanda datang lagi ke Kalimantan Selatan tahun 1946 sebagai bagian dari upaya merebut Kembali koloni mereka. Ia bergabung dengan organisasi Muhammadiyah dan masuk sebagai barisan lasykar lokal organisassi itu untuk berjuang mlawan penajah beserta pasukannya. Keterlibatan Saifulkan dimotivasi oleh pimpinan agama setempat (Marabahan) yang bernama H. Mahyuni, sebagai tokoh “pendidikan” yang mendorong kaum Muslimin pria untuk ikut berperang melawan Belanda, sebagai perang sabil, yang jika meninggal

akan menjadi syahid.¹⁴⁷ Apa yang dikemukakan oleh Kevin Fogg di atas menunjukkan adanya kehadiran, keterlibatan dan peran para ulama dan guru agama yang aktif di bidang pendidikan untuk menggelorakan perjuangan melalui jalur pengaruhnya sebagai pendidik dan ulama. Hal itu juga yang menjadi spirit berdirinya SMIP-1946 yang menjadikan pendirian lembaga pendidikan ini sebagai wahana pembinaan generasi muda Muslim untuk ikut teribat secara intens dalam memperjuangkan kemerdekaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Asy`ari dalam tulisannya tentang sejarah Singkat SMIP-1946, bahwa Putra-putri SMIP di kala itu banyak yang melibatkan diri dalam gerakan perjuangan bersenjata merebut kemerdekaan di daerah. Mereka tercatat sebagai anggota kesatuan gerilia yang mereka namakan sendiri dengan sebutan AKSI (Angkatar Kesatuan Siswa Indonesia) yang tergabung dalam ALRI Divisi IV. Organisasi ini adalah satu-satunya kesatuan gerilia pelajar di daerah ini yang paling aktif beroperasi dan juga satu-satunya yang terbesar serta terorganisir dengan rapi. Seluruh pimpinan dan anggota teras yang dikerahkan dalam kegiatan operasi di lapangan adalah seluruhnya terdiri dari pelajar SMIP di kala itu.¹⁴⁸

Dari apa yang ditemukan di atas dapat dinyatakan bahwa pendirian dan pengembangan pendidikan yang muncul di era Revolusi, adalah merupakan bagian dari sebuah misi perjuangan kemerdekaan umat Muslim. Tesis ini akan lebih jelas dan kuat jika dikonfirmasi dengan beberapa peristiwa yang dialami oleh para ulama dan pendidik di beberapa lembaga pendidikan Islam lain yang ada di Daerah Banjar, seperti: 1) H.M. As`ad sebagai pimpinan PPI, arena dianggap berbahaya

¹⁴⁷ Fogg, *Spirit Islam Pada Masa Revolusi Indonesia.*, p. 97.

¹⁴⁸ Asy`ari, "Sejarah Singkat SMIP 1946.", p. 2-3

oleh Pemerintah Hindia Belanda, pada tahun 1946 H.beliau ditangkap oleh tentara NICA dan sempat ditahan selama 8 bulan di Kandang.¹⁴⁹ Hal yang sama dialami oleh KH. Idham Chalid sebagai pimpinan Normal Islam Amuntai ditangkap NICA pada tahun 1949.¹⁵⁰

Selain motivasi dan spirit perjuangan kemerdekaan, motivasi mengisi kemerdekaan Indonesia atau mempersiapkan generasi muda yang dapat mengisi kemerdekaan kelak juga menjadi salah satu latar belakang modernisasi pendidikan di Era Revolusi. Jika ditarik jauh ke belakang pada suasana persiapan kemerdekaan dan situasi pada saat awal kemerdekaan tahun 1945, motivasi mengisi kemerdekaan dengan mempersiapkan generasi muda Islam terpelajar yang kelak dapat ikut mewarnai dan mengambil peran dalam pengelolaan negara Indonesia merdeka, dapat dirajut benang merahnya.

Ketika persiapan kemerdekaan digagas di bawah bimbingan atau koordinasi Jepang, Langkah pertama jalan untuk itu ialah membentuk sebuah badan yang diberi nama “Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Badan ini diisi oleh tokoh publik yang dipilih Jepang dari kalangan terpelajar yang dianggap dapat bekerja.¹⁵¹ Hanya saja komposisi anggota Badan tersebut kurang terwakilinya dari unsur pemimpin Islam. Para anggota dengan orientasi Islam lebih diwakili oleh Islam abangan dan hanya seperempat dari total anggota.¹⁵² Alasan Jepang membatasi anggota dari kalangan Islam tidak sepenuhnya jelas, tetapi diduga ada kaitannya dengan tugas khusus dari Badan tersebut.

¹⁴⁹ Tim, *Ulama Banjar Dari Masa Ke Masa.*, p. 131.

¹⁵⁰ Tim., 222.

¹⁵¹ Benidic. Andrson R`O.G, *Java in Time Revolution, Occupation and Resistance 1944-1946* (Jakarta: Equinox Published, 2006)., p. 64-65.

¹⁵² Deliar Nur, *Partai Islam Di Pentas Nasional 1945-1965*, Cet. I (Jakarta: Grafiti Press, 1987)., p. 31.

Banyak calon partisipan dari Islam dianggap kurang memadai atau kurang cocok karena berlatar belakang pendidikan bukan Barat dan minim pengalaman dalam administrasi pemerintahan.¹⁵³ Hal ini kemudian terbukti ketika Badan ini Menyusun Draf Undang-undang Dasar. Kontribusi anggota-anggota dari Islam sangat terbatas, akibatnya proses tersebut didominasi ahli hukum didikan Belanda. Meskipun para wakil Islam tersebut memiliki latar belakang pendidikan Islam yang cukup baik, bahkan ada yang pernah belajar di Kairo ((Abdul Kahar Muzakkir) dan Sukirman yang pernah belajar kedokteran di Belanda.¹⁵⁴ Kondisi dan realitas tersebut boleh jadi menjadi pelajaran bagi tokoh-tokoh Islam untuk tidak boleh gagal ikut mewarnai dan bahkan mengambil peran dalam mengisi kemerdekaan kelak. Oleh karena, generasi muda Muslim harus segera dipersiapkan melalui pendidikan yang kuat, bukan saja memiliki pengetahuan dan kompetensi bidang keislaman tetapi juga pengfathuan dan kompetensi umum. Usaha itu harus dimulai dengan meningkatkan jenjang pendidikan yang rata-rata pada tingkat sekolah dasar (SR) ke jejang pendidikan yang lebih tinggi yaitu sekolah menengah tingkat pertama yang berkualitas.

2. Karakteristik Gagasan Modernisasi Pendidikan Islam Era Revolusi.

Dari berbagai gagasan yang terdapat dalam pendirian SMIP-1946 di atas dapat dinyatakan bahwa gagasan yang lahir pada era revolusi (1946-1949) tersebut sangat tepat sesuai dengan kondisi dan masa itu. Di tengah-tengah perjuangan merebut dan mempertahankan

¹⁵³ Fogg, *Spirit Islam Pada Masa Revolusi Indonesia.*, p. 232.

¹⁵⁴ Fogg, p. 323.

Kalimantan, gagasan ini sangat luar biasa, yang tidak banyak kesempatan bagi pihak lain untuk melahirkan sebuah lembaga pendidikan baru pada saat itu, khususnya di Kalimantan.

Beberapa gagasan modernisasi lembaga pendidikan Islam seperti yang telah dilakukan pada SMIP-1946, dalam perspektif teoritik setidaknya dapat dikaitkan dengan empat hal yang akan dibahas: 1) Integrasi ilmu pengetahuan umum dan agama; 2) Integrasi Islam dan kebangsaan (Nasionalisme); 3) Manajemen Pendidikan terbuka (inklusif); (4) Ideologi pendidikan Islam.

1) Integrasi Ilmu pengetahuan umum dan agama.

Kajian tentang integrasi ilmu pengetahuan umum dan agama, sesungguhnya bukanlah sebuah hal baru dalam konteks pembaharuan pendidikan, namun dalam perjalanannya dari waktu ke waktu senantiasa melahirkan konsep-konsep baru dari corak integrasi yang dikembangkan. Gagasan integrasi ilmu pengetahuan umum dalam pendidikan Islam mulai mengemuka ketika penguasa Mesir, Muhammad Ali Pasya (1765-1848 M) dengan upayanya mengirim kader-kader muslim yang potensial untuk belajar ke Eropa (Inggeris dan Perancis) dan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan baru di Mesir, yang diorientasikan untuk mengejar ketertinggalan umat Islam di bidang ilmu pengetahuan umum dan teknologi. Pembaharu Mesir lain yang sangat konsern dengan pendidikan adalah Rifa`ah Badawi Rafi` Al-Tahtawi (1801-1873 M). Diantara pemikirannya ialah: 1) bahwa ajaran Islam bukan hanya mementingkan soal akhirat tetapi juga soal hidup di dunia. Umat Islam juga harus memperhatikan hidup duniawinya; 2) Kaum ulama harus mempelajari filsafat dan ilmu-ilmu pengetahuan modern agar dapat menyesuaikan syari`at dengan kebutuhan-kebutuhan

masyarakat modern; 3) Pendidikan harus bersifat universal dan sama untuk semua golongan (Tahtawi, 1873). Atas dasar pemikiran Tahtawi inilah lembaga-lembaga pendidikan Islam kembali memakai kurikulum yang lebih komprehensif yang meliputi ilmu-ilmu *syar`iyah* (keagamaan) dan *ghairu syar`iyah* (ilmu pengetahuan umum).

Setelah Ali Fasya dan Tahtawi, pembaharu-pembaharu pendidikan Islam yang memiliki misi yang sama terus berlanjut. Dari sekian pembaharu pendidikan Islam tersebut dikenal nama-nama seperti: Muhammad Abduh (1849-1905 M) dan muridnya Rasyid Ridha (1865-1935) di Mesir. Di Turki dikenal Sultan Mahmud II (1808-1839 M) dan Sadik Rifat (1807-1856 M). Di India juga muncul tokoh pembaharu pendidikan yang dimulai oleh Sir Sayyid Ahmad Khan (1817-1898 M), Nawab Muhsin Al Mulk, Viqar Al-Mulk, Altaf Husien Ali, Sayid Amir Ali, Salah Al-Din Khuda Bakhs dan Aga Khan, dan Muhammad Iqbal (1873-1938 M). Di Indonesia, pembaharuan pendidikan banyak dilakukan baik oleh individu dan oleh organisasi Islam seperti Jami`at al-Khair, Muhammadiyah, Perti, Nahdatul Ulama, Jam`iyatul Washliyah dan sebagainya. Masing-masing tokoh dan kelompok tersebut memiliki konsep dan pandangan masing-masing tentang praktik kurikulum.

Kehadiran konsep kurikulum yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum yang berasal dari Barat ini, di kalangan umat Islam, khususnya ulama, telah mengalami perdebatan yang cukup sengit dan panjang. Dari situ lahir berbagai pandangan tentang pengintegrasian ilmu pengetahuann umum yang notabene berasal dari Barat tersebut ke dalam Islam. Persoalan mendasarnya ialah, diskursus para ulama dan

pelaku pendidikan Islam mengenai apakah ilmu pengetahuan yang berasal dari Barat tersebut dapat diakui dan diterima.

Jika mengacu pada sejarah integrasi yang dilakukan dalam pendidikan Islam, upaya integrasi ilmu pengetahuan umum ke dalam lembaga pendidikan Islam itu ternyata tidak sepenuhnya mampu menyelesaikan persoalan untuk mengejar ketertinggalan umat Islam di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan memunculkan persoalan baru di berbagai negara Islam, yakni di satu sisi munculnya golongan yang berpaham sekular dan pada sisi lain muncul pula golongan yang makin berpegang kuat pada paham ortodok. Munculnya dua golongan paham inilah yang pada gilirannya memperluas dan mempertajam persoalan dikotomi dalam ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam.

Persoalan dikotomi ini dalam pembaharuan pendidikan Islam model SMIP-1946 tampaknya bukan menjadi persoalan, seperti persoalan ini telah selesai, yakni dengan menganggap ilmu pengetahuan umum adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diperlukan tanpa memperhatikan berasal dari Barat. Akan tetapi bukan berarti tanpa memperhatikan hal-hal yang bertentangan atau bisa mengganggu nilai dan ajaran keislaman. Upaya lain untuk menyelesaikan persoalan pandangan dan sikap dikotomik tersebut, yakni dengan menempatkan dua jenis mata pelajaran dalam kelompok yang setara dalam kurikulum dan pembelajaran (dapat dilihat pada struktur kurikulum SMIP-1946).

Model integrasi yang dilakukan oleh SMIP-1946 juga dapat dilihat pada kurikulum yang memandang semua ilmu pengetahuan walaupun berasal dari Barat (notaabene) penjajah sekalipun, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam, baik terkait dengan akidah,

akhlak dan syari'at Islam yang bersumber dari al-qur'an dan Hadits. Akan tetapi selain konteks penyelesaian persoalan yang berakar dari ajaran Islam, konteks kepentingan sosial dan kemasyarakatan juga tetap harus menjadi pertimbangan dalam pengitengrasian ilmu pengetahuan umum tersebut, khususnya dalam hal ini terkait dengan sikap penentangan penjajahan. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan yang menghambat terwujudnya keemerdekaan dan melanggengkan penjajahan tidak boleh diadopsi menjadi bagian kurikulum pendidikan Islam.

2) Integrasi Islam dan kebangsaan (Nasionalisme).

Dapat dinyatakan bahwa konsep integrasi Islam dan kebangsaan ini adalah merupakan suatu hal yang baru untuk sebuah lembaga pendidikan Islam. Meskipun persoalan pentingnya penanaman nilai kebangsaan ini sudah dilakukan pada berbagai pendidikan yang didirikan oleh kelompok pergerakan yang mendirikan lembaga pendidikan Islam. Namun belum ada yang memasukkannya dan melaksanakannya secara eksplisit yang dicantumkan dalam kurikulum di samping dalam bentuk *hidden curriculum* (kurikulum tersembunyi dalam berbagai bentuk budaya dan kegiatan sekolah dan pembelajaran). Dimasukkannya mata pelajaran seperti Tata Negara/Sivic, sejarah Indonesia dan Bahasa Indonesia adalah merupakan terobosan baru bagi sebuah lembaga yang berdiri di tengah revolusi memperjuangkan kemerdekaannya.

Dengan dicantumkan dan dilaksanakan pembelajaran tentang kebangsaan ini menunjukkan bahwa bagi SMIP-1946 persoalan Islam dan kebangsaan bukan suatu yang mesti dipertentangkan tetapi harus dikembangkan dan diajarkan kepada peserta didik. Gagasan modernisasi ini menarik, karena di era revolusi ini, termasuk di daerah Banjar,

persoalan tarik menarik antara apakah Islam dan kebangsaan yang harus diperjuangkan dalam merebut kemerdekaan.

3) Manajemen Pendidikan terbuka (inklusif).

Sejalan dengan kondisi dan situasi yang melatarbelakangi lahirnya lembaga pendidikan Islam di Indonesia semasa colonial Belanda dan pendudukan Jepang, yang umumnya dilahirkan oleh sejumlah ulama secafra pribadi dengan latar belakang paham keagamaan dan pemikiran serta sejumlah organisasi keagamaan dengan berbagai corak. Kondisi itu kemudian telah melahirkan lembaga pendidikan yang eksklusif dan tidak saling berintegrasi. Sebagaimana di catat dalam sejarah daerah Banjar, pernah terjadi pertentangan antar mazhab dan kelompok organisasi, yang tentu juga berimbas pada aktivitas lembaga antar pendidikan Islam. SMIP-1946 lahir untuk melepaskan dari belenggu itu, yang mencoba untuk melibatkan segenap penggagas yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, organisasi, dan mazhab serta pemikiran. Ekspremen ini tampaknya membuahkan hasil yang positif dari respon masyarakat dengan besarnya animo masyarakat dari berbagai latar belakang untuk memasukkan anaknya ke SMIP-1946. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa eksklusifisme dalam pendidikan Islam sejatinya bukan bentuk yang tepat dan cocok.

(4) Ideologi pendidikan Islam.

Dilihat dari perspektif ideologi¹⁵⁵ pendidikan, gagasan modernisasi yang dilakukan oleh SMIP-1946 ini, dengan meminjam

¹⁵⁵ Sargent dalam bukunya "*Contemporary Political Ideologies, a comparative analysis*" bahwa ideologi adalah sebuah system atau keyakinan yang diterima sebagai fakta dan kebenaran oleh kelompok tertentu. Ia terdiri dari serangkaian sikap terhadap berbagai lembaga dan proses masyarakat. Ia mengandung sebuah gambaran dunia seperti adanya dan seharusnya dunia itu bagi mereka yang meyakinkannya. Lyman Tower Sargent, *Contemporary Political Ideologies: A Comparative Analysis*, Fourteenth (Australia • Brazil •

klasifikasi ideologi pendidikan Islam yang dikemukakan oleh Jawwad,¹⁵⁶ dapat dinyatakan gagasan-gagasannya didasari oleh ideologi religious rasional dan sekaligus pragmatis instrumental. Dinyatakan sebagai ideologi rasional karena semua gagasan modernisasi pendidikan Islam yang diterapkan pada pendirian SMIP-1946 didasari oleh pemikiran yang rasional, yakni dengan menerima dan memasukkan hal-hal baru yang dipandang baik dan berguna tanpa meninggalkan hal-hal lama yang masih baik dan berguna. Hal itu seperti memasukkan dan mengadopsi beberapa mata pelajaran umum yang pernah diterapkan di sekolah Belanda yang baik dan berguna, tetapi dalam waktu yang sama tidak mengadopsi mata pelajaran yang tidak penting atau bahkan merusak visi dan misi serta tujuan yang diemban. Selanjutnya dikatakan pragmatis instrumental karena gagasan-gagasan modernisasi yang dilakukan dalam pendirian SMIP-1946 ini sejatinya tidak terlepas dari upaya untuk menjawab berbagai tuntutan dalam rangka membangun umat Islam dan bangsa Indonesia yang sedang merebut kemerdekaannya dan berbagai upaya untuk mengisinya. Pemilihan sekolah tingkat pertama sebagai prioritas, integrasi seimbang ilmu pengetahuan keislaman dan ilmu pengetahuan umum, integrasi Islam dan kebangsaan, mengisinya dengan

Japan • Korea • Mexico • Singapore • Spain • United Kingdom • United States: Homewood, Ill: Dorsey Press, 1975). P. 3.

¹⁵⁶ Jawwad Ridha membagi ideologi pendidikan Islam dalam tiga bentuk, yaitu: Religius Konservatif, Religius Rasional, Pragmatis Instrumental. Karakteristik utama ideologi religious konservatif ialah orientasi pendidikannya yang merangarh dan didominasi oleh masalah duniyah (keagamaan). Pada aliran ideologi religious rasional terlihat pada kesungguhannya dalam upaya mempertemukan kepentingan keagamaan dan keduniwian. Adapun aliran ideologi pragmatis instrumental dicirikan pada upaya menjadikan pendidikan untuk menjawab berbagai tantangan dan kebutuhan kehidupan nyata. Muhammad Jawwad Ridha, *Al Tarbawi Al-Islami Muqaddamah Fi Ushulibi Al-Ijtima'iyah Wa Al-'aqlaniyah* (Beirut: Dar al Fikr al-Arabi, n.d.), p. 66-92.

bekal ilmu keguruan, penguatan muhadharah adalah merupakan contoh dari implementasi ideologi pragmatis instrumental.

Selain berbagai hal di atas, hal lain yang dapat ditarik secara teoritik, ialah bahwa modernisasi pendidikan Islam yang terjadi pada era revolusi ini masih menempatkan ulama atau guru agama sebagai pelaku utama modernisasi. Hal ini sama halnya dengan apa yang terjadi pada era kebangkitan atau era kolonial Belanda awal abad ke 20. Hanya saja sebagaimana dikemukakan di atas, yang membedakan dalam era ini adalah bahwa para ulama yang terlibat adalah para ulama yang berpikiran moderat dan terbuka, baik untuk menerima gagasan pembaharuan dari Barat/Eropa maupun terbuka untuk mengintrodusir dari berbagai kalangan organisasi Islam. Dengan demikian para ulama yang terlibat dalam modernisasi pendidikan Islam di era revolusi ini dapat juga dinyatakan sebagai ulama yang terbuka untuk bekerjasama tanpa dibelenggu oleh sektarian dan golongan. Hal itu terbukti dengan keterlibatan para ulama yang menggagas pembaharuan pendidikan Islam SMIP-1946 yang berasal dari berbagai latar belakang pengalaman dalam bidang pemikiran dan aktivitas pengelolaan pendidikan serta latar belakang paham dan organisasi keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian. "Sejarah Pendidikan Islam Dan Organisasi Ditjen Pendidikan Islam," 2022. <https://pendis.kemenag.go.id/profil/sejarah>.
- Alfian. *Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization under Dutch Colonialism*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, n.d.
- Arif Subhan. *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad Ke-20*. Ke I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Asy`ari, H.Muhammad. "Sejarah Singkat SMIP 1946." *Seminar Dalam Rangka Ulang Tahun SMIP-1946*. Banjarmasin, 2014.
- Benda, Harry J. *Bulan Sabit Dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1980.
- Deliar Noer. *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1978.
- Deliar Noor. *Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1942*. Edited by 8. Jakarta: Pustaka LP3ES, 1996.
- Deliar Nur. *Partai Islam Di Pentas Nasional 1945-1965*. Cet. I. Jakarta: Grafiti Press, 1987.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES., 2011.
- Fogarty, Robin. *How to Integrate The Curricula*. New York: IRI/Skylight Publishing. Inc., 1991.
- Fogg, Kevin W. *Spirit Islam Pada Masa Revolusi Indonesia*. I. Jakarta: Noura Books PT Mizan Publika, 2020.
- Gar, Gilbert Josephraghan. *A Guide to Historical Method*. Edited by Jean Delanglez. Michigan: he University of Michigan, 1957.
- Gottschalk, Louis. *Understanding History: A Primer of Historical Method, Terjemahan Nugrobo Notosusanto (Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah)*. Second edi. Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1975.

- Hamzah, Syeh Hawib. "Pemikiran Mahmud Yunus Dalam Pembaruan Pendidikan Islam Di Indonesia." *Dinamika Ilmu* 14, no. 1 (2014): 123–47. https://iain-samarinda.ac.id/ojs/index.php/dinamika_ilmu/article/view/18.
- Husna. "Kontribusi Keluarga Besar Kh. Hanafie Gobit Dalam Mengembangkan Pendidikan Islam Di Kota Banjarmasin (Studi Tentang Penguatan Pendidikan Agama Islam Pada SMIP 1946, Pondok Pesantren Hunafaa Dan STAI Al Jami Banjarmasin)." Universitas Islam Negeri Antasari Program Pasca Sarjana Prodi Pai Banjarmasin, 2020.
- Ibrahim. *Inovasi Pendidikan (Pengantar Untuk Memahami Apa Dan Bagaimana Difusi Dan Implementasi Inovasi Pendidikan)*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, 1988.
- Idwar, Saleh. M. *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*. Edited by Dkk. Sutrisno Kutoyo. *Penelitian Sejarah Dan Budaya, Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Daerah*. Banjarmasin: Kantor Wilayah, Bidang Kesenian, Bidang Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan, Departemen P dan K Propinsi Kalimantan Selatan., 1978.
- Indonesia, Tim CNN. "Sejarah Perjanjian Linggarjati: Isi Dan Hasil." 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210608135009-31-651711/sejarah-perjanjian-linggarjati-isi-dan-hasil-perundingan.%0A>.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam Dan Politik*. Edited by Imron Nasri. Yogyakarta: Volume Yogyakarta, 2018.
- Maksum, M.Nur. "Musyawaratutthalibin , Organisasi Islam Lokal Terbesar Di Kalimantan Selatan." *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 2 (2010): 203–28.
- Malisi, M. Ali Sibram. "Modernization of Islamic Education in South Kalimantan (Socio-Historical Perspective of Normal Islam Amuntai)." *Ijtimā'iyya: Journal of Muslim Society Research* 2, no. 1 (2017): 43–66. <https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v2i1.1051>.
- Mobini-kesheh, Natalie, and East Indies. "The Arab Periodicals of the Netherlands." *Bijdragen* 152 (1996): 236–56.

- Muhammad Jawaad Ridha. *Al Fikr Al Tarbawi Al-Islami Muqaddamah Fi Ushulibi Al-Ijtima'iyah Wa Al-'aqlaniyah*. T.Tp: Dar al Fikr al-Arabi, n.d.
- Nakosten, Mehdi. *History of Islam Origins of Western Education A.D. 800-1350 with an Introduction to Medieval Muslim Education*. Boulder, Colorado: The University of Colorado Press, 1964.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: Indonesia Press, 1985.
- . *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran Dan Gerakan*. Cetakan 9. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Nasution, Robby Darwis. "Kyai as a Agent of Change and Peacemaker in the Traditional Society." *Sosiobumaniora*, 19, no. 2 (2017): 182.
- Nasution, S. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Nizar, Samsul. *Sejarah Pendidikan Islam : Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*. Ed. 1, Cet. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Penyusun, Tim. *Lima Puluh Tahun "SMIP-1946*. Banjarmasin: Panitia HUT "SMIP-1946" Ke-50, 1996.
- Qardhawi, Yusuf. *Dasar Pemikiran Hukum Islam: Taqlid Ijtihad*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- R`O.G, Benidic. Andrson. *Java in Time Revulotion, Occupation and Resistance 1944-1946*. Jakarta: Equinox Published, 2006.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 2017.
- Ramayulis, Haji. *Sejarah Pendidikan Islam : Napaktilas Perubaban Konsep, Filsfat Dan Metodologi Dari Era Nabi SAW Samapi Ulama Nusantara*. Jakarta: Kalam Mulia, 2011.
- Ramli Nawawi. dkk. *Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Selatan*. Edited by Ramli Nawawi. Banjarmasin: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya, 1992.

- Ridha, Muhammad Jawwad. *Al Tarbawi Al-Islami Muqaddamah Fi Ushulibi Al-Ijtima'iyah Wa Al-'aqlaniyah*. Beirut: Dar al Fikr al-Arabi, n.d.
- Ritonga, Maimuna. "Politik Dan Dinamika Kebijakan Perubahan Kurikulum Pendidikan Di Indonesia Hingga Masa Reformasi." *Bina Gogik* 5, no. 2 (2018): 1–15.
- Sargen, Lyman Tower. *Contemporary Political Ideologies: A Comparative Analysis*. Fourteenth. Australia • Brazil • Japan • Korea • Mexico • Singapore • Spain • United Kingdom • United States: Homewood, Ill: Dorsey Press, 1975.
- Steenbrink, Karel A. *Pesantren, Madrasah, Sekolah (Pendidikan Islam Dan Kurun Moderen)*. Jakarta: LP3ES, 1991.
- Stibbe, D.G, J. Stroomberg, and D.G Stibbe. "Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie." s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1932.
- Syahrudin. *Orang Banjar (Menjadi Indonesia) Dinamika Organisaasi Islam Di Borneo Selatan 1912-1942*. Edited by M.Nazir S. Ketiga. Yogyakarta: Eja Publisher, 2017.
- Syamsuddin, Helius. *Metodologi Sejarah*. 2nd ed. Yogyakarta: Ombak, 2007.
- Tim, LP2M UIN Antasari dan MUI Propinsi Kalimantan Selatan. *Ulama Banjar Dari Masa Ke Masa*. Edited by Dkk. Dr. Wardani. *Antasari Press*. III. Banjarmasin: Antasari Press, 2018.
- Turmudi, Endang. *Perselingkuhan Kiai Dan Kekuasaan*. Cet. 1. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Wahid, Salahuddin. *Transformasi Pesantren Teboireng, Menjaga Tradisi DiTengah Tantangan*. 1st ed. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Wajidi. *Nasionalisme Indonesia Di Kalimantan Selatan 1901-1942*. Banjarmasin: Pustaka Banua, 2007.
- Yunus, Haji Mahmud. *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1992.
- Zuhairini. et.all. *Sejarah Pendidikan Islam*. 1st ed. Vol. 11. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. SK Yayasan Pengelola SMIP-1946

**SUSUNAN KEPENGURUSAN YAYASAN KESEJAHTERAAN
MADRASAH MENENGAH ISLAM BANJARMASIN
(Pengurus Lama)**

Pelindung	:	H. Maksid, Gubernur KDHI Tk. I Kalsel.
Penasehat	:	1. H. Ahmad Amin 2. H. Busran Karim 3. Djantera
Ketua	:	H. Hanafie Gobit
Wakil Ketua	:	Abu Bakar Razy
Penulis	:	H. Ijab
Bendahara	:	H. Achmad Gazaly
Pembantu - pembantu	:	1. Sukeran 2. H. Abdul hadi 3. Marbuddin 4. Abdul Majid Salman 5. H. Hasan Basri
Anggota Dewan Pengawas	:	1. Kepala Kantor Pendidikan Agama Tk. I Kalimantan Selatan. 2. Muchtar, Pemimpin Urusan Pendidikan Ekonomi pada Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Daerah Tk. I Kalimantan Selatan.

**SUSUNAN KEPENGURUSAN YAYASAN
PENDIDIKAN ISLAM "SMIP 1946"
(Periode 1984 – 1989)**

Penasehat	:	H. Hanafie Gobit
Ketua	:	Drs. H. M. Asy'ari, MA.
Wakil Ketua I	:	H. Syukran AM, BA.
Wakil Ketua II	:	Drs. H. Mas'ud Djuhri
Sekretaris	:	Drs. Athaillah Baderi
Wakil Sekretaris	:	Abdul Kadir Khalidi
Bendahara	:	H. Abdillah
Wakil Bendahara	:	H. Siti Basrah
Bidang Pendidikan / Pengajaran	:	1. Drs. H. Ajidan Noor 2. H. Hamidah, BA.
Bidang Usaha / Dana	:	1. H. Abdul Halim Hamid, SH. 2. Busri Nafarin
Bidang Sarana	:	1. Drs. H. Dja'far Sabran 2. Drs. Ramli Noor Zain
Bidang Kesejahteraan	:	1. Drs. Abdul Malik 2. Bachtiar Effendi, BA.

SUSUNAN KEPENGURUSAN YAYASAN
PENDIDIKAN ISLAM "SMIP 1946"
(Periode 1989 - 1994)

Penasehat	:	1. H. M. Hanafie Gobit 2. Drs. H. M. Asy'ari, MA.
Ketua	:	H. Syukran AM, BA.
Ketua I	:	H. Abdillah
Ketua II	:	Drs. H. Ajiddan Noor
Sekretaris	:	A. Rasyid Rahman, SH.
Wakil Sekretaris	:	Dra. Rifah Razak
Bendahara	:	H. M. Aini Hamid
Wakil Bendahara	:	Aulia Aziza H. Masaleh
Bidang Pendidikan / Pengajaran	:	1. Drs. Burhanuddin Abdullah 2. Drs. Ali Imran
Bidang Sarana	:	1. Ir. Hudan Rahmani 2. Ir. Azhar
Bidang Dana	:	1. H. Abd. Majid HAS 2. H. A. Tajuddin Noor Nasthasurya
Bidang Kesejahteraan	:	1. Drs. Abdul Malik 2. Drs. Hasan Basri Nasrun

**SUSUNAN KEPENGURUSAN YAYASAN
PENDIDIKAN ISLAM "SMIP 1946"
(Periode 1995 - 2000)**

Penasehat	:	1. Drs. H. M. Asy'ari, MA. 2. DR. H. Alfani Daud 3. H. Abdillah	
Ketua	:	H. Syukran AM, BA.	
Wakil Ketua I	:	Drs. H. Husaini SY.	
Wakil Ketua II	:	Drs. Burhanuddin Abdullah, MA.	
Sekretaris	:	A. Rasyid Rahman, SH.	
Wakil Sekretaris	:	Taufiq Hidayat, SH.	
Bendahara	:	H. M. Aini Hamid	
Wakil Bendahara	:	Dra. Rajihah	
1. Bidang Pendidikan / Pengajaran	:	H. Siti Wardah Drs. Abd. Malik Dra. Unaizah Drs. H. M. Daud SYRF. Sempurna	(Ketua) (Sekretaris) (Anggota) (Anggota) (Anggota)
2. Bidang Sarana dan Pengembangan	:	Drs. M. Amin J. MA Drs. H. Syahrudi Drs. Hasan Basri N Drs. Abd. Halim	(Ketua) (Sekretaris) (Anggota) (Anggota)
3. Bidang Dana	:	H. A. Filman Drs. M. Saukie Ny. Aulia Aziza Ahmad Damin, SH Hamdi	(Ketua) (Sekretaris) (Anggota) (Anggota) (Anggota)

SUSUNAN PENGURUS H B P
(HIMPUNAN BEKAS PELAJAR) SMIP
(Sejak 26 - 4 - 1959)

Pelindung / Penasehat	:	1. H. Hanafie Gobit 2. H. Abdurrahman Isma'il
Ketua Umum	:	M. Joesran H. S.
Ketua I	:	Sjukran A. M.
Ketua II	:	Sjukri, BA.
Sekretaris Umum	:	Bahri As.
Sekretaris I	:	Abdul Kadir
Sekretaris II	:	H. Rasunie
Bendahara I	:	Qamaruddin Noor
Bendahara II	:	Faisal
Pembantu - pembantu	:	1. Asli Tamami 2. H. M. Roeslan 3. Abdillah 4. Aliansyah Is 5. H. Adnani 6. H. Irsjad 7. H. Djailanie
Seksi Keuangan	:	1. Marbuddin 2. 3. 4. 5.
Seksi Pendidikan / Pengajaran	:	1. Pardi Djunaidi 2. Basran Salman 3. M. Djunaidie As. Chalid 4. Hamidah, BA. 5. Antung Barlian
Seksi Penerangan / Penerbitan	:	1. M. Helmi Toha 2. Salfia Saberi 3. Ali Mas'ud 4. M. Mahyuddin 5. Djamberi 6. St. Basrah 7. Fachriah 8. M. D. Bulya

PERSONALIA PENGURUS HIMPUNAN KELUARGA BESAR (H K B)
"SMIP 1946" BANJARMASIN
(Periode 1983 sampai sekarang)

Pelindung	:	Yayasan Pendidikan Islam "SMIP 1946"
Penasehat	:	1. Drs. H. M. Asy'ari, MA. 2. Drs. H. Mas'ud Djuhri 3. H. Abd. Halim, SH. 4. H. M. Syukran AM, BA.
Ketua Umum	:	Bakhtiar Effendi
Ketua I	:	Burhanuddin Abdullah
Ketua II	:	H. St. Wardah Hanafie
Sekretaris Umum	:	M. Amin Djamaluddin
Sekretaris I	:	A. Rasyid Rahman
Sekretaris II	:	Fatimah Zuhrah
Bendahara I	:	M. Noor Ifansyah
Bendahara II	:	Sahlah Razak
Seksi - Seksi :		
Pendidikan / Pengajaran	:	1. Muhammad Fadhli 2. Syahrudi 3. Rifah Razak
Penerangan / Komunikasi	:	1. Hudan Rahmani 2. Asmuni 3. Sambah
Dana / Prasarana	:	1. M. Kusmawan Amin 2. M. Yusran 3. Rajihah Hanafie
Keputrian	:	1. Suhriah 2. Rani Filiannor 3. Asni Arfan
Olahraga / Kesenian	:	1. Suratin 2. Adian Noor 3. Rosihan Anwar
Pembantu Umum	:	1. Jamaluddin 2. Bahrin 3. Sri Harmini 4. Husnul Madihah 5. M. Khalid Fikrie

3. Pimpinan/Kepala Sekolah SMIP 1946



**DIREKTUR / KEPALA SMIP 1946
SEJAK 1946 S/D SEKARANG**



ABDURRAHMAN
Kepala SMIP 1946
1973 - 1976



H. ALIANSYAH IS. BA
Kepala SMP SMIP 1946
1976 - 1995



BAHRI ASPAN
Kepala MTs SMIP 1946
1981 - 1984



Hj. ST. WARDAH
Kepala MTs SMIP 1946
1984 - sekarang



A. RASYID RAHMAN, SH.
Kepala ALIYAH
SMIP 1946
1988 - sekarang



Dra. RAJIHAH HANAFI
Kepala SMP SMIP 1946
1995 - sekarang

4. Gedung SMIP-1946 saat ini



BIODATA PENULIS

Prof. Dr. Syaifuddin, M.Ag. lahir di Kota Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan pada tanggal 21 Juni 1958. Pendidikan yang pernah ditempuh SDN dan Madrasah Islamiyah tamat tahun 1970, PGAN 4 tahun, tamat tahun 1994 dilanjutkan dengan PGAN Negeri 6 Tahun, tamat tahun 1970. Kemudian melanjutkan kuliah pada Fakultas Tarbiyah Barabai (Program Sarjana Muda), lulus tahun 1980. Setelah itu melanjutkan kuliah program Sarjana pada Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin, lulus tahun 1984. Program Magister ditempuh pada IAIN Alauddin Ujung Pandang (Makassar) dalam bidang Studi Islam. Program doctor ditempuh di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, lulus tahun 2008. Pengalaman mengajar dimulai bekerja sebagai guru Bahasa Inggris honorer di SMA di Barabai dan sebagai Dosen Bahasa Inggris di Fakultas Tarbiyah Barabai tahun 1980-1981, Guru honorer dalam mata pelajaran Bahasa Inggris di SMA Pemuda Banjarmasin dan Pengajar Bahasa Prof. Dr. Syaifuddin Sabda, M. Ag. 348 Inggris pada Lembaga Bahasa IAIN Antasari tahun 1984- 1986.

Setelah diangkat Menjadi Dosen IAIN Antasari tahun 1986 mengajar beberapa mata kuliah disamping pada bidang keahlian Pengembangan Kurikulum, seperti Bahasa Inggris, Ilmu Pendidikan dan Filsafat Pendidikan. Sejak tahun 2009 diangkat sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Pendidikan dan mengajar pada bidangnya, pengembangan kurikulum, filsafat pendidikan dan Manajemen pendidikan, baik deprogram sarjana maupu di Pascasarjana. Jabatan struktural yang pernah dipegang, yaitu sebagai Kepala Pusat Penelitian IAIN Antasari tahun 2001- 2004, Dekan Fakultas Tarbiyah dua periode , yaitu 2004- 2008 dan periode 2008-2012. Direktur Pascasarjana IAIN Antasari selama Sembilan bulan Sembilan hari pada tahun 2013. Sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga IAIN Antasari Banjarmasin periode 2013-2017, dan Direktur Pascasarjana Periode 2017-2021.

Karya Ilmiah dalam bentuk buku yang pernah diteritkan (1) Tipologi Kurikulum Pondok Persantren di Kalimantan Selatan; (2)

Model Kurikulum Terpadu Iptek dan Imtaq (Teori, Pengembangan, dan Implementasi); (3) Konsep Kurikulum Pendidikan Islam (Refleksi atas Pemikiran Al-Ghazali); (4) Model Pengembangan Kurikulum yang Memadukan Iptek dan Imtaq (Sebuah Pengembangan Kurikulum Mata Pelajaran Umum dengan Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Madrasah/ Sekolah); (5) Pengembangan Kurikulum (tinjauan Teoritis); (6) Brand Equity Uin Antasari (Studi Tentang Kekuatan Brand Uin Antasari).

Selain itu, berbagai tulisan dalam bentuk makalah yang disampaikan pada berbagai seminar dan diterbitkan pada berbagai jurnal ilmiah. Hasil penelitian yang pernah dilakukan dan dihasilkan, antara lain: (1) Studi Komparatif Pembinaan Profesi 349 Keguruan pada Sekolah Pendidikan Guru Negeri (SPGN) dan Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) Barabai; (2) Studi Analisis Konsep Kurikulum Pendidikan Islam menurut al-Ghazali; (3) Relevansi Kurikulum Fakultas Tarbiyah dengan Tuntutan Profesi Keguruan (Studi atas Alumni Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin); (4) Potret Pesantren Hidayatullah Balikpapan; (4) Typologi Kurikulum Pesantren di Kalimantan Selatan; (5) Potensi Kompliks Antar Etnis di Kalimantan Selatan; (6) Studi Kelayakan Pembangunan Pesantren Modern di Kalimantan Selatan; (7) Efektivitas Metode Tamyiz terhadap Kemampuan Menterjemahkan al-Qur'an dan Membaca Kitab Berbahasa Arab di IAIN Antasari Banjarmasin; (8) Digital Native dan Digital Imigran (Studi pada Guru-guru pada Madrasah Aliyah di Kalimantan Selatan).